

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 7 No. 1 Januari 2019

- **PENGUATAN KARAKTER PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PROGAM REHABILITASI UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BAIK (STUDI PADA YAYASAN SAHABAT KAPAS)** (Sri Rahayu, Dewi Gunawati, Triana Rejekiingsih)
- **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM *FULL DAY SCHOOL* TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK** (Rendi Setiya Kurniawan, Triana Rejekiingsih, Moh. Muchtarom)
- **PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAKSA MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** (Ismawati, Rima Vien Permata Hartanto, Triana Rejekiingsih)
- **STRATEGI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM RANGKA *DIGITAL CITIZENSHIP* (STUDI PADA UNIT LAYANAN ADUAN SURAKARTA)** (Lestyo Mawarti, Triana Rejekiingsih, Rima Vien P.H)
- **STUDI TENTANG *CIVIC DISPOSITION* PADA KELAS DIGITAL (*DIGITAL CLASS*) DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMA N 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018)** (Lisa Agustini, Rini Triastuti, Winarno)
- ***SUPER TIMWORK*: SUPERVISI AKADEMIK, OPTIMALISASI MGMPs DAN WORKSHOP UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA** (Rahayuningsih)
- **PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK DALAM MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII TKJ A SMK NEGERI 2 SALATIGA SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019** (Maretha Ulfa Putriska & Nani Mediatati)
- **PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI KELAS X (SEPULUH) KGSP-B SMK NEGERI 2 SALATIGA** (Regi Kristiawan & Nani Mediatati)

**ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARANEGARAAN INDONESIA(AP3Kni)**

Jurnal PPKn

Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Vol. 7 No. 1 Januari 2019

- PENGUATAN KARAKTER PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PROGRAM REHABILITASI UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BAIK (STUDI PADA YAYASAN SAHABAT KAPAS) (Sri Rahayu, Dewi Gunawati, Triana Rejekiingsih)
- EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM *FULL DAY SCHOOL* TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK (Rendi Setiya Kurniawan, Triana Rejekiingsih, Moh. Muchtarom)
- PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAKSA MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Ismawati, Rima Vien Permata Hartanto, Triana Rejekiingsih)
- STRATEGI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM RANGKA *DIGITAL CITIZENSHIP* (STUDI PADA UNIT LAYANAN ADUAN SURAKARTA) (Lestyo Mawarti, Triana Rejekiingsih, Rima Vien P.H)
- STUDI TENTANG *CIVIC DISPOSITION* PADA KELAS DIGITAL (*DIGITAL CLASS*) DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMA N 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018) (Lisa Agustini, Rini Triastuti, Winarno)
- *SUPER TIMWORK*: SUPERVISI AKADEMIK, OPTIMALISASI MGMPs DAN WORKSHOP UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA (Rahayuningsih)
- PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK DALAM MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII TKJ A SMK NEGERI 2 SALATIGA SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019 (Maretha Ulfa Putriski & Nani Mediatati)
- PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI KELAS X (SEPULUH) KGSP-B SMK NEGERI 2 SALATIGA (Regi Kristiawan & Nani Mediatati)

Jurnal PPKn

ISSN 2303-9412

Penerbit

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
(AP3KnI) - Jawa Tengah

Mitra Bestari

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Harmanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Nurul Zuriah, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi

Dr. Triyanto, SH., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Ketua Penyunting

Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. (Universitas Sebelas Maret)

Anggota Dewan Penyunting

Raharjo, S.Pd., M.Sc
Arif Kriswahyudi, S.Pd.
Dewi Wulandari, S.Pd

Alamat Redaksi

Gedung C FKIP UNS
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta
Telp/Faks. 0271-646939
Email: *jurnal_ppkn@yahoo.com*
Website: <http://ppkn.org>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya Jurnal PPKn Vol. 7 No. 1 Januari 2019. Jurnal ini diterbitkan oleh asosiasi PPKn Indonesia wilayah Jawa Tengah.

Jurnal ini berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn). Jurnal ini dapat menjadi referensi dalam penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang PPKn. Sasaran pembaca dari Jurnal ini adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati PPKn.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para editor dan tim penyunting jurnal yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Januari 2019

Redaksi

DAFTAR ISI

- PENGUATAN KARAKTER PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PROGRAM REHABILITASI UNTUK MEMBENTUK WARGA NEGARA YANG BAIK (STUDI PADA YAYASAN SAHABAT KAPAS(Sri Rahayu, Dewi Gunawati, Triana Rejekiningsih)..... 1-11
- EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM *FULL DAY SCHOOL* TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK (Rendi Setiya Kurniawan, Triana Rejekiningsih, Moh. Muchtarom)..... 12-26
- PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAKSA MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Ismawati, Rima Vien Permata Hartanto, Triana Rejekiningsih) 27-40
- STRATEGI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA MENYAMPAIKAN PENDAPAT DALAM RANGKA *DIGITAL CITIZENSHIP* (STUDI PADA UNIT LAYANAN ADUAN SURAKARTA) (Lestyo Mawarti, Triana Rejekiningsih, Rima Vien P.H) 41-56
- STUDI TENTANG *CIVIC DISPOSITION* PADA KELAS DIGITAL (DIGITAL CLASS) DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SMA N 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018) (Lisa Agustini, Rini Triastuti, Winarno).....57-71
- *SUPER TIMWORK*: SUPERVISI AKADEMIK, OPTIMALISASI MGMPs DAN WORKSHOP UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA (Rahayuningsih) 72-87
- PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK DALAM MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII TKJ A SMK NEGERI 2 SALATIGA SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019 (Maretha Ulfa Putriska & Nani Mediatati)88-104
- PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI KELAS X (SEPULUH) KGSP-B SMK NEGERI 2 SALATIGA (Regi Kristiawan & Nani Mediatati) 105-120

PENGUATAN KARAKTER PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PROGAM REHABILITASI UNTUK MEMBENTUK WARGANEGARA YANG BAIK (STUDI PADA YAYASAN SAHABAT KAPAS)

Sri Rahayu*, Dewi Gunawati, Triana Rejekiningsih
Prodi PPKn, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

*Email: rahayusri23021996@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine: 1) The importance of strengthening character in children in conflict with the law through rehabilitation programs by Sahabat Kapas; 2) Efforts to strengthen character in children who are in conflict with the law by Sahabat Kapas; 3) The impact of strengthening the character of children in conflict with the law by Sahabat Kapas; 4) Constraints faced in strengthening character in children who are in conflict with the law by Sahabat Kapas. This study uses a qualitative approach with descriptive qualitative. Data collection uses observation, interviews, and document analysis. Testing the validity of the data using an interactive analysis model. Conclusion of the research results: 1) Strengthening the character of the AKH (Children in Conflict with the Law) is important because children in detention centers (detention centers) still cannot show good behavior, such as: hitting each other, asking for and forcing, due to several factors including boredom when in detention, therefore it is important to provide assistance in order to restore the psychological condition of the child 2) Efforts to strengthen character through rehabilitation programs are carried out with three types of assistance which include; psychological assistance (children are given the opportunity to convey their complaints), psychosocial assistance (planting values so that children can integrate with the community when they leave later), and economic value skills (making handicrafts and other works) using individual methods and group. 3) The impact of character strengthening on AKH including: a) more open children; b) children are more confident; c) creative; d) attitudes toward others are more positive. But the legal awareness shown by the AKH when it came out of the detention center still tended to be low, this was indicated by their behavior which tends to deviate again, such as revenge, committing a crime, to recidivism. 4) Constraints faced in character strengthening are grouped into two, namely: a) Internal constraints, including lack of human resources and SOP for mentoring that is not optimal; b) External Constraints, which include; community stigma against AKH which tends to be negative and restoration of AKH behavior which still requires long-term and continuous time.*

Keywords: *Character, Children in Conflict Law, Rehabilitation*

PENDAHULUAN

Globalisasi yang selama ini terjadi telah memberikan berbagai dampak bagi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Selain dampak positif, tak sedikit pula muncul dampak negatif, seperti yang sering kita jumpai masalah-masalah yang muncul di Indonesia. Bangsa Indonesia

dikategorikan dalam kondisi krisis, bahkan bukan satu krisis, tetapi krisis multidimensi, yaitu melibatkan semua sisi kehidupan (sosial, budaya, politik, agama, pertahanan, dan keamanan). Dapat kita lihat banyak terjadi praktik korupsi serta kerusakan diri pada generasi pemuda seperti narkoba dan seks bebas. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah anak

yang harus mendiami rutan (rumah tahanan) akibat melanggar hukum. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), jumlah anak yang berada di rutan meningkat setiap tahunnya. Kini jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) di Indonesia sesuai data dari lapas yaitu :

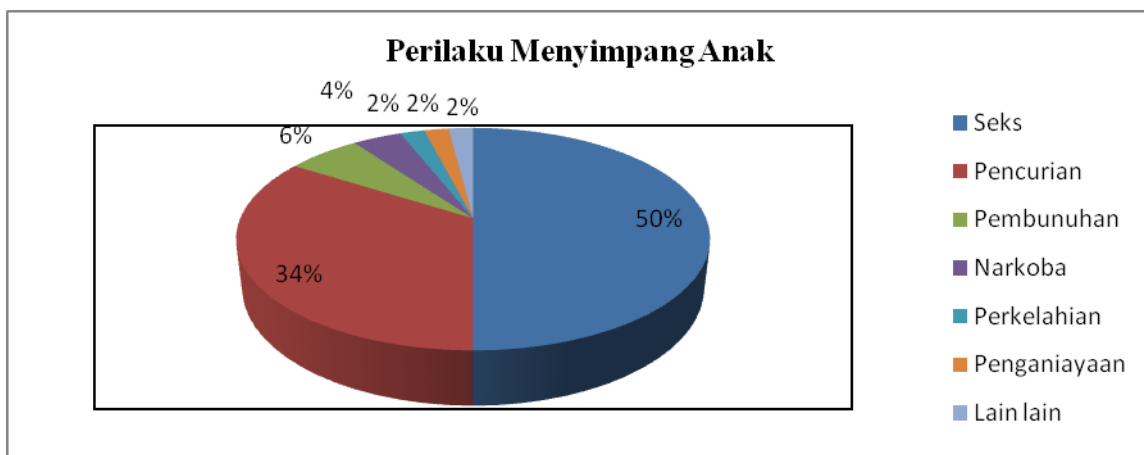
Tabel 1.1. Jumlah AKH di Indonesia

4	Tahun	Jumlah AKH
1	2015	2270
2	2016	2319
3	2017	2446

Sumber : <http://smslap.ditjenpas.go.id/>
diakses 11 Januari 2017 pukul : 17.00 WIB.

Di Indonesia jumlah anak yang

berkonflik dengan hukum (generasi muda) akibat perilaku menyimpang cukuplah banyak. Sesuai data dari rutan, untuk Indonesia jumlah AKH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum) semakin meningkat setiap tahunnya, akhir tahun 2015 sebanyak 2270 anak, dan meningkat tahun 2016 sebanyak 2319 anak, untuk akhir tahun 2017 sebanyak 2446 anak. Sedangkan jumlah AKH di Jawa Tengah per desember 2017 sebanyak 102 anak. Kebanyakan perilaku yang menyebabkan mereka harus menghuni rumah tahanan yaitu karena perbuatan seks, kasus pencurian, pengeroyokan, tawuran dan masih banyak lagi. Berikut data penyebab anak masuk rutan atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) tahun 2017 yang ditemui Sahabat Kapas



Gambar 1.1. Kasus AKH (Anak yang Berkonflik dengan Hukum)

Berdasarkan laporan dari Rutan Soloraya (Surakarta, Klaten dan Wonogiri) serta LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kutoarjo, anak-anak di penjara sebagian besar karena perbuatan seks atau persetubuhan. Baik itu dilakukan terhadap teman maupun saudaranya sendiri. Berangkat dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh generasi muda (anak), maka diperlukan pendidikan tentang karakter bagi semua

warga negara, termasuk mereka para anak yang berkonflik dengan hukum (AKH). Karakter menurut Thomas Lickona yaitu:

Character so conceived has three interrelated parts : Moral knowing, moral feeling, and moral behavior. Good character consists of knowing the good, desiring the good, and doing the good, habits of the mind, habits of the heart,

and habits of action. All three are necessary for leading a moral life, all three make up moral maturity. When we think about the kind of character we want for our children, it's clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation for within.

(Dari teori karakter yang dikemukakan Thomas Lickona tersebut dapat dijelaskan bahwa karakter mencakup tiga hal yaitu pengetahuan moral (pemikiran/otak manusia), perasaan moral (hati), dan tindakan moral (perilaku). Karakter yang baik mencakup mengetahui yang baik, menginginkan yang baik, dan melakukan kebaikan, "kebiasaan pikiran, kebiasaan hati, dan kebiasaan bertindak. Ketiganya diperlukan untuk menjalani kehidupan moral, ketiganya membentuk kematangan moral. Ketika kita berfikir tentang jenis karakter yang kita inginkan untuk anak-anak, jelas bahwa kita ingin mereka dapat menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar, bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam). (Thomas Lickona, 2012 : 82).

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwasanya untuk membentuk karakter yang baik bagi seseorang maka diperlukan tiga komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Seseorang sebelum berperilaku baik tentu harus memiliki

pengetahuan yang baik terlebih dahulu, baru setelah itu berperasaan (dapat mengolah hati) dengan baik, dan yang terakhir bisa menampilkan perbuatan yang baik. Penanaman karakter ini penting dilakukan kepada para generasi muda terlebih bagi mereka para AKH agar menjadi warga negara yang baik, sehingga sadar akan hukum.

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi di rutan eks karisidenan Surakarta, terutama di rutan Wonogiri, anak-anak cenderung belum memperoleh pendidikan terkait karakter warga negara. Berdasarkan wawancara awal dengan para AKH, mereka mengaku merasa sangat bosan dengan keseharian mereka, setiap hari bertemu dengan orang yang sama, kurang interaksi dengan orang luar, serta perasaan yang sering tidak tenang. Hal ini justru membuat mereka menjadi stres, bukan membaik. Untuk itu perlu ditanamkan karakter terhadap para AKH dengan suatu inovasi sehingga mereka tidak bosan dengan aktivitas di rutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan terbagi menjadi tiga jalur, yaitu pendidikan formal, informal, dan non formal. Mengenai pelaksanaan pendidikan non formal telah berdiri berbagai macam lembaga kemasyarakatan, salah satunya Sahabat Kapas. Sahabat Kapas merupakan organisasi non-pemerintah dan non-profit yang berada di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pengurus dan relawan Sahabat Kapas terdiri dari orang-orang yang peduli terhadap kebutuhan anak yang untuk sementara waktu terpaksa menghuni Rutan akibat melakukan pelanggaran hukum. Visi dari Sahabat Kapas yaitu terpenuhinya hak AKKR (Anak Kondisi Khusus dan Rentan) sehingga terwujud anak yang

berkepribadian positif, mandiri, dan percaya diri.

Visi tersebut sesuai dengan tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik. Menurut Cogan dan Dericot (dalam Winarno 2009: 37-38) Warga negara memiliki beberapa atribut diantaranya: (1) *a sense of identity*; (2) *the enjoyment of certain rights*; (3) *the full ment of corresponding obligations*; (4) *a degree of interest and involvement in public affairs*; and (5) *an acceptance of basic societal values*. (Mengandung pengertian bahwa karakteristik warga negara meliputi: (1) rasa identitas; (2) kenikmatan hak-hak tertentu; (3) pemenuhan kewajiban yang sesuai; (4) tingkat minat dan keterlibatan dalam urusan publik; dan (5) penerimaan nilai-nilai sosial dasar). Atribut warga negara tersebut tentunya berbeda antar negara, semua bergantung pada sistem politik negara masing-masing. Bagi Indonesia yang berdasarkan pada ideologi Pancasila, maka karakter kewarganegaraannya akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila, dan Konstitusi yang berlaku yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pembentukan karakter pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) yang dilakukan oleh Sahabat Kapas sesuai dengan poin kelima dari atribut warga negara yang dikemukakan Cogan dan Dericot, dimana penguatan karakter merupakan proses penerimaan nilai-nilai sosial dasar bagi anak. Anak akan dibentuk menjadi warga negara yang baik dengan dilakukan penanaman nilai-nilai pada diri mereka. Warga negara yang baik ukurannya adalah konstitusi negara yang bersangkutan, selama perilaku seseorang tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku dapat dikatakan sebagai warga negara yang baik (Derek

Heater, 2004). Maka dari itu warga negara yang baik erat kaitannya dengan manusia yang sadar akan hukum, dimana ia bisa mematuhi hukum yang berlaku di negaranya dengan wujud perilaku, inilah yang juga menjadi harapan dari para relawan Sahabat Kapas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sementara itu pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan lebih menekankan pada kajian interpretatif. Seperti halnya pada penelitian ini yaitu peneliti menyajikan data deskriptif berupa keterangan dan tanggapan yang dilontarkan oleh narasumber saat wawancara, kemudian hasil observasi, dan juga dilakukan pula studi dokumen untuk menunjang penelitian penguatan karakter pada anak yang berkonflik dengan hukum melalui program rehabilitasi untuk membentuk warga negara yang baik oleh Sahabat Kapas.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *puposive sampling*, karena untuk mengetahui siapa saja yang lebih memahami terkait permasalahan yang diteliti sudah jelas, yaitu para relawan Sahabat Kapas serta para AKH (anak yang berkonflik dengan hukum) yang berada di Rutan Wonogiri.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada para relawan Sahabat Kapas, yang meliputi manager program rehabilitasi anak serta para relawan regular, dan juga kepada

anak-anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) di rumah tahanan Wonogiri. Observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi anak di dalam rutan. Sementara analisis dokumen yang digunakan berupa SOP (*Standart Operational Procedure*) Pendampingan, NSK (Narasi Sub Kegiatan) dari setiap pendampingan di rutan, serta materi ataupun silabus yang dimiliki Sahabat Kapas.

Patton dalam Sutopo (2002: 78) mengkategorikan triangulasi menjadi empat jenis yaitu: “(1) triangulasi data (*data triangulation*), (2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (3) triangulasi metode (*method triangulation*), dan (4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Sementara penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Sedangkan untuk teknis analisis data menggunakan analisis data interaktif Miles and Huberman (2007: 20) dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Penguatan Karakter pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Program Rehabilitasi oleh Sahabat Kapas

Penguatan karakter terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan anak membutuhkan pemulihan kondisi psikologis mereka, hal ini disebabkan dengan menghukum anak di dalam penjara belum tentu membuat mereka semakin membaik, berdasarkan temuan justru anak-anak mengalami kebosanan, stress dan berujung berbuat kenakalan. Anak-anak melakukan tindak pencurian, berhubungan seks, serta pada saat di penjara pun masih suka memukuli temannya. Tindakan anak yang

demikian mendukung teori kenakalan remaja yang disebut dengan *juvenile delinquency*, yaitu perbuatan melawan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dilakukan oleh anak. (Ninik Widiyanti, 1987: 34).

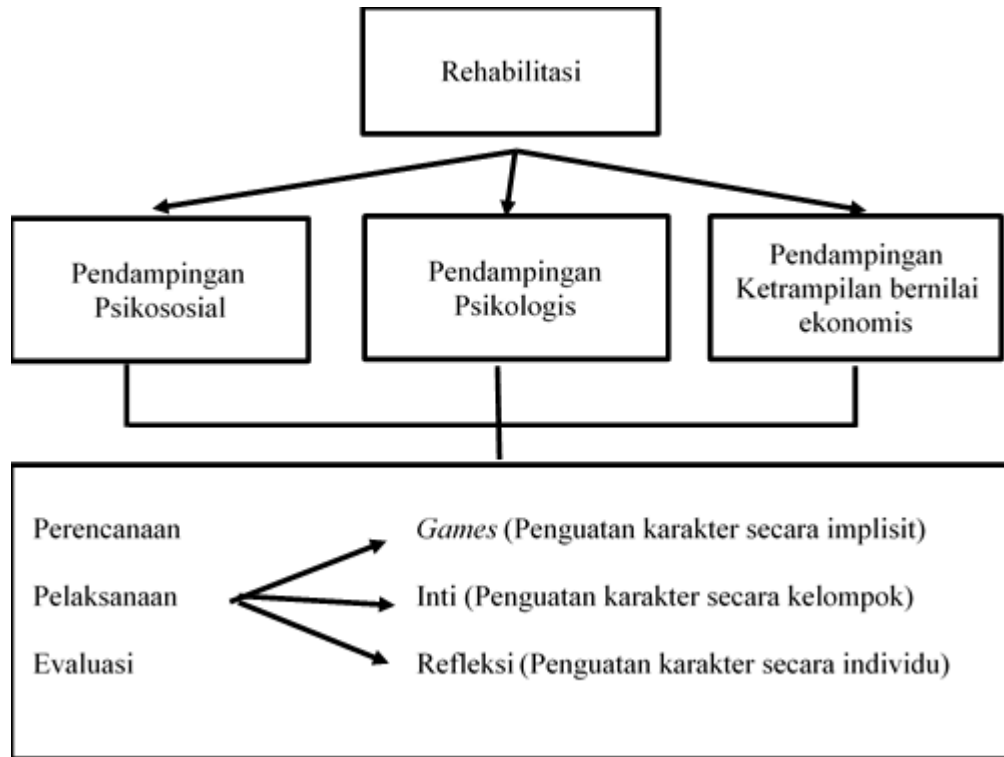
Kenakalan yang mereka lakukan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah disfungsi keluarga, kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak lengkap, seperti ditinggal ayah atau ibunya merantau, perceraian kedua orang tuanya, hanya ditinggal bersama neneknya, pamannya, bahkan ada pula yang hidup di jalanan, sehingga mereka kurang mendapatkan perhatian ataupun kasih sayang dari orang tua, keluarga, maupun teman terdekat atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan teori kontrol sosial yang menyatakan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi lebih baik atau menjadi jahat. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat pada individu, bahwa setiap orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat semua orang dilahirkan mempunyai kecenderungan alami untuk melanggar peraturan yang ada di masyarakat. *Delinquent* dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan terhadap perilaku melanggar hukum. (Abintoro Prakoso, 2013: 43). Kaitannya dengan kewarganegaraan, adanya penguatan karakter ini sesuai dengan kewarganegaraan dalam arti substantif, dimana kewarganegaraan merujuk pada watak warga negara yang riil (Abdul Wahab dan Sapriya, 2011: 196). Sehingga adanya penguatan karakter ini penting dilakukan guna membentuk watak warga negara yang

baik.

Upaya Penguatan Karakter pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Progam Rehabilitasi oleh Sahabat Kapas

Upaya penguatan karakter oleh Sahabat Kapas dilakukan melalui pendampingan terhadap anak. Pendampingan tersebut berupa

pendampingan psikologis, pendampingan psikososial, dan ketrampilan yang bernilai ekonomis. Terdapat tiga tahap dalam melakukan pendampingan terhadap anak, diantaranya: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Agar lebih jelas bisa dilihat gambar dibawah ini.



Pada tahap perencanaan ini para relawan menyusun tujuan, materi, metode, serta jenis *games* yang akan diberikan kepada anak. Semua hal yang disusun dalam tahap perencanaan ini dilakukan berdasarkan inisiatif relawan serta memperhatikan kebutuhan anak. Setiap kegiatan yang dilakukan berdasarkan inisiatif relawan berarti telah menggunakan pendekatan dari atas (*Top down approach*) dimana materi pembinaan berasal dari pembina, atau paket pembinaan bagi narapidana sudah tersedia dari atas. Narapidana tidak ikut menentukan jenis pembinaan yang akan dijalankannya, tetapi langsung saja menerima pembinaan dari para pembina (Harsono,1995: 344). Sering pula

relawan menyusun materi, metode dan segala hal yang disiapkan pada tahap perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak-anak yang tentunya berasal dari diri anak, yaitu sesuai dengan rekomendasi pendampingan sebelumnya, dalam hal ini relawan Sahabat Kapas menerapkan pendekatan dari bawah (*Buttom up approach*). Pendekatan ini merupakan suatu cara pembinaan narapidana dengan memperhatikan kebutuhan belajar narapidana. Tidak setiap narapidana mempunyai kebutuhan belajar yang sama ataupun minat belajar yang sama. Semua sangat bergantung pada pribadi narapidana masing- masing dan fasilitas yang dimiliki oleh lembaga

pemasyarakatan/ rutan setempat. Seringkali narapidana tidak tahu apa kebutuhan belajarnya. (Harsono,1995: 344). Narapidana dalam hal ini berarti AKH, sedangkan pembina berarti pendamping atau relawan Sahabat Kapas itu sendiri.

Pada tahap pelaksanaan terdapat sesi permainan, inti, dan refleksi. Pada sesi permainan dan inti ini pengetahuan anak tentang karakter yang baik dan perasaan moral anak dibentuk melalui berbagai macam instruksi dalam setiap permainan yang ada serta dari cerita yang disampaikan oleh relawan kepada para AKH. Hal ini sesuai dengan teori karakter teori karakter yang dikemukakan Thomas Lickona tersebut dapat dijelaskan bahwa karakter mencakup tiga hal yaitu pengetahuan moral (pemikiran/otak manusia), perasaan moral (hati), dan tindakan moral (perilaku). Karakter yang baik mencakup mengetahui yang baik, menginginkan yang baik, dan melakukan kebaikan, kebiasaan pikiran, kebiasaan hati, dan kebiasaan bertindak. Ketiganya diperlukan untuk menjalani kehidupan moral, ketiganya membentuk kematangan moral. Ketika kita berfikir tentang jenis karakter yang kita inginkan untuk anak-anak, jelas bahwa kita ingin mereka dapat menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar, bahkan dalam menghadapi tekanan dari luar dan godaan dari dalam. (Thomas Lickona, 2012: 82).

Pada sesi inti itulah terjadi proses rehabilitasi yang dilakukan secara bersama sama oleh relawan Sahabat Kapas kepada anak-anak. Pada sesi ini anak-anak diajarkan tentang karakter yang baik dan perlu mereka kembangkan. Penguatan karakter secara kelompok ini sesuai dengan metode pembinaan *classical treatment* dimana narapidana dalam hal ini AKH, dapat dibina secara kelompok yang dapat

dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, simulasi, permainan peran, atau pembentukan tim. Pemilihan metode bergantung pada materi yang akan diberikan. Dalam pembinaan secara kelompok kita harus mampu mengajak narapidana untuk memahami nilai nilai positif yang tumbuh di masyarakat atau kelompok (Harsono,1995: 347).

Sedangkan pada sesi refleksi yaitu sesi dimana anak-anak diminta mengulang kembali apa yang telah mereka peroleh selama pendampingan berlangsung. Setelah itu anak-anak melakukan sesi *sharing* secara individu. Anak-anak menyampaikan keluhan kesah yang mereka alami kepada relawan Sahabat Kapas dan tak jarang pula mereka meminta nasihat. Disinilah terjadi penguatan karakter secara perorangan. Pembinaan perorangan diberikan kepada narapidana secara perorangan oleh petugas Pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah sendiri sendiri, tetapi dapat dibina dalam kelompok bersama dan penanganannya secara sendiri sendiri. Hal ini disebabkan tingkat kematangan intelektual, emosi, logika, dari tiap narapidana tidaklah sama. (Harsono,1995: 347).

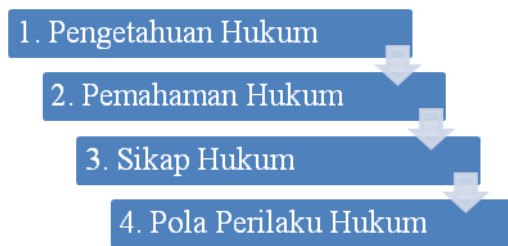
Dampak Adanya Penguatan Karakter pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Progam Rehabilitasi oleh Sahabat Kapas

Adanya penguatan karakter yang dilakukan oleh para relawan Sahabat Kapas membawa beberapa dampak terhadap anak, diantaranya: anak lebih terbuka (mau menerima nasihat), lebih percaya diri, kreatif, dan sikap anak terhadap orang lain lebih positif. Sikap positif yang ditunjukkan anak ini seperti peduli, tolong menolong, gemar beribadah maupun membaca merupakan wujud dari tindakan moral yang mereka lakukan selama di rutan. Hal ini sesuai dengan teori karakter yang

dikemukakan oleh Thomas Lickona, dimana komponen karakter meliputi pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Tindakan moral, untuk tingkatan yang besar merupakan hasil atau *outcome* dari dua bagian karakter lainnya. Apabila orang-orang memiliki kualitas moral kecerdasan dan emosi, maka mereka mungkin melakukan apa yang mereka ketahui dan mereka rasa benar. (Thomas Lickona, 2012: 86) Dampak dari adanya penguatan karakter ini merupakan wujud dari tindakan moral.

Berdasarkan penelitian, anak-anak yang sudah keluar dari rutan/penjara Wonogiri ada yang setiap sorenya mengajar TPQ di masjid dekat tempat tinggalnya, apabila kita analisis berdasarkan teori karakter Thomas Lickona, anak yang demikian berarti telah menunjukkan tindakan moral dari segi kebiasaan. Begitu pula sebaliknya, ada juga anak yang ketika keluar justru melakukan kenakalan, seperti merokok, minum minuman keras, mencuri, hingga balas dendam terhadap orang yang telah memasukkannya ke penjara. Hal ini tidak sesuai dengan tindakan moral, dari segi keinginan dan kebiasaan. Dalam pribadi dengan karakter yang baik, pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral secara umum bekerjasama untuk saling mendukung satu sama lain. Tentu saja hal itu tidaklah selalu demikian, bahkan orang baik tidak kecuali sering gagal dalam melakukan perbuatan moral mereka yang terbaik. (Thomas Lickona, 2012: 86).

Beberapa dampak yang telah muncul tersebut, apabila kita analisis dengan beberapa indikator terkait kesadaran hukum maka belum sepenuhnya mereka sadar akan hukum. Seperti yang telah diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (1982:159) bahwa terdapat empat indikator kesadaran hukum yang keempatnya itu berupa tahapan, diantaranya:



Berdasarkan gambar terkait indikator kesadaran hukum, maka analisis mengenai kesadaran hukum yang ditunjukkan oleh para AKH yang diperoleh selama penelitian dapat dikatakan baru sampai pada tahap pertama, yaitu pengetahuan hukum. Para AKH telah mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan hukum dan akhirnya membuat mereka harus menjalani hukuman di penjara. Pada saat para AKH masih berada di rutan, mereka mau menunjukkan sikap positif mereka seperti yang telah dijelaskan diatas, akan tetapi pada saat keluar dari rutan, justru banyak dari mereka yang melakukan kenakalan lagi, bahkan ada pula yang residivis (kembali melakukan kejahatan yang sama kemudian masuk penjara lagi). Itu artinya mereka belum bisa memahami hukum secara penuh sehingga sikap serta pola perilaku mereka terhadap hukum belumlah positif. Apabila kita kaitkan dengan tahapan perkembangan moral (Kohlberg) yang mencakup tahap pra-konvensional, konvensional, dan pasca konvensional, maka dampak dari penguatan karakter yang dilakukan oleh Sahabat Kapas terhadap para AKH baru sampai pada tahap pra-konvensional, dimana para AKH dalam menjalankan peraturan semata-mata hanya untuk menghindari hukuman (agar tidak dihukum), hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa selama di rutan para AKH telah menunjukkan karakter positif mereka supaya mereka segera mendapat remisi, dan bebas dari rutan, akan tetapi setelah keluar dari rutan dan kembali ke masyarakat mereka justru melakukan kenakalan lagi. Hal tersebut

sesuai dengan teori perkembangan moral yang diungkapkan Kohlberg pada tahap pra-konvensional, dimana seorang individu menggambarkan penilaian moral berdasarkan konsekuensi fisik yang mempengaruhi diri, seperti penghindaran hukuman atau mengejar imbalan. (Kohlberg dalam Feryal Cubukcu, 2015).

Kendala yang Dialami dalam Proses Penguatan Karakter terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) melalui Program Rehabilitasi oleh Sahabat Kapas

Kendala yang dihadapi dalam upaya penguatan karakter kepada para AKH terbagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal dan internal. Kendala eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar Sahabat Kapas, sedangkan kendala internal merupakan kendala yang berasal dari Sahabat Kapas, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. Kendala eksternal

1) Pemulihan anak

Kendala ini berupa kondisi yang jauh dari keluarga dan kurangnya teman yang dipercaya untuk *sharing*. Anak yang berada di penjara tentu jauh dari keluarganya, sehingga membuat anak stress dan yang diinginkan hanyalah pulang, bahkan ada juga yang melakukan kenakalan. Selain itu anak-anak yang di rutan kurang mendapat tempat ternyamanannya dalam mengungkapkan keluh kesah mereka. di rutan belum tentu ada orang yang bisa mereka percaya sebagai tempat *sharing*. Akibatnya proses pemulihan anak ataupun penanaman karakter pada mereka mengalami kesulitan. Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang. Ikatan sosial itu lalu diterjemahkan menjadi empat

elemen, yaitu *attachment, commitment, involvement, dan beliefs*. (Abintoro Prakoso, 2013: 43). Ikatan social disini bisa dimaknai masyarakat, keluarga, maupun teman-temannya.

Kendala dari pemulihan anak ini juga dikarenakan kondisi psikologis anak masih belum stabil, sehingga dimungkinkan bagi anak untuk tetap berbuat menyimpang. Selama di penjara mungkin anak telah menunjukkan sikap positif mereka. Tetapi setelah keluar nanti belum tentu demikian. Hal ini dikarenakan anak menunjukkan sikap positif tersebut hanya untuk menghindari hukuman selama di penjara. Hal ini sesuai dengan tahap perkembangan moral anak yang dikemukakan oleh Kohlberg pada fase pra-konvensional. *Kohlberg's framework consists of six stages moral reasoning, grouped into three developmental levels: pre-conventional, conventional, and post-conventional* (Kohlberg dalam Feryal Cubukcu, 2015). Tahap pra konvensional ini merupakan tahap 1 dan 2, dimana seorang individu menggambarkan penilaian moral berdasarkan konsekuensi fisik yang mempengaruhi diri, seperti penghindaran hukuman atau mengejar imbalan.

2) Stigma Masyarakat

Stigma masyarakat merupakan budaya yang sampai saat ini masih masyarakat anut. Banyak dari mereka yang menganggap bahwa anak yang dipenjara itu merupakan “anak nakal”, anak yang suka mengambil barang milik orang lain disebut “pencuri”. Label “nakal” maupun “pencuri” tersebut membuat anak menjadi minder dan tidak nyaman dengan dunia luar, sehingga tidak jarang anak yang setelah keluar penjara justru semakin berbuat

menyimpang. Hal ini sesuai dengan teori *labelling*, dimana hubungan-hubungan dalam masyarakat terjadi karena arti yang mereka berikan, sehingga penyimpangan itu terjadi dikarenakan adanya pelabelan dari pihak lain terhadap orang yang melakukan penyimpangan dan penyimpangan itu sendiri. (Abintoro Prakoso, 2013: 45)

b. Kendala internal

Merupakan kendala yang terjadi di dalam Yayasan Sahabat Kapas itu sendiri diantaranya struktur organisasi (kurangnya SDM) serta kendala dalam SOP (*Standart Operational Procedure*). Mengenai SOP pendampingan, disini Sahabat Kapas masih kurang dalam hal *follow up* anak. *Follow up* disini diartikan dengan kelanjutan rehabilitasi yang dilakukan oleh Sahabat Kapas. Anak-anak hanya mendapatkan rehabilitasi melalui pendampingan hanyalah dua jam dalam dua minggu. Kemudian apabila anak tersebut masuk dalam narapidana dewasa, maka mereka tidak lagi mendapatkan rehabilitasi dari Sahabat Kapas, terlebih lagi apabila anak-anak sudah keluar tidak sedikit dari mereka yang tidak dapat dihubungi. Padahal penguatan karakter seharusnya dilakukan secara terus menerus. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sarini, dimana penguatan (*reinforcement*) yaitu proses penguatan dan penerimaan sesuatu nilai budaya yang secara terus menerus dalam masyarakat karena dianggap baik. (Sartini, 2004: 119). Kurangnya *follow up* anak tersebut membuat Sahabat Kapas kesulitan dalam menghadapi fase krisis anak, terutama pada fase reintegrasi atau fase setelah anak keluar dari penjara.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

1. Pentingnya dilakukan penguatan karakter bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (AKH) dikarenakan anak membutuhkan pemulihan secara psikologis melihat masih banyak anak yang belum bisa menunjukkan perilaku yang baik meskipun sudah berada di dalam penjara.
2. Upaya penguatan karakter dilakukan dengan pendampingan secara psikososial (anak diberi kesempatan untuk menyampaikan keluhan kesah yang dialaminya), pendampingan psikologis (penanaman nilai-nilai agar anak bisa bereintegrasi dengan masyarakat saat keluar nanti), dan pendampingan keterampilan bernilai ekonomis (pembuatan kerajinan tangan dan karya-karya lainnya).
3. Dampak dari adanya penguatan karakter melalui program rehabilitasi dengan pendampingan, anak menjadi lebih terbuka, percaya diri, kreatif dan mengetahui potensinya, serta sikap terhadap orang lain lebih positif, akan tetapi kesadaran hukum AKH setelah keluar dari rutan cenderung masih rendah.
4. Kendala yang dialami dalam upaya penguatan karakter meliputi kendala internal (minimnya SDM dan SOP Pendampingan yang belum optimal) dan kendala eksternal (pemulihan anak dan stigma masyarakat).

SARAN

1. Bagi relawan Sahabat Kapas sebaiknya menggalakkan promosi diri agar masyarakat luas lebih mengenal dan ikut berpartisipasi baik sebagai relawan maupun donatur guna meningkatkan kuantitas SDM serta keuangan Sahabat Kapas.
2. Bagi para AKH sebaiknya mengikuti kelanjutan rehabilitasi (*follow up*) untuk tetap mendapatkan pendampingan dari Sahabat Kapas ketika sudah keluar

dari rutan, agar penguatan karakter yang diberikan bisa dilakukan secara terus menerus.

3. Bagi masyarakat sebaiknya tidak melabelkan kata-kata negatif kepada AKH agar proses reintegrasi anak saat terjun di masyarakat berhasil menjadi pribadi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Derek Heater.(2004). *A Brief History of Citizenship*.New York: New York University.
- Harsono. (1995). *Sistem Baru PembinaanNarapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Lickona, Thomas. (2012). *Educating for Character (Mendidik untuk Membentuk Karakter)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles and Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sartini. (2004). *Mengali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati*. Yogyakarta: UGM
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Widiyanti, Ninik dan Panji. (1987). *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Winarno. (2009). *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung: Alfabeta.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Data terkait jumlah narapidana anak yang termuat dalam web dengan alamat:<http://smslap.ditjenpas.go.id/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul : 17.00 WIB.
- Feryal Cubukcu. (2014). *Values Education Through Literature in English Classes*. Jurnal Internasional, Vol.116. Hlm.265-269. Termuat dalam: www.sciencedirect.com yang diakses pada 5 April 2018 pukul: 10.40 WIB.
- Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM FULL DAY SCHOOL TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK

Rendi Setiya Kurniawan*, Triana Rejekiningsih, Moh. Muchtarom

Prodi PPKn, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

*Email: rendisetiyakurniawan13@gmail.com

Abstract. *This research aims to identify: (1) The implementation of full day school program against students' character building in SMA Negeri 2 Karanganyar. (2) The evaluation of full day school program against students' character building in SMA Negeri 2 Karanganyar. (3) Obstacles and solutions in implementing full day school program against students' character building in SMA Negeri 2 Karanganyar. Descriptive method and qualitative approach are used in this research. Samples are taken by using purposive sampling method. Data are collected by doing interviews, observations, and document analysis. To gain data validity, this research uses data. Data are analyzed using interactive data analysis by following these steps: (1) Data collecting, (2) Data reduction, (3) Data presentation, and (4) Conclusion drawing or verification. Results show that: (1) The implementation of a full day school program towards the formation of Students' character in SMA Negeri 2 Karanganyar is built through habituation, exemplary, and discipline training. (2) The evaluation of the CIPP (Context, Input, Process, Product) model in terms of context is good, because of the indicators of needs that have not been achieved the objectives to be achieved are in accordance with what is expected, namely to shape the character of learners, then environmental conditions are also very supportive and conducive. In terms of input shows that for existing resources good enough it is known from existing facilities and infrastructure, the ability of the subject to support the program and strategy to achieve the program can be done well. In terms of the process to determine the extent to which the activities carried out in the program indicate that the indicators of program activities, ability to handle, utilization of facilities and infrastructure, and obstacles encountered by the school can do as expected. In terms of the product is the final evaluation that shows the results of the program carried out from the indicators of things done after the program runs can be done well, the impact obtained from the program can shape the character of students, and program excellence can shape the character of students (3) Obstacles that are met in this research are the following: First, students' basic character. Second, resources. Third, students' physical condition. Fourth, additional tasks from teachers. Solutions that come from this research are: always implementing the 5S policy [Senyum (smile), Sapa (greet), Salam (bow), Sopan (be polite), Santun (be kind)] and all assignments of teachers and students must be completed in school and live sincerely by referring to existing regulations.*

Keywords: *program evaluation, CIPP model, character building*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada era globalisasi merupakan sesuatu yang penting untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul serta kompeten yang dibutuhkan dalam bidangnya, maka dengan adanya hal tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang maju dan dapat bersaing dalam menjawab tantangan global. Melihat hal tersebut pemerintah mendapat amanah dari konstitusi negara dalam Bab XIII Pasal 31 ayat (3) bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang”. Dengan demikian pemerintah dituntut agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan terus menerus memberikan pelayanan yang berkualitas dan mudah diakses oleh semua warga negara yang nantinya berguna untuk kemajuan dari warga negara itu sendiri.

Dalam meningkatkan standar kualitas pendidikan diperlukan perubahan dan perbaikan yang dapat dilakukan, antara lain memperbaiki poses pembelajaran, penyempurnaan bidang kurikulum, metode dan sistem pembelajaran, melakukan evaluasi dalam memberikan bimbingan pada peserta didik yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam belajar. Maka dengan demikian adanya perbaikan pendidikan akan membuat peserta didik lebih giat dan semangat dalam

belajar, yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil pendidikan yang diperolehnya.

Di Indonesia program *full day school* merupakan salah satu pilihan alternatif yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan dan memperbaiki pendidikan. Adanya pelaksanaan *full day school* tidak terlepas dari kelebihan serta kekurangan, karena tujuannya menciptakan generasi-generasi bangsa yang memiliki karakter.

Menurut Peraturan Presiden Bab II pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam satu minggu”. Aturan mengenai *full day school* terdapat dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

Adanya pelaksanaan program *full day school* menjanjikan banyak hal diantaranya: *Pertama*, peserta didik memiliki waktu belajar lebih lama. *Kedua*, materi dapat ditambah oleh guru menjadi lebih padat dan waktu dapat diatur agar lebih kondusif. *Ketiga*, banyak dari orang tua peserta didik yang sibuk dengan pekerjaannya dan baru pulang pada saat menjelang maghrib maka adanya hal tersebut para orang tua peserta didik menjadi tahu apa yang dilakukan anaknya karena sebagian waktu dihabiskan di sekolah dan kegiatan yang mereka lakukan diawasi oleh guru. Waktu yang ada dalam pelaksanaan *full day school* juga digunakan untuk waktu-waktu informal, jadi lamanya waktu belajar tidak menjadi beban bagi peserta didik. Pengaruh positif

dengan dilaksanakan *full day school* dapat memberikan kesempatan peserta didik belajar lebih lama dari pada bermain dimana banyak hal yang dapat memberikan efek baik bagi peserta didik sendiri, guru lebih dekat dengan peserta didik, dan peserta didik dapat menunjukkan sikap positif, serta dengan banyaknya waktu di kelas dan dalam pengawasan guru peserta didik dapat terhindar dari perilaku yang menyimpang. (Robbi Depor, 2010).

Tujuan program *full day school* adalah untuk membina akhlak dan membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik. Dalam pelaksanaan *full day school* perilaku-perilaku yang baik harus dapat menjadi kebiasaan bagi peserta didik sehingga dalam kehidupan sehari-hari peserta didik memiliki akhlak yang baik, maka dengan hal tersebut karakter peserta didik dapat terbentuk (Siti Mujayanah, 2016: 3).

Adanya *full day school* dapat memberi alternatif pada saat ini karena masih sedikit sekolah yang melaksanakan program tersebut. Hal ini dikarenakan program *full day school* merupakan program baru bagi beberapa sekolah. Dengan menerapkan program *full day school* di setiap sekolah yang ada, maka program tersebut dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam memperbaiki kualitas pendidikan di masing-masing sekolah. Dimana SMA Negeri 2 Karanganyar sebagai sekolah yang sudah melaksanakan program tersebut.

Dalam pelaksanaannya sekolah ini berbeda dengan sekolah pada umumnya. Dimana terdapat perpanjangan jam di sekolah, hal

tersebut digunakan untuk mengembangkan kemampuan serta kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa fakta di lapangan dengan penambahan waktu yang diberikan dalam penambahan waktu jam pelajaran mengakibatkan banyak peserta didik yang merasa lelah dan bosan karena banyak materi pelajaran yang didapatkan karena belajar seharian penuh di sekolah, sehingga motivasi untuk belajar kurang, hal ini disebabkan karena gaya mengajar yang dilakukan oleh guru cenderung monoton atau kurang variasi dalam melakukan pembelajaran, serta sarana dan prasarana belum digunakan secara maksimal. Banyaknya waktu yang dihabiskan disekolah mengakibatkan kurangnya waktu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, sehingga interaksi dengan lingkungan sekitar tempat tinggal menjadi berkurang. Maka dalam pelaksanaan *full day school* perlu dilakukan evaluasi baik dari kesiapan fisik, psikologis, dan intelektual.

Menurut Arikunto dan Jabar (2004: 7) menjelaskan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh program berjalan, sehingga tujuan program dapat dicapai. Evaluasi program perlu dilakukan untuk mencapai keterlaksanaan dari tujuan tertentu dalam hal ini bidang pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengambil lokasi di SMA Negeri 2 Karanganyar, sekoah ini belum pernah dievaluasi sejak pelaksanaannya sampai sekarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis tulis diatas maka pada pelaksanaanya program memerlukan evaluasi agar tercapai tujuan dari pendidikan dan hasil evaluasi program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik tersebut dapat direkomendasi apakah *full day school* perlu dilanjutkan dengan beberapa penyempurnaan atau dihentikan dengan alasan-alasan tertentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada SMA Negeri 2 Karanganyar yang berlokasi di Jalan Ronggowarsito, Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif, metode ini digunakan karena dalam penelitian ini akan memaparkan objek yang akan diteliti baik berupa orang, lembaga, aktifitas orang atau yang lainnya berdasarkan dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyajian data deskriptif yaitu dengan wawancara dengan informan, observasi lapangan, maupun studi dokumen yang digunakan untuk mendukung penelitian evaluasi pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik (Studi pada SMA Negeri 2 Karanganyar).

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004: 157) bahwa dalam penelitian kualitatif sumber data berupa kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dimana data tersebut berasal dari

informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen.

Teknik pengambilan sampel dilakukan untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2010: 124) bahwa teknik *purposive sampling* merupakan merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan yang tepat dan dipercaya sebagai sumber data yang akurat. Dimana dalam peneitian ini peneliti mengambil sampel dengan memilih kepala sekolah, guru, peserta didik dan orang tua peserta didik.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Karanganyar, Wakasek Kurikulum SMA Negeri 2 Karanganyar, Guru PPKn, peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar, dan orang tua peserta didik. Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati kegiatan yang terjadi di sekolah dalam pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar.

Uji validitas menggunakan trianggulasi data. Hal ini dikarenakan cara tersebut untuk mengarahkan peneliti agar dalam pengumpulan data harus menggunakan beragam data yang tersedia. Dalam hal ini, dengan adanya data yang sama atau sejenis akan lebih valid jika diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Kemudian memadukan

hasil observasi dan analisis dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program *Full Day School* terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMA Negeri 2 Karanganyar

Pelaksanaan program *full day school* di SMA Negeri 2 Karanganyar dilakukan melalui tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Berikut dibawah ini merupakan penjelasan dari setiap tahap yang ada, sebagai berikut:

No	Tahap	Keterangan
1.	Persiapan	Menyiapkan segala sumber daya yang digunakan. Penyampaian informasi program. Berpedoman pada peraturan yang berlaku.
2.	Pelaksanaan	Melaksanakan segala kegiatan yang sudah ditentukan sebelumnya.
3.	Evaluasi	Dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan untuk mendapatkan informasi dalam pelaksanaan program dalam jangka waktu tertentu, sehingga dapat diketahui apa saja hal-hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program agar nantinya program dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari program tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Dalam pelaksanaan program *full day school* di SMA Negeri 2 Karanganyar memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk membentuk karakter peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan visi sekolah yaitu bertakwa, cerdas, dan berakhlak. Pembentukan karakter dalam pelaksanaan program *full day school* perlu adanya penerapan atau pembiasaan kepada hal-hal yang dapat membentuk karakter.

Menurut Mulyasa (2012:165-189) bahwa penanaman karakter dapat dilakukan melalui cara, sebagai berikut :

- Pembiasaan.
- Keteladanan.

- Pembinaan disiplin.
- CTL (*contextual teacher learning*).
- Bermain peran.
- Pembelajaran inspiratif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa pembentukan karakter yang dilakukan di SMA Negeri 2 Karanganyar berdasarkan Mulyasa (2012: 165-189) dilakukan dengan cara: melalui pembiasaan, melalui keteladanan, dan melalui pembinaan disiplin.

Pertama, melalui cara pembiasaan berdasarkan hasil penelitian dengan dilakukannya

pembiasaan dalam pelaksanaan program *full day school* dapat membentuk karakter peserta didik. Kegiatan pembiasaan yang dilakukan di SMA Negeri 2 Karanganyar merupakan kegiatan keagamaan, dimana hal tersebut dilakukan secara rutin, sehingga dengan adanya pembiasaan karakter peserta didik dapat membentuk perilaku yang baik. Kegiatan keagamaan yang dilakukan di SMA Negeri 2 Karanganyar ialah bagi peserta didik muslim kegiatan pembiasaan melakukan sholat dzuhur dan ashar berjamaah, tadarus alquran, pengajian bersama, tilawah. Sedangkan untuk peserta didik non muslim melakukan kegiatan berdoa bersama yang dipimpin oleh guru dari sekolah. Dengan adanya kegiatan keagamaan ini diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik. Dengan mengikuti kegiatan tersebut peserta didik lebih dapat terlihat lebih religius dan disiplin. Hal tersebut sesuai dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa setiap masuk waktu sholat dzuhur dan ashar berjamaah peserta didik datang tepat waktu ke masjid hal ini menjadi terbentuk karakter disiplin yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu juga ada peserta didik yang melakukan tadarus Al Quran, dilakukannya pengajian bersama. Dengan adanya kegiatan tersebut membuat peserta didik lebih religius. Untuk kegiatan pembiasaan yang lain berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya pembiasaan dimana

peserta didik harus melakukan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) hal tersebut tercermin dari setiap peserta didik apabila bertemu dengan guru, karyawan, pedagang, peserta didik lain dalam lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa kegiatan dalam pembelajaran juga dapat membentuk karakter peserta didik, dimana guru mengajarkan apabila terdapat peserta didik yang mengalami masalah sesama peserta didik harus saling membantu, guru juga membagi peserta didik menjadi kelompokkelompok sehingga nantinya nilai kebersamaan dapat terbentuk. Kebiasaan lain yang dilakukan seperti: mengumpulkan tugas tepat waktu, memberi salam, membuang sampah pada tempatnya.

Kedua, melalui cara keteladanan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa cara keteladanan ini dilakukan oleh guru. Guru sebagai contoh bagi peserta didik dalam berperilaku. Dimana guru yang baik akan dihormati dan disukai peserta didik. Segala tindakan dan tutur kata guru dapat memberi pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Dari hasil penelitian apabila sudah masuk waktu sholat berjamaah guru langsung ke masjid, dengan adanya tindakan tersebut juga memberikan contoh yang baik pada peserta didik sehingga peserta didik lebih terdorong dalam melakukan kegiatan. Hal tersebut karena segala yang dilakukan guru dapat memberi

pengaruh bagi peserta didik itu sendiri baik dari cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, maupun cara berperilaku yang dilakukan oleh guru. Karena guru disini harus menjadi panutan peserta didik agar menjadi lebih baik. Dengan demikian keteladanan yang diberikan oleh guru dapat berpengaruh baik pada peserta didik.

Ketiga, melalui kegiatan pembinaan disiplin. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pembinaan disiplin yang dilakukan sekolah dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi sekolah yang diikuti oleh peserta didik. Contoh melalui kegiatan pramuka dapat membentuk karakter peserta didik yang disiplin, tanggung jawab, toleransi, saling menghargai dan menghormati, serta menjadikan peserta didik lebih percaya diri. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi yang diikuti peserta didik diharapkan dapat menjadikan peserta didik lebih baik dalam berperilaku. Pembinaan disiplin dilakukan semata-mata untuk kemanfaatan bagi peserta didik itu sendiri, maka dari itu peserta didik bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi yang diikuti peserta didik sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan, sehingga nantinya tujuan dari pelaksanaan program full day school dapat tercapai dengan baik yaitu dapat membentuk karakter peserta didik yang baik sehingga dapat menjadikan perilaku peserta didik menjadi baik.

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar dalam pembentukan karakter dilakukan melalui tiga cara yaitu: melalui cara pembiasaan, melalui cara keteladanan, dan melalui cara pembinaan disiplin.

2. Evaluasi Program Full Day School terhadap Pembentukan Karakter Dengan Model CIPP

Berdasarkan hasil penelitian berikut dibawah ini merupakan pembahasan mengenai evaluasi program dilihat dari aspek *context*, aspek *input* aspek *proses*, dan aspek *product*.

a. Dari aspek context

Dilihat dari evaluasi *context* yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian mengenai pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar, sudah terlihat baik. Dari sisi konteks, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari kebutuhan yang belum terpenuhi dimana dengan dilaksanakan program *full day school* dapat membentuk karakter peserta didik serta para orangtua peserta didik

menjadi tidak khawatir dengan perilaku yang dilakukan oleh anaknya karena semua kegiatan dilakukan di sekolah, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini untuk membentuk karakter peserta didik dapat terwujud dan sesuai dengan visi sekolah yaitu berkarakter. Kondisi lingkungan di sekitar sekolah juga sangat kondusif, hal ini dikarenakan sekolah terletak di dekat persawahan dan jalan kecil yang bukan merupakan jalan utama.

b. Dari aspek *input*

Diketahui dari evaluasi *input*, berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat diketahui bahwa dalam evaluasi input cukup baik. Hasil analisis dari sisi *input* menunjukkan dari sumber yang ada, kemampuan subjek dalam menunjang program, dan strategi untuk mencapai tujuan program sesuai dengan yang diharapkan. Sumber daya yang ada meliputi sumber daya manusia, sumber finansial, sarana dan prasarana. Untuk sumber daya manusia yang dimiliki sekolah sudah baik dimana untuk menjadi guru harus berpendidikan minimal Strata Satu (Strata Satu) dan untuk menjadi pegawai tata usaha minimal berpendidikan Diploma (D3). Untuk sumber finansial yang ada di sekolah ini diperoleh dari iuran bulanan yang dilakukan peserta didik setiap bulan dan juga terdapat bantuan sponsor dimana terdapat beasiswa. Sumber

daya sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini masih terbatas karena sekolah dalam tahap perbaikan kualitas dari sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar segala sumber daya yang ada dapat mendukung untuk tercapainya tujuan dari program *full day school* di SMA Negeri 2 Karanganyar. Kemampuan subjek dalam menunjang program dan strategi untuk mencapai program sudah dapat dilakukan dengan baik, hal tersebut diketahui dengan adanya masalah maupun hambatan yang ada dapat diselesaikan dengan baik.

c. Dari aspek *proses*

Dilihat dari evaluasi *proses*, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diketahui dari kegiatan program yang telah dilakukan dengan baik, kemudian kemampuan penanganan apabila terdapat peserta didik yang mengalami masalah. Untuk pemanfaatan sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Karanganyar sudah digunakan secara maksimal dimana setiap terdapat kegiatan sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan baik. Dan pihak sekolah selalu berusaha memperbaiki kekurangan fasilitas yang ada. Mengenai hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program *full day school* ini

mengenai karakter dasar anak, kemudian masih ada tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan guru pada peserta didik, serta kondisi fisik peserta didik yang mudah lelah.

d. Dilihat dari *product*

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sisi *product* pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar telah sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hal yang dilakukan setelah program berjalan. Dimana pihak sekolah selalu berusaha memperbaiki segala kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga tujuan dapat tercapai. Kemudian untuk dampak yang diperoleh dari kegiatan program menjadi peserta didik lebih disiplin waktu karena terdapat sholat berjamaah bersama, mandiri, wawasan bertambah karena banyaknya materi pelajaran yang didapat. Hal tersebut dikarenakan peserta didik mengikuti segala kegiatan yang ada di sekolah sehingga dapat membantu dalam pembentukan karakter peserta didik itu sendiri. Keunggulan program *full day school* merupakan program yang digunakan untuk membentuk karakter peserta didik. Dimana di SMA Negeri 2 Karanganyar ini kegiatan keagamaan diberikan waktu khusus baik bagi peserta didik

muslim maupun peserta didik non muslim. Dengan mengikuti kegiatan yang ada di sekolah menjadi orang tua peserta didik menjadi lebih tenang akan perilaku anaknya karena segala kegiatan dilakukan di sekolah dapat diawasi dengan baik. Selain itu juga dengan dilaksanakannya program *full day school* di SMA Negeri 2 Karanganyar dapat menambah nilai moral yang dimiliki peserta didik, hal ini karena dengan mengikuti kegiatan yang ada dapat memberikan dampak bagi pembentukan karakter peserta didik itu sendiri, sehingga nilai moral yang dimiliki peserta didik menjadi lebih baik.

3. Hambatan-Hambatan yang ditemukan dalam Pelaksanaan Program *Full Day School* terhadap Pembentukan Karakter Peserta Didik di SMA Negeri 2 Karanganyar

Dalam pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar tidak pernah lepas dari yang namanya hambatan. Munculnya hambatan tersebut bermacam-macam. Tetapi dengan adanya hambatan tersebut tidak mempengaruhi sekolah untuk melaksanakan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik. Berikut adalah hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program *full day school* terhadap

pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar, antara lain:

a. Masalah Karakter Dasar Anak

Karakter merupakan salah satu watak atau ciri khas yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, dimana setiap orang memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Menurut Majid dan Andayani (2013: 12) karakter adalah “watak, sifat, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Hal-hal yang sangat abstrak yang ada pada diri seseorang.” Maka setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan paling berat karakter dasar anak, harus terus menerus membimbing anak, dan semua guru harus saling bekerjasama dalam pembentukan karakter peserta didik.

Karakter dasar anak merupakan salah satu hal yang terpenting dalam pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik. Dengan adanya masalah karakter dasar ini maka dalam hal ini guru memiliki kewajiban untuk mendidik anak menjadi lebih baik. Masih ada ditemukan peserta didik yang tidak dapat disiplin waktu, kurang tanggungjawab. Contohnya masih ada peserta didik apabila sudah memasuki waktu sholat tidak langsung bergegas menuju masjid dan kurangnya kesadaran dari anak tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian bahwa masih ada anak yang mental atau kesadaran agama kurang seperti pada saat masuk waktu sholat berjamaah harus disuruh dahulu, dan masih ada anak yang terlambat.

b. Masalah Sumber Daya

Sumber daya menjadi hambatan yang ada di sekolah ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya yang dimiliki sekolah dalam hal ini masalah sarana dan prasarana masih ada kekurangan dan dalam perbaikan sehingga kurang maksimal. Dimana untuk kondisi sarana dan prasarana sekolah selalu berupaya memfasilitasi sarana dan prasarana yang ada dan selalu diusahakan walaupun masih kurang.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung maka pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik hal tersebut merupakan salah satu sumber daya penting agar dalam pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih ada kamar mandi yang rusak, kursi peserta didik, dan kurang berfungsinya lcd proyektor yang terdapat di ruang kelas.

c. Kondisi Fisik Peserta Didik

Dalam pelaksanaan program *full day school*

memakan waktu dari pagi hingga sore hari dimana dimulai dari pukul 07.00 sampai 15.00. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan adanya hal tersebut membuat kondisi fisik peserta didik menjadi berat sehingga gampang kelelahan. Dimana juga terdapat tambahan jam pelajaran yang dipadatkan. Dengan kondisi fisik peserta didik yang berat, karena waktu panjang menambah beban anak karena ada anak yang jauh rumahnya dapat menghambat dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di sekolah. Adanya tambahan waktu membuat kondisi fisik peserta didik menjadi lelah.

- d. Masih Ada Tugas dari Guru
- Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa masih ada mata pelajaran yang memberikan tugas atau pekerjaan rumah bagi peserta didik. Hal tersebut masih dilakukan karena terbatasnya waktu dan masih adanya materi yang belum disampaikan seluruhnya oleh guru, sehingga guru memberikan tugas kepada peserta didik.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan berdasarkan data di atas bahwa dalam pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar memiliki empat hambatan yaitu: hambatan mengenai masalah karakter

dasar anak, masalah sumber daya sarana prasarana, masalah kondisi fisik anak, dan masih adanya tugas yang diberikan oleh guru.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berikut ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, antara lain:

1. Pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar dilaksanakan melalui tiga tahap yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dimana dalam penanaman pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar melalui tiga (3) cara yaitu: melalui cara pembiasaan, melalui keteladanan, dan melalui pembinaan disiplin. Dengan cara yang dilakukan tersebut efektif dalam pembentukan karakter peserta didik di sekolah.
2. Hasil Evaluasi pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik dengan model *CIPP* menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - a. Dari segi *context*, hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter

peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan yang belum terpenuhi yaitu ingin membentuk karakter peserta didik dan tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini untuk membentuk karakter peserta didik dapat terwujud dan sesuai dengan visi sekolah yaitu berkarakter. Selain itu kondisi lingkungan sekitar juga mendukung dan kondusif dalam pelaksanaan program *full day school* karena terletak jauh dari jalan utama dan nyaman karena terletak di sebelah persawahan.

- b. Dari segi *input*, hasil analisis menunjukkan input yang meliputi sumber-sumber yang ada, kemampuan subjek dalam menunjang program, dan strategi untuk mencapai program sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sumber-sumber yang ada terdiri dari sumber daya manusia, sumber finansial, dan sumber sarana dan prasarana. Untuk sumber daya manusia terdiri dari guru yang memiliki minimal Strata satu (S1) dan karyawan tata usaha yang berpendidikan minimal Diploma (D3). Kemudian untuk sumber finansial

diperoleh dari iuran bulanan dari orang tua peserta didik. Untuk sarana dan prasarana masih memiliki kekurangan karena sekolah sedang berusaha memperbaiki kondisi yang ada agar dapat digunakan secara maksimal. Kemampuan subjek dalam menunjang program dan strategi untuk mencapai program sudah sesuai dengan yang diinginkan.

- c. Dari segi *process*, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik sudah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diketahui dari kegiatan program yang telah dilakukan dengan baik, kemudian kemampuan penanganan apabila terdapat peserta didik yang mengalami masalah. Untuk pemanfaatan sarana dan prasarana di SMA Negeri 2 Karanganyar sudah digunakan secara maksimal dimana setiap terdapat kegiatan sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan baik. Dan pihak sekolah selalu berusaha memperbaiki kekurangan fasilitas yang ada. Mengenai hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan program *full*

day school ini mengenai karakter dasar anak, kemudian masih ada tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan guru pada peserta didik, serta kondisi fisik peserta didik yang mudah lelah.

- d. Dari segi *product*, hasil analisis menunjukkan bahwa dari segi produk pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar telah sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hal yang dilakukan setelah program berjalan. Dimana pihak sekolah selalu berusaha memperbaiki segala kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga tujuan dapat tercapai. Kemudian untuk dampak yang diperoleh dari kegiatan program menjadi peserta didik lebih disiplin waktu karena terdapat sholat berjamaah bersama, mandiri, wawasan bertambah karena banyaknya materi pelajaran yang didapat. Hal tersebut dikarenakan peserta didik mengikuti segala kegiatan yang ada di sekolah sehingga dapat membantu dalam pembentukan

karakter peserta didik itu sendiri. Keunggulan program *full day school* merupakan program yang digunakan untuk membentuk karakter peserta didik. Dimana di SMA Negeri 2 Karanganyar ini kegiatan keagamaan diberikan waktu khusus baik bagi peserta didik muslim maupun peserta didik non muslim. Dengan mengikuti kegiatan yang ada di sekolah menjadi orang tua peserta didik menjadi lebih tenang akan perilaku anaknya karena segala kegiatan dilakukan di sekolah dapat diawasi dengan baik. Selain itu juga dengan dilaksanakannya program *full day school* di SMA Negeri 2 Karanganyar dapat menambah nilai moral yang dimiliki peserta didik, hal ini karena dengan mengikuti kegiatan yang ada dapat memberikan dampak bagi pembentukan karakter peserta didik itu sendiri, sehingga nilai moral yang dimiliki peserta didik menjadi lebih baik.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi program model *CIPP* secara keseluruhan pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik sudah sesuai dengan yang diharapkan.

Dimana dengan pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar sudah efektif dilakukan dalam pembentukan karakter peserta didik.

3. Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar terdapat empat (4) hambatan, antara lain :
Pertama, masalah karakter dasar yang dimiliki peserta didik. *Kedua*, sumber daya yang ada terutama sarana dan prasarana. *Ketiga*, kondisi fisik peserta didik yang mudah lelah . *Keempat*, masih ada tugas atau pekerjaan rumah yang diberikan guru pada peserta didik. Solusi yang ada dalam pelaksanaan program *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik adalah *Pertama*, selalu menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun). *Kedua*, semua tugas guru dan peserta didik harus dapat diselesaikan di sekolah, dan *Ketiga*, menjalankan dengan ikhlas serta berpedoman pada aturan yang ada.

B. SARAN

1. Bagi Sekolah

- a. Sekolah perlu membuat aturan khusus untuk mengatur pelaksanaan program *full day school* di SMA Negeri 2

Karanganyar dan berupaya membenahi serta menyempurnakan pelaksanaan program agar menjadi lebih baik.

- b. Berpedoman pada peraturan yang telah ada yaitu pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

- c. Sekolah perlu membentuk struktur organisasi pengurus dalam pelaksanaan program *full day school* di SMA Negeri 2 Karanganyar.

- d. Perlu upaya peningkatan sosialisai mengenai program *full day school* kepada orang tua peserta didik, sehingga orang tua peserta didik menjadi lebih paham mengenai program tersebut.

2. Bagi Guru

- a. Lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan *full day school* terhadap pembentukan karakter peserta didik di sekolah.

- b. Guru harus belajar dalam memahami karakter yang dimiliki peserta didik satu dengan yang lain.

3. Bagi Peserta Didik

- a. Perlunya peserta didik menyesuaikan dengan berbagai kegiatan yang ada dan selalu mematuhi aturan dalam pelaksanaan *full day school* terhadap

pembentukan karakter peserta didik di SMA Negeri 2 Karanganyar.

- b. Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. dan Jabar. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Deporter, Robbi. (2010). *Quantum Teaching (Mempraktekan Quantum Teaching Learning di Kelas-Kelas)*. Bandung: Kaifa.
- Lexy J. Moleong. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2012). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siti Mujayanah. (2016). *Sistem Full Day School Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas IV SD Muhammadiyah Pakel Yogyakarta*. Diperoleh 10 Maret 2018, dari http://digilib.uinsuka.ac.id/21441/2/1420411034_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAKSA MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Ismawati*, Rima Vien Permata Hartanto, Triana Rejekiningsih
Prodi PPKn, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

*Email: isma120896@student.uns.ac.id

Abstract. *This study aims to find out: 1) fulfillment of the right for occasions and decent live This study aims to find out: 1) fulfillment of the right for occasions and decent live for persons with physical disabilities through social rehabilitation program held by BBRSD Prof. Dr. Soeharso; 2) the impacts of the social rehabilitation program on the fulfillment of the right for occasions and decent live for persons with physical disabilities held by BBRSD Prof. Dr. Soeharso; 3) the barriers to social rehabilitation program in fulfilling the right for occasions and decent live for persons with physical disabilities held by BBRSD Prof. Dr. Soeharso.*

This study uses qualitative research methods with purposive sampling and random sampling technique. Data collected by observation, interview and documentation. Checking the data validity by data triangulation and method triangulation. Interactive analysis model was used to analys the data.

The results showed that: 1) The social rehabilitation program held by BBRSD Prof. Dr. Soeharso to help fulfilling the right to work and a decent life for persons with physical disabilities are consist rehabilitation, resocialization, employment distribution and follow-up from the social rehabilitation program. 2) Impacts of the program: a) physiological impacts in the form of physical refunctionalization and giving of motion aids; b) the mental-social impact of growing independent, courageous, confident; c) intellectual impact in the form of increasing the ability to read, write and count and get the opportunity to improve the educational degree through the Kejar Paket program; c) the impact of vocationalism is the increase in work skills as a provision for work. 3) The barriers: a) Barriers from the persons with disabilities (Penerima Manfaat) are physical inability to support certain skills so that they are easy to give up, stubborn individuals who are difficult to adjust; b) Facilitator barriers are the quantity of facilitators and inadequate quality of facilitators due to lack of skills education background. c) barriers to facilities in the form of limited practice tools and hard road access.

Keywords: *right, occasions, physical disabilities, social rehabilitation.*

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) menyatakan bahwa pada dimensi kemanusiaan, manusia memiliki hak yang bersifat mendasar. Siapapun manusianya berhak memiliki hak

tersebut. Berarti, di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk bisa mengerti, memahami, dan bertanggung jawab untuk

memeliharanya. Disabilitas bukanlah suatu alasan untuk membangun diskriminasi hak warga negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Cogan dan Dericot dalam Winarno (2009: 37) yang mengidentifikasi lima atribut kewarganegaraan yang harus dipenuhi untuk bisa disebut sebagai warga negara. Salah satu dari kelima atribut tersebut adalah *the enjoyment of certain right* (kepemilikan hak-hak tertentu). Menjadi warga negara adalah menjadi anggota suatu kelompok dan selanjutnya akan memiliki keuntungan darinya. Menjadi warga negara berarti memiliki hak perlindungan dari pemerintahnya termasuk pula bagi warga negara disabilitas.

Kajian Hak Asasi Manusia menurut *Center of Civic Education* dalam *Res Publica: An International Framework for Education in Democracy* mengenal adanya jenis *economic and social right*, kategori ini meliputi hak esensial bagi kehidupan dan kehormatan manusia seperti hak atas kekayaan, kepemilikan, pekerjaan, persamaan sosial, standar hidup layak, kesehatan, keamanan, dan kehidupan yang lebih baik (Winarno, 2009: 26). Jika mengacu pada jenis HAM tersebut maka hak atas pekerjaan masuk ke dalamnya. Guy Mundlak dalam El Muhtaj (2008: 179) menyatakan bahwa “*Work, together with love is a formative experience of human being. It surely should be recognized as a human right* (bekerja dengan cinta adalah sebuah pengalaman dasar manusia yang sudah seharusnya diakui sebagai hak asasi manusia)”.

Tercapainya akses pekerjaan bagi para tenaga kerja disabilitas tentu menjadi perwujudan dari

salah satu pemenuhan hak warga negara, karena berbicara mengenai warga negara tidak selamanya tentang mereka yang normal. Warga negara mencakup pula mereka yang tergolong penyandang disabilitas. Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 11 tentang, Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi untuk penyandang disabilitas meliputi juga: 1) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi; 2) memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; 3) memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan 4) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; 5) mendapatkan program kembali bekerja 6) penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; 7) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; 8) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pengaturan khusus mengenai hak warga negara disabilitas ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan atas diskriminasi, mengingat adanya berbagai konteks dan latar belakang warga negara dalam suatu negara. Hal ini sesuai pendapat Wayne Hudson tentang *Differential Citizenship* dengan pendekatan nontradisional yang mensyaratkan beberapa hal berikut ini:

- a. *Citizenship is different on different site and different contexts and domains* (kewarganegaraan itu berbeda pada tempat yang berbeda, konteks yang berbeda, dan domain yang berbeda)
- b. *Different citizenship involve multiple capacities* (kewarganegaraan yang berbeda melibatkan beberapa kapasitas yang berbeda)
- c. *Exercises of civic capacity do not fall under a single citizenship* (penggunaan kapasitas warga negara tidak berada di bawah kewarganegaraan tunggal)
- d. *Citizenship can not be totalised, especially for example, by reference to citizenship person possess as members of a nation states* (kewarganegaraan tidak bisa dimiliki mutlak, sebagai contoh kepemilikan kewarganegaraan sebagai anggota sebuah negara bangsa)

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam konteks kewarganegaraan berbeda (*differential citizenship*) karena memiliki ranah sosial yang berbeda dengan warga negara biasa yakni adanya kekurangan fisik, mental, maupun keduanya. Kesadaran akan perbedaan konteks kewarganegaraan harusnya bisa menimbulkan kesadaran untuk menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang dimiliki setiap warga negara sehingga akan muncul sikap inklusif. Sebagaimana warga negara pada umumnya, warga negara penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama akses pekerjaan. Hak atas

pekerjaan sebagai bagian hak asasi ekonomi tentu saja juga menjadi hak yang turut serta dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Diatur dalam *Convention on The right of People with Dissabilities (CRPD)* Artikel 27 berbunyi:

States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. (Negara peserta konvensi menyadari adanya hak penyandang disabilitas untuk bekerja dengan dasar yang setara dengan orang lain, termasuk pula hak atas kesempatan untuk memperoleh penghidupan dengan dipilih secara bebas untuk bekerja atau diterima dalam bursa tenaga kerja dan lingkungan pekerjaan yang terbuka, inklusif, dan aksesibel bagi penyandang disabilitas).

Jaminan hak atas pekerjaan di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak” serta diperkuat kembali dengan Pasal 28D Ayat 2 “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan normatif ini mengafirmasi konstiusionalitas hak atas pekerjaan (*right to work*) dan hak dalam bekerja (*rights in works*) sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia khususnya hak ekonomi.

Hak atas pekerjaan (*right to work*) lebih menekankan akses pada pekerjaan. Akses ini produktif, terbuka luas, dan bebas dari diskriminasi.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2017 menyatakan jumlah penduduk disabilitas Indonesia yang memasuki usia kerja sebanyak 21.930.529 orang, yang termasuk angkatan kerja sebanyak 11.224.673 orang (51,18%). Terdapat 414.222 orang (3,69%) yang merupakan pengangguran terbuka. Kota Surakarta menjadi salah satu penyandang predikat kota ramah disabilitas dikarenakan di Kota Surakarta banyak berdomisili para penyandang disabilitas. Menurut data

Disdukcapil Kota Surakarta tahun 2016 tercatat jumlah penduduk disabilitas sebanyak 1.250 jiwa. Penyandang disabilitas daksa atau cacat fisik menempati jumlah terbesar yakni sebesar 330 jiwa (25,29%) dari total keseluruhan disabel. Berdasarkan penelitian Yuli Alfiani Tauda (2017) setidaknya ada dua kriteria kota ramah disabilitas yang belum terpenuhi oleh Kota Surakarta, yakni aksesibilitas bidang infrastruktur transportasi dan akses pekerjaan. Berdasarkan data BBRSD Prof. Dr. Soeharso, berikut ini latar belakang pekerjaan para Penerima Manfaat tahun 2018 :

Tabel 1. Pekerjaan Penerima Manfaat Tahun 2018 angkatan 1

Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
Tidak bekerja	46	63
Kursus/pelatihan	14	19
Bekerja	13	18
Total	73	100

Sumber: diolah dari Sie Identifikasi BBRSD, 2018

Direktur Pusat Pengembangan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat (PPRBM) Surakarta menyatakan bahwa permasalahan klasik yang dihadapi penyandang disabilitas di Kota Surakarta ada empat macam. *Pertama*, di tingkat individu penyandang disabilitas ini tidak percaya diri. *Kedua*, permasalahan dengan keluarga yang merasa kasihan terhadap kaum disabilitas sehingga mereka tidak boleh bekerja. *Ketiga*, masalah di tingkat kebijakan, adanya stigma negatif di kalangan pemerintah dan masyarakat terhadap sistem ganti rugi bagi kaum disabilitas, membuat masyarakat umum tidak siap bekerjasama dengan para disabel. *Keempat*, di tingkat pemerintahan,

selama ini yang terlihat dekat dengan disabel hanya Dinas Sosial saja. (Sumber: <https://wartasurakarta.wordpress.com/2011/06/14/solo-surga-yang-tak-layak-difabel/> diakses pada 4 Januari 2018). Secara garis besar kesuksesan Kota Surakarta dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas khususnya bidang ketenagakerjaan menjadi tolok ukur dalam perannya sebagai kota ramah bagi penyandang disabilitas.

Masalah kedisabilitas dapat berpengaruh pada melemahnya fungsi-fungsi fisik, mental dan sosial bagi penderitanya (Munawir Yusuf, 1998: 136), oleh karena itu diperlukan perhatian khusus bagi tenaga kerja dengan disabilitas agar mereka dapat terpenuhi haknya

sebagaimana tenaga kerja lainnya. Terlebih lagi Kerslake mengatakan bahwa, “*such an approach recognizes that disability is a social construct which is created when impairment interacts with societal barriers*” (beberapa pendekatan menyadari bahwa disabilitas adalah konstruksi sosial yang tercipta ketika kecacatan bertemu dengan hambatan sosial) (2016: 1). Ada berbagai macam hambatan sosial yang muncul dan menjadikan akses hak atas pekerjaan para disabilitas ini semakin jauh untuk bisa dirasakan.

Salah satu usaha yang harus dilakukan pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja disabilitas adalah dengan memberikan rehabilitasi sosial terlebih dahulu. Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi tenaga kerja penyandang disabilitas tercantum dalam CRPD Pasal 27 Ayat 1 poin (d) tentang kewajiban negara yakni “*Enable persons with disabilities to have effective access to general technical and vocational guidance programmes, placement services and vocational continuing training*”. Artinya, kewajiban negara membantu penyandang disabilitas untuk memiliki akses terhadap program bimbingan vokasional dan teknis, layanan penempatan serta pelatihan vokasional lanjut. Diatur lebih lanjut poin (k) “*Promote vocational and professional rehabilitation, job retention and return-to-work programmes for persons with disabilities*”. Masih menjadi kewajiban negara untuk memajukan rehabilitasi profesional dan pekerjaan serta pengembalian pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan ketentuan Permensos Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah biasanya diwujudkan dalam bentuk: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan k. rujukan.

Negara melalui BBRSD Prof. Dr. Soeharso Kota Surakarta telah menjalankan program rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui upaya yang dilakukan BBRSD Prof. Dr. Soeharso dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, dampak dan hambatan yang ditemui dalam keberjalanan program rehabilitasi sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Thomas dalam Sarosa (2012: 116) sebuah *case* atau kasus dapat berupa satu individu, satu organisasi, satu peristiwa, satu keputusan, satu periode, atau sistem yang dapat dipelajari secara menyeluruh dan holistik. Sehingga peneliti memfokuskan penggunaan studi kasus berupa satu organisasi yakni BBRSD Prof. Dr. Soeharso dengan *bounded system* yakni

batasan berupa program, subjek, dan aktivitas dalam rehabilitasi sosial guna membantu pemenuhan hak atas pekerjaan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang terdiri atas Penerima Manfaat, Fasilitator Keterampilan, Pekerja Sosial, Pegawai BBRSD Prof. Dr. Soeharso, serta seorang Pegawai Dinas Sosial Kota Surakarta. Peneliti juga menggunakan sumber data tempat/ kegiatan berupa kegiatan pembelajaran di vak keterampilan dan kelas Pengetahuan Umum. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, Pedoman Asesmen, Laporan Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, halaman web, foto kegiatan, dan data lain yang terkait.

Peneliti memilih teknik *purposeful sampling* untuk mendapatkan data dari informan Penerima Manfaat dan fasilitator keterampilan. Peneliti juga menggunakan teknik sampling bola salju (*snowball sampling*). *Snowball sampling* ini peneliti gunakan ketika mencari data dari pegawai BBRSD Prof. Dr. Soeharso serta data pendukung dari observasi dan dokumen.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada Penerima Manfaat, Fasilitator Keterampilan, Pekerja Sosial, dan Pegawai BBRSD Prof. Dr. Soeharso. Observasi digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial, dampak, dan hambatan yang dialami. Sementara analisis dokumen yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, Pedoman

Asesmen BBRSD Prof. Dr. Soeharso, Laporan Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial BBRSD. Prof. Dr. Soeharso, halaman web, foto kegiatan, dan data lain yang terkait.

Penulis menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode dalam mencari validitas data. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dalam Afrizal (2015: 178) yang dilakukan dalam siklus yang terdiri dari tahap mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan

HASIL dan PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Daksa

Upaya yang dilakukan BBRSD Prof. Dr. Soeharso dalam membantu pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para penyandang disabilitas daksa dilakukan melalui program rehabilitasi sosial. Menurut klasifikasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 tahun 2008, rehabilitasi yang dilakukan oleh BBRSD Prof. Dr. Soeharso ini termasuk jenis rehabilitasi berbasis panti dimana para penyandang disabilitas daksa mendapatkan layanan rehabilitasi di dalam panti khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Menurut Munawir Yusuf (1998: 34), masalah kedisabilitas dapat berpengaruh pada melemahnya fungsi-fungsi fisik, mental dan sosial bagi penderitanya sehingga diperlukan rehabilitasi sosial. BBRSD Prof Dr. Soeharso menyelenggarakan rehabilitasi lengkap dimana di dalamnya terdapat kegiatan rehabilitasi medis, bimbingan sosial,

bimbingan intelektual, dan bimbingan keterampilan.

Pertama, rehabilitasi medis bersifat kasuistik dan penentuan butuh atau tidaknya rehabilitasi medis ini diperoleh berdasarkan hasil asesmen medis. Berupa perawatan medis, operasi medis, dan pemberian alat bantu gerak. Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan, rehabilitasi medis merupakan salah satu upaya refungsionalisasi fisik yang digunakan untuk menunjang kemampuan kerja mereka.

Kedua, bimbingan sosial dilakukan dalam rangka memperbaiki perspektif sosial para Penerima Manfaat terkait dengan kondisi kedisabilitas yang dimiliki. Sebagaimana disampaikan Kerslake (2016: 1) bahwa *“such an approach recognizes that disability is a social construct which is created when impairment interacts with social barrier”*. Disabilitas adalah suatu konstruksi sosial yang diciptakan ketika ketidak mampuan bertemu dengan batasan sosial. Sering perbedaan kondisi fisik ini menjadi alasan yang mendukung terciptanya ketidak mampuan fisik dengan adanya berbagai batasan sosial. Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan, bimbingan sosial ini sangat membantu para Penerima Manfaat untuk membangun pribadi yang mandiri dan percaya diri sebagai modal penting untuk bisa ikut bersaing dalam dunia pekerjaan.

Ketiga, bimbingan intelektual merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan intelektualitas Penerima Manfaat. Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan, maka peran dari bimbingan intelektual sangat terlihat pada jenis keterampilan yang membutuhkan perhitungan otak

secara matang seperti komputer, elektronik, pertukangan kayu, dan pertukangan las. Dilakukan melalui kegiatan keaksaraan fungsional, *upgrading*, *refresing*, kelas pengetahuan umum, kelompok belajar, dan kejar paket.

Keempat, bimbingan keterampilan atau vokasional merupakan kegiatan yang paling jelas benang merahnya jika dikaitkan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak juga dilakukan melalui program resosialisasi. Program resosialisasi dilakukan guna mempersiapkan dan memaksimalkan fungsi fisik, sosial, intelektual, dan vokasional Penerima Manfaat paska rehabilitasi. Program resosialisasi meliputi juga Praktik Belajar Kerja (PBK), Pelatihan Kewirausahaan, Sarasehan, dan Bimbingan Kesiapan Keluarga (BKK).

Pertama, Penerima Manfaat dapat mempraktikkan keahlian yang diperoleh melalui Praktik Belajar Kerja (PBK) yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya kepada Penerima Manfaat sehingga diharapkan mereka mengetahui kondisi di dalam pekerjaan dan dapat segera menyesuaikan diri pada saat sudah benar-benar bekerja. Ada tuntutan dan tekanan yang harus mereka selesaikan dan ada tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus diemban. Kemandirian dan penguasaan keterampilan kerja sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan yang sesungguhnya.

Kedua, dilakukan Bimbingan Kewirausahaan dan Bantuan uang Ekonomi Produktif untuk

pemenuhan hak memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, dan memulai usaha sendiri yang dilakukan BBRSD Prof. Dr. Soeharso terhadap Penerima Manfaatnya. Uang Ekonomi Produktif (UEP) diberikan untuk memberikan rangsangan usaha terhadap lulusan Penerima Manfaat yang hendak membuka usaha mandiri atau *personal employment*.

Ketiga, resosialisasi mencakup pula sarasehan. Sarasehan dilakukan sebagai upaya untuk memberikan motivasi terkait kesempatan kerja bagi para Penerima Manfaat. Kegiatan sarasehan ini diikuti oleh Penerima Manfaat, orang tua, dinas daerah, pihak pengusaha, dan pejabat struktural BBRSD Prof. Dr. Soeharso.

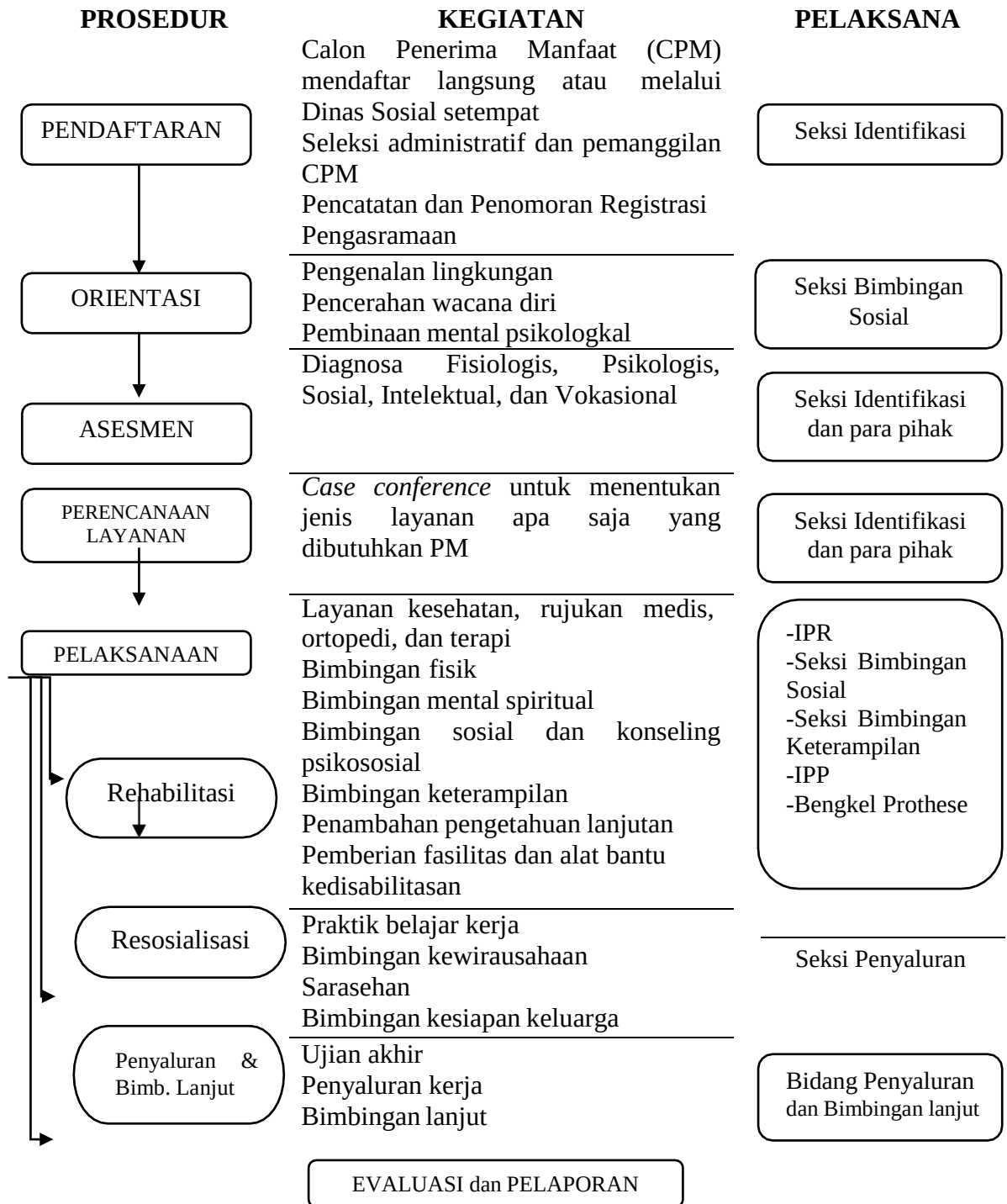
Keempat, kegiatan Bimbingan Kesiapan keluarga dilakukan untuk menyampaikan pertanggung jawaban Pekerja Sosial terhadap orang tua ataupun dinas sosial dari daerah. Selain itu juga dilakukan diskusi terkait rencana masa depan Penerima Manfaat paska lulus.

Penerima Manfaat yang telah menyelesaikan rangkaian program rehabilitasi sosialnya, maka akan dibantu dalam penyaluran kerja sesuai bidang keterampilan yang telah dipelajari. BBRSD Prof. Dr. Soeharso telah melakukan kerja sama dengan para pengusaha untuk bisa memberikan pekerjaan kepada para eks Penerima Manfaat. Sistem penyaluran yang dilakukan adalah melalui *open employment* yang artinya para eks Penerima Manfaat ini ikut bersaing dengan para tenaga kerja normal lainnya.

Program rehabilitasi bertujuan membantu pemenuhan hak warga negara khususnya kelompok 'spesial' atau kelompok rentan. Sebagaimana

disampaikan Wayne Hudson dalam Freddy K. Kalidjernih (2011: 9-10) dalam pembahasannya mengenai teori *Differential Citizenship* ini mengacu pada pendekatan non tradisional yang pemaknaannya bisa berbeda-beda sesuai wacana dan konteks masing-masing. Konteks kewarganegaraan yang menjadi pembahasan di sini adalah kewarganegaraan yang dilihat dari segi kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas memiliki ranah sosial yang berbeda dengan warga negara normal lainnya yakni berupa kekurangan fisik, mental, maupun keduanya. Namun, status kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan karena alasan ini, yang artinya mereka para penyandang disabilitas masih memiliki status kewarganegaraan sama dengan warga negara lainnya. Kesadaran akan perbedaan konteks warga negara normal dan warga negara tergolong kelompok rentan (penyandang disabilitas) harusnya bisa menimbulkan sikap inklusif dalam kehidupan berwarga negara khususnya dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sehingga, program rehabilitasi sosial yang dilakukan BBRSD Prof. Dr. Soeharso ini merupakan salah satu bentuk program untuk mewujudkan kewarganegaraan yang inklusif, yang bisa menerima para penyandang disabilitas tanpa ada diskriminasi. Usaha mewujudkan sikap inklusif di dunia kerja juga dilakukan BBRSD Prof. Dr. Soeharso dengan menjalin kerja sama dengan masyarakat pemberi kerja melalui program Praktik Belajar Kerja (PBK) dan penyaluran melalui *open employment* sistem.



Gambar 1. Bagan Prosedur Rehabilitasi Sosial di BBRSD Prof. Dr. Soeharso

Dampak Program Rehabilitasi Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Daksa

Berdasarkan hasil penelitian, maka dampak dari Program Rehabilitasi Sosial ini telah peneliti klasifikasikan menjadi empat ranah, yaitu:

Pertama, ranah fisiologis (medis) atau perubahan fisik yang dialami para Penerima Manfaat memberikan kemudahan bagi para Penerima Manfaat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Selain itu perubahan fisik ini tentu akan sangat membantu dalam upaya mereka untuk belajar keterampilan kerja.

Kedua, perubahan Ranah mental sosial, berupa perubahan sikap para Penerima Manfaat pasca dilakukannya Bimbingan Sosial sebagai rangkaian program Rehabilitasi Sosial di BBRSD Prof. Dr. Soeharso. Berkaitan dengan pemenuhan hak atas pekerjaan, maka dampak perubahan mental-sosial yang muncul adalah terbentuknya rasa percaya diri yang menjadi langkah awal untuk mengatasi keterbatasan fisik sehingga menjadi bekal untuk mengikuti persaingan kerja. Perbaikan mental-sosial juga sangat dibutuhkan bagi Penerima manfaat yang hendak berwirausaha. Membuka suatu usaha tentu membutuhkan sikap berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan sungguh-sungguh.

Ketiga, perubahan ranah intelektual yaitu pada masa sekarang ini, banyak sekali lulusan jenjang pendidikan tinggi yang kesulitan mencari pekerjaan, apalagi bagi mereka yang tidak sekolah ditambah kondisi tubuh disabilitas yang tentu memperkecil peluang kerja. Oleh

karena itu perlu Bimbingan Pendidikan sehingga meski kondisi fisik kurang mendukung, setidaknya mereka masih bisa memiliki nilai lebih dari sisi intelektualitas.

Keempat, perubahan ranah vokasional dapat terlihat dari perkembangan keterampilan para Penerima Manfaat untuk bekerja sesuai keterampilan yang diajarkan. Dampak lanjutan dari dimilikinya keterampilan kerja adalah mereka bisa mengikuti program penyaluran kerja melalui *open employment* maupun membuka usaha mandiri. Sehingga, dengan bekerja maka hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak mereka sudah bisa terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 14 Permensos Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, bahwa bimbingan sosial, mental, fisik, pendidikan, dan vokasional-kewirausahaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung Penyandang Disabilitas agar mereka memiliki kesadaran, tanggung jawab, meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan memiliki keterampilan kerja dan usaha untuk menjamin masa depannya.

Selain berdampak dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dampak lain yang muncul adalah ikut terwujudnya lingkungan masyarakat yang inklusif. Lingkungan yang dimaksudkan adalah lingkungan keluarga dan peningkatan kesempatan dalam akses pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Naila Kabeer (2011: 04) "*recognition by such groups often first takes the*

form of the demand for 'the right to have right', to be recognizes as full person, despite their difference, and hence as full citizens". Pengakuan itu dimulai dari memberikan hak untuk memiliki hak tertentu. Berkaitan dengan ini maka masyarakat yang inklusif akan memberikan hak bagi penyandang disabilitas untuk mengklaim hak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak warga negara. Selain itu muncul pula pengakuan sebagai manusia seutuhnya terlepas dari perbedaan yang ada pada diri mereka sehingga tercapai tujuan sebagai warga negara seutuhnya. Selain itu juga terkait akses informasi kerja, pelatihan kerja, hak berwirausaha, dan penyaluran kerja.

Tabel 2. Matrik Dampak Rehabilitasi Sosial BBRSD Prof. Dr. Soeharso

Ranah Perkembangan	Wujud Perkembangan
Fisiologis (medis)	• Perubahan secara fisik paska dilakukannya perawatan medis, operasi medis, maupun pemberian alat bantu gerak
Mental-Sosial	• Menjadi lebih percaya diri • Keberanian dalam bersosialisasi • Mandiri • Menjadi pribadi yang terbuka
Intelektual	• Bisa membaca, menulis, dan berhitung (bagi yang tidak sekolah) • Mendapatkan tambahan pengetahuan umum dan Bahasa Inggris • Peingkatan jenjang pendidikan (kejar paket)
Vokasional	• Peningkatan keterampilan kerja • Pengalaman kerja melalui PBK • Sertifikat keterampilan resmi dari BLK • Mendapatkan pekerjaan setelah lulus • Dapat membuka usaha mandiri dan mendapat bantuan stimulan

Hambatan Program Rehabilitasi Sosial terhadap Pemenuhan Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas Daksa

Pelaksanaan Program rehabilitasi Sosial dalam rangka pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak oleh Balai Besar rehabilitasi Sosial Bina Daksa prof. Dr. Soeharso tentu saja tidak selamanya berjalan tanpa hambatan. Berikut ini beberapa hambatan yang dialami dalam perencanaan,

pelaksanaan, hingga evaluasi Program Rehabilitasi Sosial:

Pertama, hambatan berkaitan dengan Penerima Manfaat, perbedaan karakter setiap Penerima Manfaat ini tidak jarang memunculkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial, seperti sikap yang mudah menyerah. Hal ini menjadikan ilmu yang mereka pelajari tidaklah maksimal. Sikap yang tertutup dan susah menyesuaikan diri juga sering terjadi, mengingat selama ini banyak

penyandang disabilitas yang tidak pernah keluar rumah dan bersosialisasi dengan lingkungan. Sikap yang keras kepala yang dimiliki Penerima Manfaat juga dapat menghambat dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial. Hal ini juga akan berdampak lebih lanjut ketika Penerima Manfaat sudah memasuki dunia kerja.

Kedua, hambatan berkaitan dengan fasilitator. Jumlah fasilitator di setiap vak keterampilan tentu saja berbeda-beda. Jumlah yang tidak sebanding ini menjadikan fasilitator sering kerepotan dalam menyampaikan materi, apalagi pembelajaran dilakukan secara personal bukan klasikal. Jumlah fasilitator yang terbatas juga mengakibatkan fasilitator kesulitan untuk mengawasi pergerakan dari Penerima Manfaat yang ada di kelas. Keterbatasan jumlah fasilitator ini disebabkan oleh sulitnya proses rekrutmen. Selain keterbatasan jumlah, secara kualitas pun para fasilitator juga mengalami keterbatasan. Kebanyakan fasilitator yang mengajar di vak keterampilan ini tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan. Hal ini berdampak pada materi yang diberikan pada saat bimbingan keterampilan.

Ketiga, hambatan non teknis juga seringkali menjadikan proses bimbingan keterampilan menjadi terganggu. Misalnya saja jumlah peralatan praktik yang terbatas dan tidak mencukupi untuk digunakan secara bersamaan. Selain itu, peralatan yang rusak dan tidak bisa digunakan juga menjadikan ketersediaan alat praktik keterampilan semakin sedikit. Hambatan lain berkaitan dengan

jalan akses yang mana terdapat topografi naik turun. Hal ini membuat para Penerima Manfaat khususnya yang berkursi roda memerlukan waktu lama untuk perjalanan yang akhirnya tentu akan memotong waktu untuk pelajaran di vak keterampilan

SIMPULAN dan SARAN

Simpulan

1. Pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas daksa melalui program rehabilitasi sosial yang dilakukan BBRSD Prof. Dr. Soeharso dilakukan melalui tiga kegiatan di bawah ini:
 - a. Rehabilitasi Sosial, meliputi:
 - 1) Rehabilitasi Medis
 - 2) Bimbingan Pendidikan
 - 3) Bimbingan Sosial
 - 4) Bimbingan Keterampilan / Vokasional
 - b. Resosialisasi, meliputi:
 - 1) Praktik Belajar Kerja (PBK)
 - 2) Pelatihan Kewirausahaan
 - 3) Sarasehan
 - 4) Bimbingan Persiapan Keluarga
 - c. Penyaluran dan Tindak Lanjut Rehabilitasi, meliputi:
 - 1) Ujian Akhir
 - 2) Penyaluran
 - 3) Bimbingan Lanjut
2. Dampak program rehabilitasi sosial terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas daksa yang dilakukan oleh BBRSD Prof. Dr. Soeharso

Program Rehabilitasi Sosial memberikan dampak pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para

disabilitas daksa. Berikut dampak program rehabilitasi sosial terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas daksa yang dilakukan oleh BBRSD Prof. Dr. Soeharso, meliputi

- a. Ranah fisiologis (medis), adanya perubahan fisik paska dilakukannya rehabilitasi medis terhadap Penerima Manfaat dapat membantu dalam pelatihan keterampilan dan juga kemampuan kerja.
- b. Ranah mental-sosial, terbentuknya rasa percaya diri yang menjadi langkah awal untuk mengatasi keterbatasan fisik sehingga menjadi bekal untuk mengikuti persaingan kerja. Penerima Manfaat juga menjadi lebih berani untuk bersosialisasi dengan lingkungan luar dan menjadi pribadi yang tidak lagi tertutup seperti sebelumnya.
- c. Ranah pendidikan/intelektual, Penerima Manfaat yang sebelumnya buta aksara, kini bisa membaca, menulis, dan berhitung. Penerima Manfaat dapat meningkatkan jenjang pendidikan formal melalui kejar paket. Penerima Manfaat juga bisa mendapatkan pengetahuan umum yang berguna bagi kehidupan sehari-hari.
- d. Ranah vokasional, dapat terlihat dari perkembangan keterampilan para Penerima Manfaat untuk bekerja sesuai keterampilan yang diajarkan. Selain itu, dapat mengikuti program penyaluran kerja melalui *open employment*

maupun membuka usaha mandiri. Sehingga, dengan bekerja maka hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak mereka sudah bisa terpenuhi.

3. Hambatan program rehabilitasi sosial terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas daksa yang dilakukan oleh BBRSD Prof. Dr. Soeharso

Berdasarkan hasil penelitian BBRSD Prof. Dr. Soeharso mengalami hambatan-hambatan untuk menjalankan program rehabilitasi sosial yang membantu pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas daksa antara lain:

- a. Hambatan dari segi Penerima Manfaat
 - 1) Sikap yang mudah menyerah
 - 2) Sikap pemalu, tertutup, dan susah menyesuaikan diri
 - 3) Sikap keras kepala
- b. Hambatan dari segi instruktur
 - 1) Terbatas secara kuantitas
 - 2) Terbatas secara kualitas
- c. Hambatan dari segi sarana prasarana
 - 1) Jumlah alat praktik keterampilan terbatas
 - 2) Beberapa akses jalan bertipografi sulit

Saran

Berdasarkan hasil temuan studi lapangan, kesimpulan, implikasi, maka peneliti dapat kemukakan saran-saran berikut:

1. Kepada BBRSD Prof. Dr. Soeharso agar menjangkau

semakin banyak daerah yang belum mendapatkan sosialisasi terkait program Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas daksa serta memperluas jaringan kerja sama untuk penyaluran kerja sampai ke luar Jawa mengingat Penerima Manfaat banyak yang berasal dari luar Jawa.

2. Kepada fasilitator keterampilan agar memberikan perhatian lebih terhadap penyusunan materi untuk program bimbingan keterampilan sehingga kompetensi lulusan bisa setara dengan lulusan Balai Latihan kerja. Kompetensi lulusan akan sangat membantu dalam penyaluran kerja.
3. Kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia agar lebih memperhatikan pola rekrutmen pegawai fasilitator keterampilan agar pelayanan bimbingan keterampilan menjadi lebih maksimal dalam kuantitas dan kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2015). Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Convention on the Right of Person with Dissabilities* yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 19 tahun 2011
- El Muhtaj, Majda. (2008). DIMENSI- DIMENSI HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Raja GrafindoPerkasa

- Kabeer, Naila. (2011). The Search forInclusive Citizenship: Meanings and Expressions in an Inter-Connected World.<https://www.opendocs.ids.ac.uk/opendocs> , diakses pada 26 April 2018
- Kalidjernih, Freddy K. (2011). Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan Edisi Ketiga. Bandung: Widya Aksara Press
- Kerslake, Anna Arstein. (2016) .Disability in a Human RightsContext. Journal. Laws, 5, 35; doi:10.3390/laws5030035. www.mdpi.com/journal/laws diakses pada 8 April 2018
- Sarosa, Samiaji. (2012). Penelitian Kualitatif: Dasar Dasar.Jakarta: PT INDEX
- Sutopo, H.B. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar Teoriti dan Penerapannya Dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press.
- Winarno. (2009). Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta
- Yusuf, Munawir. (1998). Pendidikan Tuna Netra Dewasa dan Pembinaan Karier, Jakarta: Depdikbud.

**STRATEGI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA MENYAMPAIKAN
PENDAPAT DALAM RANGKA *DIGITAL CITIZENSHIP* (STUDI PADA
UNIT LAYANAN ADUAN SURAKARTA).**

Lestyo Mawarti*, Triana Rejekiningsih, Rima Vien P.H
Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta Email:

*Email: lestyomawarti@gmail.com

Abstract. *This study aims to find out: 1) Participation of citizens in submitting complaints through ULAS (Surakarta Complaint Service Unit); 2) Strategy for fulfilling the rights of citizens to express their opinions in the framework of digital citizenship through the ULAS 3) Obstacles to fulfilling the rights of citizens to express their opinions in the framework of digital citizenship through the ULAS This study uses qualitative research methods and descriptive research approaches. The research technique used was purposive and snowball sampling. Data collection uses interviews, observation and documentation. Testing data validity using data triangulation and methods. Data analysis uses an interactive analysis model. The results of this study include: 1) ULAS a forum for the people of Surakarta City to participate in providing public service complaints. In quantity, the people who participated through the ULAS were increasing. However, in quality there are still people who lack responsibility in using digital media, thus affecting the efficiency and effectiveness of ULAS; 2) The strategy for fulfilling the right to express opinions in the framework of digital citizenship by ULAS , a) providing websites, which are equipped with the provision of admin in each OPD (Regional Device Organization); b) socialization, to inform the public about ULAS; c) kelurahan facilitation, by providing admin in each kelurahan; d) availability of electronic forms for claimants each will submit a complaint; e) closure of complaints, by super admin for unclear complaints. The strategy implemented has embodied the community's right to participate in expressing opinions using digital media. But it still needs improvement in forming community responsibilities when it is more efficient and efficient; 3) Obstacles to fulfilling the right to express opinions carried out by ULAS include: a) internal barriers, namely there is still a manual system on the digital system, so that the super admin examines complaints closely every day to minimize errors in closing complaints and remaining admin OPD (Regional Device Organization) that has not been fluent in using technology, so that quarterly evaluations are carried out for the admin; b) external barriers include limited budgets and cessation of socialization, so socialization is carried out by only inviting figures close to the community to be able to convey back to other communities and insert material about the ULAS in every activity of government agencies.*

Keywords: Strategy, digital citizenship, participation

PENDAHULUAN

Pada Masa sekarang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilengkapi dengan akses internet semakin meningkat. Mossberger (2008:75) menyatakan bahwa, *“While the Internet has this potential, media-system dependency theory tells us that social forces can mediate these likely effects, and the systems of media, politics, and economics are interdependent in any society”*. Peningkatan penggunaan internet juga mengindikasikan bahwa ketergantungan warga negara terhadap teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya teknologi digital memudahkan warga negara menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka kepada pemerintah. Berdasarkan Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet di Indonesia, pengguna internet pada tahun 2016 yaitu 132,7 juta jiwa. Sementara itu, pada tahun 2017 pengguna internet berjumlah 143,26 juta jiwa. Berarti, jumlah pengguna internet di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 10,56 juta jiwa atau sekitar 14 % dari tahun sebelumnya. (Survei APJII, 2017: 6)

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pada era digital ini, komunikasi antara masyarakat dengan

pemerintah dapat secara mudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang, yaitu menggunakan media sosial.

Penggunaan media digital dalam berpartisipasi tentu juga harus diimbangi dengan adanya keterampilan digital. Seperti halnya yang dingkapkan oleh Annusca Ferrari dan Hans Martens (2016:13) bahwa “Pada titik balik kewarganegaraan digital, keterampilan digital adalah poin utama kita memasuki dunia virtual. Keterampilan digital bukan hanya kemampuan mengoperasikan perangkat. Kesadaran dan toleransi serta nilai tanggung jawab demokratis juga merupakan kemampuan yang perlu ada dalam menjadi warga negara digital”. Namun, ternyata kesadaran, toleransi serta nilai tanggung jawab masih kurang. Berdasarkan data Subdit IT dan *Cyber crime* Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, pada tahun 2015 terdapat laporan berkaitan dengan ujaran kebencian sebanyak 671 laporan. Pada tahun 2016, jumlah tersebut juga masih tinggi, dengan 199 kasus yang baru ditangani. Pada urutan kedua penipuan *online* terdapat jumlah laporan sebanyak 639 dengan 185 kasus yang baru diselesaikan. Banyaknya laporan tersebut, tidak terlepas dari maraknya kabar *hoax* yang meliputi tindak pencemaran nama baik, fitnah, provokasi, pelecehan, maupun ancaman. (<http://nasional.kompas.com/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.di.adukan.ke.polisi> yang diakses pada tanggal 16 Februari 2018)

Sehubungan dengan hal

tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah menyediakan ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) yang bertujuan untuk mewadahi masyarakat dalam berpartisipasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui media digital kepada pemerintah terfasilitasi melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Hal ini dikarenakan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aduan dimanapun dan kapan pun mereka berada. Seharusnya masyarakat bisa mempergunakan kesempatan tersebut secara bertanggungjawab. Namun, masih terdapat masyarakat yang menyampaikan aduan dengan kurang santun, aduan *hoax* dan spam atau aduan kurang penting. Berdasarkan data jumlah aduan pada ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) tahun 2017 menunjukkan bahwa dari 422 jumlah aduan yang dikirim oleh masyarakat, terdapat 373 aduan dengan status respon terkirim, 1 aduan dengan status *Open*. Sementara itu, terdapat sejumlah 31 aduan yang masih dalam status pen delegasian. Sisanya adalah 17 aduan dengan status *closed* atau 4,7% dari keseluruhan jumlah aduan. Aduan dengan status *close* merupakan aduan yang *hoax* sehingga ditutup atau tidak diunggah ke *website*. Aduan dengan kategori *hoax* maupun aduan yang menggunakan bahasa yang tidak 3421QW santun juga terdapat pada aduan dengan status respon terkirim. Jumlah aduan *hoax* ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 yang sebelumnya tidak terdeteksi adanya

hoax.

Pemerintah harus secara bijak menyikapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi *hoax* dan tidak pantas. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Rianto Rahadi ([Rahadi, 2017: 65](#)) dalam jurnalnya mengenai perilaku yang dilakukan oleh pengguna serta informasi *Hoax* dalam bermedia sosial, salah satu yang bertanggung jawab dalam penekan informasi *hoax* maupun konten yang tidak pantas adalah pemerintah. Berdasarkan penelitian tersebut, dengan pertanyaan “siapa yang berhak bertanggung jawab menghambat penyebaran *hoax*?”, telah diketahui bahwa pada urutan kedua, responden sejumlah 120 orang menjawab keluarga. Demikian, pemerintah juga berwenang dan harus berperan dalam pembentukan hak dan tanggung jawab dalam penggunaan media digital.

Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan pemenuhan hak menyampaikan pendapat dalam rangka *digital citizenship* melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Tujuannya adalah agar masyarakat menggunakan hak nya dengan bertanggung jawab dalam menyampaikan aduan menggunakan media digital. Hal ini berarti sesuai dengan salah satu komponen *digital citizenship* yaitu *digital right and responsibilities*. Hak dan tanggung jawab digital sesuai dengan komponen PKn *civic responsibility*. Berdasarkan CCE dalam Cholisin (2010:1) *civic responsibility* merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Apabila didasarkan pada *set of*

characteristics of being a citizen (karakteristik kewarganegaraan) oleh Cogan dan Dericot (Winarno, 2013:34), pembetulan hak dan tanggung jawab ini termasuk dalam beberapa karakter yaitu *the enjoyment of certain right* (pemilikan hak tertentu) dan *the fulfilment of corresponding obligations* (pemenuhan kewajiban). Pembentukan hak dan tanggung jawab oleh Pemerintah Kota Surakarta merupakan proses *citizenship education* karena pendidikan bukan dilaksanakan di dalam persekolahan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh David Kerr dalam Winarno (2014:5) bahwa *citizenship education* merupakan “proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga muda akan hak-hak, peran, dan tanggungjawabnya sebagai warga negara”. Hasil akhir adanya pembentukan hak dan tanggung jawab dalam rangka *digital citizenship* tersebut adalah terbentuknya *good citizen*.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka peneliti perlu meneliti dan menganalisis mengenai: 1) partisipasi warga negara dalam menyampaikan aduan melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta); 2) strategi pemenuhan hak warga negara menyampaikan pendapat dalam rangka *digital citizenship* melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta); 3) hambatan pemenuhan hak warga negara menyampaikan pendapat dalam rangka *digital citizenship* melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan obyek yang sedang diteliti berdasarkan fakta menggunakan data berupa angka, tulisan atau gambar yang tersaji dalam bentuk narasi. Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif guna memperoleh informasi bagaimana strategi pemenuhan hak warga negara menyampaikan pendapat digital masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Data yang digunakan berupa data kualitatif yang dihasilkan dari berbagai sumber yaitu informan, tempat dan peristiwa serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengambilan sampel penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snow ball sampling*. Melalui *purposive sampling*, peneliti menentukan informan yaitu ketua admin ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) dari Inspektorat Kota Surakarta yang memahami mengenai kebijakan adanya ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta), admin Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta yang memahami sistem dan pengolahan data aduan, admin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, petugas kelurahan, dan anggota Tim Pokja Pengaduan atau pemberi materi sosialisasi ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Peneliti juga menggunakan *snowball sampling* agar mendapatkan keterangan dari masyarakat yang pernah menyampaikan aduan melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta).

Peneliti menggunakan teknik

pengumpulan data wawancara, observasi website dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan kepada kepala admin ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta), admin Dinas Komunikasi, Statistika dan Persandian, admin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, anggota Tim Pokja Pengaduan, beberapa petugas kelurahan di Kota Surakarta dan masyarakat yang pernah menyampaikan aduan melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana masyarakat menyampaikan aduan melalui website ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) beserta isinya apakah sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Sementara itu, analisis dokumen yang digunakan meliputi Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Unit Layanan Aduan Surakarta, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 A Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Aduan Surakarta, paparan atau materi sosialisasi Unit Layanan Aduan Surakarta.

Pelaksanaan uji validitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif dari Miles dan Hubberman (2007:20) dengan

tahap sebagai berikut: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) verifikasi atau pengambilan keputusan. Prosedur penelitian ini dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data dan yang terakhir adalah penyusunan laporan penelitian.

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Partisipasi Warga Negara dalam Menyampaikan Aduan Melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta)

ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) merupakan wadah partisipasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk menampung aduan dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan Mossberger (2008:1) bahwa "*internet use does indeed have significant benefit for democratic participation and economic welfare*" (penggunaan internet mempunyai peran penting untuk partisipasi demokrasi dan kesejahteraan ekonomi). Peran internet, dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menyediakan wadah partisipasi masyarakat. ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) menyediakan kanal non elektronik dan elektronik yang mana kanal dengan sistem elektronik atau *online* lah yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Pemerintah telah menyediakan ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) sebagai wadah partisipasi secara *online*. Sementara itu, masyarakat juga telah menggunakan teknologi digitalnya baik melalui *website* maupun aplikasi *Solo Destination* untuk

berpartisipasi dalam menyampaikan aduannya. Jumlah aduan yang masuk melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) setiap tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung karena adanya kepentingan yang menuntut mereka untuk menyampaikan pendapat, kritik dan aduan kepada Pemerintah Kota Surakarta. Berarti masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi.

Selain kesadaran, dalam kegiatan partisipasi juga menuntut tanggung jawab. Berdasarkan dari hasil temuan dalam penelitian ini, masih terdapat masyarakat yang kurang memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan aduan melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Masih terdapat masyarakat yang menyampaikan aduan *hoax*, *spam* maupun aduan dengan bahasa yang kurang santun. Partisipasi tanpa tanggung jawab akan merugikan masyarakat lain maupun pejabat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang bersangkutan. Demikian, bahwa kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan internet untuk berpartisipasi sudah bagus. Kondisi tersebut merupakan implikasi adanya warga negara digital. Sementara itu, kebebasan yang diberikan internet dalam penanganan aduan menimbulkan adanya masyarakat yang berpartisipasi dengan kurang bertanggung jawab. Terdapat aduan yang tidak memenuhi sisi moral karena kurangnya etika dalam penyampaian.

Strategi Pemenuhan Hak Warga Negara Menyampaikan Pendapat

dalam Rangka *Digital Citizenship* Melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta)

ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) merupakan program Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-A Tahun 2015. Berdasarkan peraturan tersebut ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) bertujuan untuk mewadahi masyarakat dalam berpartisipasi. Berarti pemerintah telah melakukan pemenuhan hak masyarakat dalam berpartisipasi menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) bertujuan agar pengaduan masyarakat dapat ditangani dengan baik, benar, efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan hak dan tanggung jawab digital masyarakat dalam menyampaikan aduan.

Berdasarkan dari hasil temuan, masih terdapat masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam menyampaikan aduannya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pembentukan hak dan tanggung jawab digital sebagai elemen dari *Digital Citizenship* (Kewarganegaraan Digital). Mike Ribble (2004:9) menjelaskan mengenai hak dan tanggung jawab digital bahwa "*those requirements and freedoms, extended to everyone in a digital world*" (pada dasarnya bahwa persyaratan dan kebebasan diberikan kepada semua orang di dalam dunia digital).

Kebebasan berarti hak tertentu yang diberikan secara setara kepada semua anggota warga digital. Sementara itu, persyaratan adalah

tanggung jawab digital. Sehubungan dengan adanya persyaratan dan kebebasan dalam hak dan tanggung jawab digital, Mike Ribble (2004:9) menjelaskan bahwa “*Digital rights and responsibilities keywords are understanding technology rules and helping others online*” (kata kunci dari hak dan tanggung jawab digital adalah memahami aturan penggunaan teknologi dan membantu orang lain dalam mengakses internet).

Kunci dari hak dan tanggung jawab digital meliputi: 1) memahami aturan penggunaan teknologi; 2) membantu orang lain dalam mengakses internet. Kedua aspek tersebut dapat kita golongkan sebagai tanggung jawab atas adanya hak digital. Terkait dengan memahami aturan penggunaan teknologi, Mike Ribble (2004:9) menyatakan bahwa “*Digital citizen also have certain responsibilities to this society, they must agree to live according to the parameters that are mutually agreed upon by members. These boundaries may come in the form of legal rules or regulations, or as acceptable use policies*”. Arti dari pernyataan tersebut adalah warga digital juga memiliki tanggung jawab tertentu terhadap masyarakat ini, mereka harus setuju untuk hidup sesuai dengan parameter yang disepakati bersama oleh anggota. Batas-batas ini bisa datang dalam bentuk peraturan atau hukum, atau sebagai kebijakan penggunaan yang dapat diterima.

Berdasarkan pendapat Ribble, tanggung jawab digital meliputi mengikuti batas yang disepakati bersama. Batas yang disepakati bersama yaitu etika penggunaan

etika digital. Ali (2015:20) menyatakan bahwa komponennya meliputi. *think, hurfull, not illegal, necessary, dan kind*.

Tanggung jawab digital yang selanjutnya yaitu membantu orang lain dalam mengakses internet atau mendapatkan haknya. Nor Aslamiah (2015:17) menyatakan bahwa warga digital mempunyai hak untuk privasi, kebebasan bersuara dan lain-lain. Melalui hak digital maka menimbulkan terwujudnya tanggung jawab bersama. Masyarakat sebagai pengguna hendaklah dapat membantu orang lain menentukan bagaimana teknologi ini harus digunakan melalui cara-cara yang sesuai.

pemenuhan hak warga negara menyampaikan pendapat dalam rangka *digital citizenship* melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) meliputi 1) Kebebasan (hak), yaitu pemerataan hak masyarakat dalam berpartisipasi menyampaikan pendapat melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta); 2) Persyaratan (tanggung jawab), yaitu masyarakat memahami aturan dan membantu orang lain dalam berpartisipasi menyampaikan pendapat melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Demikian, strategi yang digunakan dalam pembentukan hak dan tanggung jawab dalam rangka *digital citizenship* melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) meliputi penyediaan *website*, sosialisasi, penyediaan fasilitasi kelurahan, pengadaan formulir elektronik bagi pengadu, dan penutupan aduan.

Pertama, penyediaan *website* ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) yang memanfaatkan akses

internet, artinya Pemerintah Kota Surakarta telah memanfaatkan internet dalam kepentingan pemerintahan. Penyediaan *website* ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) dilengkapi dengan admin yang mengoperasikannya. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Inspektur Kota Surakarta Selaku Ketua Unit Layanan Aduan Surakarta Nomor:700/46/Sekrt/2017 tentang Admin Unit Layanan Aduan Surakarta Pada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sumarto (2004:13) bahwa hal ini dibuktikan melalui peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk membuat *website* atau membangun jaringan internet antar instansi. Biaya yang berhubungan dengan kegiatan admin ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) dibebankan pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Surakarta.

Kedua, sosialisasi ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) dilaksanakan setiap tahun mulai dari tahun 2014, awal peluncuran hingga pada tahun 2017 ketika peluncuran aplikasi baru yaitu ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) dalam bentuk *smartphone*. Pelaksanaan sosialisasi di kecamatan dihadiri oleh perwakilan dari setiap kelurahan yang terdapat di kecamatan tersebut. Perwakilannya, merupakan tokoh atau orang yang dekat dengan masyarakat. Mulai dari anggota karangtaruna, PKK, hingga ketua RW tergantung dari kelurahan masing-masing.

Berdasarkan dari dokumen Paparan ULAS tahun 2017, isi

materi dalam sosialisasi meliputi: 1) latar belakang dan dasar hukum adanya ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Pada bahasan ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kota Surakarta untuk memperkenalkan adanya ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Sebelum melaksanakan tugasnya untuk memenuhi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, maka masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu pentingnya dan apa itu ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta); 2) Mekanisme dan tata cara penggunaan ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Keterampilan digital termasuk di dalamnya bagaimana cara menggunakan media digital. Pada hal ini, masyarakat diberitahu bagaimana cara menggunakan media digital yang dimiliki untuk menyampaikan aduannya melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Pemerintah secara tidak langsung telah mendorong masyarakat untuk menggunakan media digitalnya termasuk *smartphone* untuk menyampaikan pendapatnya.

Pada paparan ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) memang tidak diberikan materi mengenai bagaimana masyarakat itu harus bertanggung jawab atas aduannya. Namun, pada sosialisasi diberi himbauan agar masyarakat itu menyampaikan sosialisasi yang disampaikan, selain itu mereka juga dihimbau untuk membantu masyarakat lain dalam menyampaikan aduannya melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Dampak adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh ULAS (Unit Layanan Aduan

Surakarta) antara lain masyarakat mengetahui melalui apa mereka menyampaikan aduan. Pada hal ini, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk menyampaikan aduan. Selain itu, tanggung jawab masyarakat terbentuk dengan memberitahu dan membantu masyarakat lain menyampaikan aduan.

Ketiga, melalui fasilitas kelurahan masyarakat yang tidak bisa membaca, menulis maupun tidak mempunyai akses internet bisa menyampaikan pendapatnya. Fasilitas kelurahan ini meliputi penyediaan admin yang ditunjuk di kelurahan untuk membantu masyarakat dalam menyampaikan aduannya melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Kelurahan telah disediakan *wifi*, di mana masyarakat bisa login

meggunakan komputer yang terdapat di kelurahan dengan dibantu oleh petugas. Masyarakat bisa login menggunakan akun dengan dibuatkan oleh petugas. Sehingga, password yang digunakan adalah password milik pengadu, bukan petugas kelurahan. Pemerintah Kota Surakarta telah menjangkau masyarakat yang mampu mengakses teknologi dan menjangkau masyarakat yang tidak bisa mengakses teknologi untuk menyampaikan aduan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih sedikit masyarakat yang memanfaatkannya. Hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat melalui media digital sudah diberikan. Hanya saja, masih sedikit yang memanfaatkan haknya tersebut.

Daftar Kelurahan dan Pelayanan Fasilitas Pengaduan melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) Secara Elektronik

No	Kecamatan	Kelurahan	Masyarakat yang meminta fasilitas
1	Jebres	Mojosongo	Ada ketika kelurahan masih menjadi admin ULAS, sekarang tidak ada.
2	Banjarsari	Jagalan	Belum ada
		Kauman	Belum ada
		Kadipiro	Ada ketika kelurahan masih menjadi admin ULAS, sekarang tidak ada.
3	Pasar Kliwon	Sangkrah	Belum ada
4	Laweyan	Timuran	Belum ada
		Purwosari	Ada ketika kelurahan masih menjadi admin ULAS, sekarang tidak ada.
		Laweyan	Ada ketika kelurahan masih menjadi admin ULAS, sekarang tidak ada.
5	Serengan	Tipes	Belum ada
		Danukusuman	Belum ada

Keempat, khusus bagi pengaduan *online*, formulir yang diisii berupa formulir elektronik yang tercantum di beranda *website* atau layanan aduan pada *Solo Destination*. Pengisian formulir

elektronik sudah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 mengenai Standar Operasional Prosedur. Pada formulir yang telah disediakan, pengadu harus mengisi nama, e-mail, nomor telepon,

memilih kategori aduan yang telah disediakan misalnya kategori “pemukiman”, judul aduan, isi aduan, serta lampiran aduan berupa foto permasalahan yang diadukan. Tujuan dari adanya pengisian formulir tersebut adalah agar masyarakat menyampaikan aduannya dengan benar, menggunakan bahasa yang santun dan menyampaikan aduan yang penting. Pada pelaksanaannya, masih terdapat masyarakat yang mengisi formulir dengan tidak benar. Kelonggaran pengisian formulir elektronik mengakibatkan masih adanya masyarakat yang belum bertanggung jawab dalam menyampaikan aduan. Hal tersebut disebabkan ketika masyarakat diwajibkan untuk mengisi identitas asli atau NIK (Nomor Induk Keluarga), maka mereka akan semakin takut untuk mengadu.

Identitas pengadu seperti nomor telepon, tidak semuanya ditampilkan pada ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan pengadu oleh publik. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta yang menyebutkan bahwa “terdapat jaminan keamanan dalam layanan aduan yaitu terjaminnya kerahasiaan pelapor”. Tanggung jawab masyarakat adalah memberikan aduan yang benar, jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Pengisian formulir wajib diisi, namun formulir masih bisa diisi dengan identitas palsu. Dampaknya adalah masyarakat masih bisa menyampaikan aduan yang tidak jelas. Selanjutnya, untuk

memperkuat kebenaran aduan maka pengadu harus melampirkan foto bukti aduan. Tujuannya adalah untuk membuktikan kebenaran aduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Kelima, pembentukan tanggung jawab dilakukan melalui penutupan aduan. Kegiatan ini bisa dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 A Tahun 2015 Pasal 7 mengenai kewenangan ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Upaya penutupan aduan merupakan salah satu implikasi dari penelaahan aduan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur yang menyatakan bahwa langkah kedua dalam prosedur penanganan aduan elektronik atau secara *online* yaitu Super Admin menelaah kejelasan substansi laporan kemudian disampaikan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait melalui admin OPD.

Penutupan aduan bukan merupakan filtering, karena aduan yang ditutup adalah aduan yang terlewat batas dan tidak jelas. Sebagaimana halnya ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) merupakan salah satu bentuk dari pelayanan publik, sehingga asas transparansi sangat dikedepankan. Semua aduan baik itu masukan maupun kritik akan ditampilkan di *website*. Oleh karena masyarakat bisa membacanya, maka aduan tersebut akan ditutup agar tidak ada yang mengikuti dan pengadu tidak menyampaikan aduan serupa. Pada pelaksanaannya, sistem penutupan aduan dilakukan secara manual oleh superadmin. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sistem

digital yang bisa menyaring aduan yang tidak diharapkan seperti aduan *hoax*, iklan maupun aduan *iseng*. Pada tahun 2017 aduan yang ditutup sejumlah 17 aduan. Sementara itu, pada tahun 2018 aduan yang ditutup sejumlah 78 aduan, 42 aduan yang ditutup di antaranya adalah tes aduan dari developer atau pihak ULAS sendiri. Sisanya yaitu 36 aduan yang ditutup pada tahun 2018 adalah aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Dampak dari adanya penutupan aduan ini adalah membentuk tanggung jawab masyarakat agar lebih memahami aturan digital dalam menyampaikan pendapat.

Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan upaya-upaya dalam pembentukan hak dan tanggung jawab khususnya hak dan

tanggung jawab digital dalam menyampaikan pendapat yang meliputi pemerataan hak menyampaikan aduan melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) serta pembentukan tanggung jawab masyarakat dalam memahami aturan digital dan membantu orang lain untuk mendapatkan haknya. Evaluasi atas keberjalanan ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) dalam upaya membentuk hak dan tanggung jawab digital masyarakat dalam menyampaikan aduan dilaksanakan selama tiga bulan sekali.

Berikut tabel pelaksanaan strategi pemenuhan hak warga negara menyampaikan pendapat dalam rangka *digital citizenship* melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta):

No	Strategi	Tujuan	Pelaksanaan
1	Penyediaan Website	Pemenuhan hak digital (memudahkan masyarakat menyampaikan aduan dengan menyediakan saluran digital, sehingga bisa dilaksanakan dimana saja dan kapan saja)	Penyediaan <i>website</i> sangat membantu masyarakat dalam menyampaikan aduan, namun respon dari admin dinilai cukup lama oleh masyarakat.
2	Sosialisasi	Pemenuhan hak digital (pengenalan dan cara penggunaan media digital ULAS dalam menyampaikan pendapat) Pembentukan tanggung jawab digital (menyampaikan kembali sosialisasi dan membantu masyarakat yang lain menggunakan ULAS)	Sosialisasi sebagai pengenalan serta informasi cara menggunakan media digital ULAS sudah optimal. Namun, dalam pembentukan tanggung jawab, masih belum maksimal karena tidak tercantum di dalam materi.
3	Tersedianya Fasilitas Kelurahan	Pemenuhan hak digital (meratakan hak menyampaikan pendapat	Pelaksanaan fasilitasi kelurahan dalam membantu masyarakat meratakan hak menyampaikan

		melalui media digital ULAS bagi masyarakat yang tidak bisa membaca, menulis, serta tidak mempunyai akses internet)	pendapat melalui media digital ULAS masih belum maksimal karena masih sedikit masyarakat yang memanfaatkannya.
4	Formulir Elektornik Bagi Pengadu	Pembentukan tanggung jawab digital (agar masyarakat menyampaikan aduan dengan santun, benar dan penting)	Terdapat masyarakat yang menjadi lebih berhati-hati dalam menyampaikan aduan, namun juga masih terdapat masyarakat yang menyampaikan aduan dengan bahasa tidak santun maupun menyampaikan aduan kurang penting karena identitas dapat dipalsukan.
5	Penutupan Aduan	Pembentukan tanggung jawab digital (agar masyarakat memahami atauran penggunaan media digital dengan menyampaikan aduan secara santun, benar dan aduannya penting)	Pada pelaksanaannya, penutupan aduan cukup berhasil dalam meminimalisir masyarakat lain untuk <i>ikut-ikutan</i> menyampaikan aduan yang tidak benar sebagaimana yang telah ditutup oleh super admin

Selanjutnya, Wahab dan Sapriya (2011:118) menjelaskan bahwa salah satu isu kewarganegaraan yaitu adanya peningkatan komunikasi internasional yang telah mengantarkan HAM dan kebebasan yang begitu cepat meluas. Kebebasan berkekspresi dalam menyampaikan pendapat khususnya melalui media digital perlu mendapat perhatian khusus dalam proses berwarganegara. Pada prosesnya, perlu adanya *citizenship education* yang tidak hanya diberikan di sekolah. Sebagai pendidikan non formal, bukan hanya melalui pemberian materi namun juga secara praktik, khususnya melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) yang sudah *terinclude* pada

pelaksanaan penanganan aduan. Hal tersebut sesuai dengan alasan adanya kajian mengenai *digital citizenship* menurut *Microsoft fostering* yaitu dimana masyarakat harus mengembangkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab personal untuk menciptakan kebaikan dan keputusan etis dalam dunia digital.

Tujuan adanya *citizenship education* adalah membentuk hak dan tanggung jawab masyarakat yaitu *digital right and responsibilities* sebagai elemen dari *digital citizenship*. Hasil akhirnya adalah sangat berguna dalam membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) dalam menggunakan haknya. Khususnya warga negara digital yang baik (*good digital citizenship*).

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian, ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) merupakan upaya untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab di mana hal tersebut merupakan salah satu cermin pemenuhan tanggung jawab negara (*civic responsibilities*). Menghargai hak orang lain untuk melakukan aduan, melakukan kontrol dan komunikasi dengan Pemerintah Kota Surakarta, serta menyampaikan aduan yang benar merupakan contoh dari *civic responsibilities*.

Apabila kita dasarkan pada teori perolehan hak oleh Joel Feinberg bahwa "*all duties entail people's rights and all rights entail other people's duties*". Semua kewajiban memerlukan hak orang lain dan semua hak memerlukan kewajiban orang lain. Pemerintah berkewajiban memenuhi hak masyarakat dalam menyampaikan aduan, begitu juga masyarakat berkewajiban memberikan aduan yang benar kepada pemerintah. Kewajiban tersebut sudah menjadi tanggung jawab pengadu. Kewajiban konkrit yang terlihat adalah dengan syarat mengisi formulir dan langkah-langkah pengaduan dengan benar. Selain itu, masyarakat Kota Surakarta memiliki hak menyampaikan aduan melalui media digital dan mereka juga berkewajiban membantu masyarakat lain dalam mendapatkan haknya untuk menyampaikan aduan melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) kepada pemerintah.

Hambatan Pemenuhan Hak Warga Negara Menyampaikan

Pendapat dalam Rangka Digital Citizenship Melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta)

1. Hambatan Internal.

Hambatan pertama yaitu masih adanya sistem manual pada sistem digital. Penutupan aduan yang tidak jelas bukan sistem digital yang melakukan. Namun super admin yang mempunyai kewenangan. Berarti yang melakukan penutupan aduan adalah manusia. Sehingga dimungkinkan adanya *human error* maupun aduan yang seharusnya tertutup belum tertutup. Meskipun sistem pun juga belum ada yang bersifat menyaring aduan tidak jelas maupun *hoax*. Solusinya adalah admin setiap hari mengamati website ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) dan secara jeli meneliti satu per satu aduan. Hambatan kedua, terdapat Admin ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) yang kurang menguasai teknologi. Admin ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan terkait pengoperasiannya. Sementara itu, setiap orang mempunyai kemampuan dan permasalahan yang berbeda dalam melaksanakan pekerjaan sebagai admin. Misalnya terdapat admin yang belum fasih dalam penguasaan teknologi digital yang dapat menghambat pelayanan aduan. Solusi yang diterapkan oleh ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) adalah adanya evaluasi triwulan. Pada evaluasi tersebut membahas mengenai kesulitan admin dalam melakukan

pelayanan, apakah ada kerusakan sistem atau kesulitan mengakses dan sebagainya.

2. Hambatan Eksternal. Hambatan pertama adalah terbatasnya anggaran. Anggaran penyelenggaraan ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) tercantum dalam APBD. Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan cukup besar, mulai dari biaya pelayanan, pembaharuan sistem, biaya kegiatan dan sebagainya, sedangkan APBD terbatas. APBD yang didapat dipilah untuk membiayai banyak hal sehingga harus terdapat prioritas. Anggaran yang terbatas tidak memungkinkan untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat per RT atau per RW secara langsung. Solusinya, pelaksanaan sosialisasi ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) hanya mengundang tokoh-tokoh yang dianggap penting dan dekat dengan masyarakat. Harapannya mereka akan menyampaikan kembali apa yang didapatnya. Hal tersebut dapat meminimalisir anggaran yang digunakan untuk sosialisasi. Hambatan kedua adalah terhentinya sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi hanya terhenti ketika pihak ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) memberikan sosialisasi. Masyarakat yang kurang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan cenderung kurang mengetahui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Akibatnya, pemenuhan hak masyarakat dalam menyampaikan aduan melalui media digital menjadi terhambat.

Demikian perlu terdapat monitoring mengenai sosialisasi yang dilaksanakan oleh ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta). Selain itu, solusi yang diterapkan adalah menyisipkan materi mengenai ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) di setiap kegiatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) merupakan saluran partisipasi masyarakat yang digunakan dalam menyampaikan aduan dan aspirasi kepada Pemerintah Kota Surakarta. Sebenarnya, ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) mempunyai kanal elektronik dan non elektronik. Namun, kanal yang paling banyak digunakan dalam aduan satu pintu adalah kanal elektronik atau *online*, khususnya *website* dan aplikasi di *android* (*Solo Destination*) sebagaimana fokus utama penelitian ini. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi menyampaikan pendapat sudah baik. Setiap tahun jumlah aduan mengalami peningkatan. Sementara itu, tanggung jawab masyarakat dalam berpartisipasi menyampaikan aduan melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) masih kurang. Hal ini disebabkan karena masih adanya masyarakat yang menyampaikan aduan tidak jelas, spam dan menggunakan bahasa yang kurang santun. Sehingga perlu adanya pemenuhan hak warga negara menyampaikan pendapat yang

disertai pembentukan tanggung jawab agar lebih efektif.

2. Strategi pemenuhan hak warga negara menyampaikan pendapat merupakan strategi yang digunakan demi tercapainya tujuan ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) yang tercantum dalam Peraturan Walikota mengenai ULAS. Setiap strategi *terinclude* pada prosedur penanganan aduan yang terdapat pada Standar Operasional Prosedur Penanganan Aduan. Pemerintah Kota Surakarta telah melaksanakan upaya-upaya dalam pembentukan hak dan tanggung jawab, khususnya hak dan tanggung jawab digital dalam menyampaikan pendapat yang meliputi pemerataan hak menyampaikan aduan melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) serta pembentukan tanggung jawab masyarakat dalam memahami aturan digital dan membantu orang lain untuk mendapatkan haknya. Strategi pemenuhan hak warga negara menyampaikan pendapat dalam rangka *digital citizenship* melalui ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) sebagai berikut: a) Penyediaan *website*; b) Sosialisasi; c) Tersedianya Fasilitas Kelurahan; d) Formulir Elektronik Bagi Pengadu; e) Penutupan Aduan.

Strategi yang dilaksanakan cukup berhasil sebagai wadah pemenuhan hak masyarakat dalam berpartisipasi menyampaikan aduan melalui media digital. Terlihat dari semakin meningkatnya jumlah aduan setiap tahun. Pada pembentukan

tanggung jawab, aduan kurang sopan dan aduan tidak jelas dapat diminimalisir sehingga masyarakat lain tidak mengikutinya. Namun, aduan yang ditutup masih mengalami peningkatan. Selain itu, juga masih terdapat masyarakat yang telah membantu orang lain dalam menyampaikan aduannya.

3. Hambatan pemenuhan hak warga negara menyampaikan pendapat dalam rangka *digital citizenship* pada ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) meliputi: 1) hambatan internal yaitu masih adanya sistem manual pada sistem digital dan masih adanya admin yang kurang fasih dalam menggunakan teknologi; 2) hambatan eksternal yaitu terbatasnya anggaran dan terhentinya sosialisasi.

SARAN

1. Pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan Dinas Komunikasi, Informasi, Statistika dan Persandian supaya mengedukasi masyarakat mengenai etika dalam menyampaikan aduan, saran dan kritik melalui media digital dalam setiap sosialisasi.
2. Pihak ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) supaya mempergunakan anggaran yang terbatas dengan efektif dan efisien. Memasifkan sosialisasi melalui berbagai media sosial agar masyarakat mengetahui pentingnya ULAS (Unit Layanan Aduan Surakarta) serta untuk meminimalisir anggaran sosialisasi.

3. Masyarakat Kota Surakarta supaya lebih antusias serta bersedia membantu masyarakat lain dalam berpartisipasi menyampaikan aduan, saran dan kritik kepada Pemerintah Kota Surakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nor Aslamiah. *Digital Citizens: Adab dan Tanggungjawab* (Jurnal Bil.47 November 2015). Malaysia: Pusat Teknologi Maklumat Komunikasi
- APJII. (2017). *Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia: Survey 2017* yang diakses pada <http://www.APJII.go.id> tanggal 28 Agustus 2018
- Ferrari dan Martens. (2016). *Growing Digital Citizens*. Belgia : European Schoolnet, Central Support Service for eTwinning
- Cholisin. 2010. *Handout: PKN (Civic Education) Sebagai Pendidikan Politik, Pendidikan Demokrasi, dan Pendidikan HAM* yang diakses pada <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pendidikan/PKN%20BSBG2BPOLITIK,%20DEMOKRASI,%20BHAM,DSB.%20BMARET%202010.doc> tanggal 31 Januari 2018
- Mossberger, Telbert, and Neal. (2008). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*. London England :The MIT Press Cambridge, Massachusetts
- Miles and Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode- Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Rahadi, Dedi Rianto. (2017). *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial*. Jurnal MDK Vol.5 No.1, 2017 yang diakses melalui <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/download/1342/933>
- Subdit IT dan Cybercrime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. (2015). *Laporan Ujaran Kebencian* yang diakses pada <http://nasional.kompas.com/read/2017/03/26/08465611/2016.konten.berisi.ujaran.kebencian.paling.banyak.diadukan.ke.polisi.tanggal.Februari.2018>
- Sumarto, Hetifah Sj. (2004). *Inovas, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa*

**STUDI TENTANG CIVIC DISPOSITION PADA KELAS DIGITAL (DIGITAL CLASS)
DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
DI SMA N 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018)**

Lisa Agustini*, Rini Triastuti, Winarno
Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta

*Email : lisaagustini61@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine: 1) Civic disposition in the digital class (digital class) in learning Pancasila and Citizenship Education at SMA N 6 Surakarta academic year 2017/2018; 2) Digital class constraint in developing civic disposition on learning Pancasila and Citizenship Education at SMA N 6 Surakarta academic year 2017/2018. This study uses a qualitative approach reinforced with quantitative data and case study methods. Data collection using observation, interview, documentation and questionnaire. Testing data validity using triangulation data and triangulation method. Data analysis using interactive analysis model. Conclusion of the results of the study: 1) Civic disposition of digital class students in the learning of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) in SMA N 6 Surakarta in the 2017/2018 school year with the results of questionnaires that showed a tendency to 'good' attitude in learning PPKn, with 70% details students have a tendency to 'good' attitude, 26% of students have a tendency to be 'praiseworthy', and the remaining 4% of students have a 'sufficient' attitude. 2) Digital class constraints in developing civic dispositions can be grouped into two, namely: a) Internal constraints that are constraints that originate from the individual itself or constraints from within. In this case related to the condition of the self has not been able to utilize technology in digital class appropriately, lack of awareness in digital class students, lack of confidence and the influence of habits that are difficult to change in digital class students; b) External or external constraints. These constraints relate to things such as lack of mastery of teachers on technology, lack of socialization and training from schools or related institutions about how to be smart and good students in using technology in digital classes, the methods used in PPKn learning in digital classes almost same as ordinary class, infrastructure that has not been supported in digital class, teacher supervision is less stringent so it allows students to use technology for things that are not good and the absence of written rules in digital class.*

Keywords: *Digital Class, Civic Disposition, Learning, PPKn*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan memiliki makna sebagai proses dalam hal belajar mengajar yang tidak hanya sekedar meliputi kegiatan antara siswa dan guru di kelas. Sudah seharusnya pendidikan

tidak hanya mengenal arti kelas secara konvensional yaitu sebagai proses pembelajaran yang hanya terfokus pada kegiatan guru dan siswa akan tetapi dapat diartikan secara komprehensif. Dewasa ini pembelajaran yang baik meliputi kegiatan belajar mengajar yang ikut

berperan dalam menginternalisasi nilai-nilai moral pada siswa untuk membentuk watak kewarganegaraan (Rahmelia, 2015: 1).

Era digital merupakan hal yang tidak dapat dihindari lagi dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat. Menjadi suatu keharusan dan sangat penting untuk mempersiapkan warga negara dalam memasuki era digital. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membekali warga negara melalui pendidikan di sekolah, masyarakat, serta keluarga. Oleh karena itu, kemajuan teknologi di era digital ini menjadi isu aktual dalam kajian kewarganegaraan, terutama tentang bagaimana menanamkan karakter agar menjadi warga negara digital yang cerdas, baik, serta bijaksana dalam menggunakan teknologi (Feriyansyah, 2014: 5).

Kemajuan teknologi yang semakin canggih ini seharusnya disertai dengan usaha pencerdasan warga negara dalam menggunakan TIK. Program pendidikan diharapkan mampu mencerdaskan warga negara dalam kehidupan digital menjadi hal yang sangat penting. PKN diharapkan sebagai salah satu program yang mempersiapkan warga negara muda untuk memasuki masyarakat digital dapat mengambil peran yang strategis. Dalam hal ini, pengaruh kemajuan di bidang TIK terhadap kehidupan warga negara menjadi lahan garapan baru keilmuan PKN dalam usaha mempersiapkan warga negara muda untuk memasuki masyarakat digital. Program PPKn di sekolah bertanggung jawab agar dapat menciptakan warga negara digital yang berintelektual dan berperilaku baik (Feriyansyah, 2014: 6).

Berdasarkan berita harian Joglo Semar (12/02/2016), SMA N 6 Surakarta merupakan salah satu SMA di kota Surakarta yang ditunjuk sebagai penggerak embrio program kelas digital. Berkaitan dengan pengembangan kelas digital di sejumlah sekolah yang difasilitasi oleh Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Centre (Seamolec) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Terdapat lima SMA di Surakarta yang ditunjuk sebagai penggerak program kelas digital. Kelima sekolah tersebut yaitu SMA Negeri 1 Surakarta, SMAN 5 Surakarta, SMAN 6 Surakarta, SMA Batik 1 Surakarta, dan SMA Regina Pacis.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis TIK pada kelas digital telah lama diterapkan di SMA N 6 Surakarta. Pemanfaatan TIK di kelas digital ini tidak hanya menggunakan komputer saja. Namun, SMA N 6 Surakarta telah mengembangkan jaringan sendiri untuk mengakses setiap informasi terkait materi atau bahan pembelajaran. Dalam hal ini, siswa menggunakan internet sebagai sumber belajar, kemudian mengirim pekerjaan rumah dengan email, diskusi kelas, menggunakan aplikasi edmodo dalam pembelajaran, hingga UJON (*Ujian Online*). Penerapan kelas digital di SMA N 6 Surakarta terdapat pada kelas X MIPA 1, X IPS 1, XI MIPA 1, dan XI IPS 1.

Berdasarkan observasi awal peneliti selama magang kependidikan 3 yaitu pada bulan Oktober-November 2017 di SMA N 6 Surakarta terdapat permasalahan di kelas digital, yaitu kelas XI IPS 1. Kelas XI IPS 1 merupakan kelas digital yang sistem pembelajarannya

dengan memanfaatkan teknologi. Siswa kelas digital diperbolehkan untuk menggunakan laptop dalam setiap pembelajaran. Akan tetapi, hal tersebut justru digunakan siswa untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Misalnya guru menyuruh siswa untuk mencari kasus tentang pelanggaran hukum dan ternyata disela-sela mencari tugasnya, siswa juga membuka aplikasi *game online*, *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, *path*, dan sebagainya di laptop maupun perangkat teknologi lain yang mereka miliki. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kurang mampu membatasi diri dengan limpahan teknologi yang mereka miliki. Selain itu, sarana dan prasarana yang belum memadai; guru mata pelajaran yang belum sepenuhnya menguasai teknologi; metode pengajaran guru yang masih sama dengan kelas reguler; serta kurangnya sosialisasi dan pelatihan baik dari sekolah maupun pemerintah setempat tentang bagaimana menjadi siswa yang cerdas dan baik dalam menggunakan teknologi menjadi kendala dalam pembelajaran di kelas digital. Kendala tersebut menjadikan kegiatan belajar mengajar pada kelas digital menjadi kurang optimal dan pada akhirnya dapat mendorong siswa berbuat berbagai hal yang tidak diperbolehkan seperti fokus pada aplikasi laptop atau bebas mengakses teknologi yang mereka miliki selama pelajaran berlangsung.

Sesuai dengan permasalahan di atas menunjukkan bahwa siswa belum mampu mengembangkan karakter disiplin, jujur, dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Disiplin merupakan suatu perbuatan yang menunjukkan pada perilaku tertib pada berbagai peraturan. Jujur adalah

suatu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan serta tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Kemendiknas, 2010: 9-10).

Tujuan penelitian untuk mengetahui *civic disposition* pada kelas digital (*digital class*) dalam pembelajaran PPKn di SMA N 6 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 dan kendala kelas digital (*digital class*) dalam mengembangkan *civic disposition* pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun manfaat penelitian ini adalah dari segi teoritis yakni diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Khususnya sebagai pembanding bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang *civic disposition* pada kelas digital (*digital class*). Kemudian dari segi praktis adalah sebagai acuan bagi sekolah-sekolah khususnya sekolah yang telah menerapkan kelas digital (*digital class*) dalam proses pembelajaran serta bagi guru agar dapat dijadikan saran untuk selalu membentuk karakter peserta didiknya yang mampu menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi guru sebagai seorang pendidik.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data-data yang menunjang penelitian

ini. Tempat dan waktu penelitian dalam hal ini dilakukan di SMA N 6 Surakarta. Waktu penelitian dilaksanakan setelah mendapat perijinan dari pihak berwenang. Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan yaitu November sampai Juni 2018 yang dimulai dari tahap penyusunan proposal, ijin penelitian, pengumpulan data, analisis data sampai penyusunan laporan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan diperkuat data kuantitatif. Secara definisi penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan pada proses, yang diambil dari fenomena yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menitikberatkan pada hasil yang dikerjakan dengan sistem statistik yang menghasilkan data berupa angka.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena format penelitian dalam bentuk studi kasus. Menurut Burhan Bungin (2008: 69) deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian *eksplorasi* dan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam.

Adapun data dalam penelitian ini terkait dengan *civic disposition* siswa kelas digital yang meliputi karakter jujur, disiplin, dan tanggung jawab serta data tentang kendala kelas digital dalam mengembangkan *civic disposition*. Sumber data penelitian ini berupa informan,

tempat dan peristiwa, dokumen dan arsip. Penggalan informasi akan dilakukan kepada segenap warga SMA N 6 Surakarta seperti: Kepala Sekolah (Agung Wijayanto, S.Pd., M.Pd), Koordinator Program Pendidikan Karakter (guru BK), guru PPKn (Sinung Sri Mulyaningsih, S.Pd), dan beberapa siswa kelas digital (Kelas X MIPA 1, X IPS 1, XI MIPA 1, dan XI IPS 1). Tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu di SMA N 6 Surakarta yang berada di Jl. Mr. Sartono No. 30, Nusukan, Banjarsari, Surakarta. Peristiwa dalam penelitian ini adalah tentang *civic disposition* pada kelas digital (*digital class*) dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA N 6 Surakarta. Dokumen dalam penelitian ini adalah peraturan atau tata tertib, catatan-catatan guru PPKn, foto-foto kegiatan pembelajaran kelas digital (*digital class*), visi misi, slogan dan lain sebagainya.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan dan masalahnya secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Peneliti mengambil sampel dengan memilih beberapa pendidik dan siswa kelas digital yang sekiranya dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai masalah yang akan diteliti yaitu tentang *civic disposition* pada kelas digital (*digital class*) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA N 6 Surakarta.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

menggunakan empat teknik yaitu wawancara, observasi (pengamatan), studi dokumentasi, dan dilengkapi oleh angket. Peneliti turut menggunakan angket sebagai salah satu instrumen dalam pengumpulan data awal sebelum ditindaklanjuti dengan wawancara secara mendalam, karena paradigma utama dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sehingga paradigma kuantitatif hanya berfungsi sebagai pelengkap saja bukan pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif.

Untuk mengetahui valid tidaknya data maka diperlukan uji keabsahan data (validitas). Validitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan triangulasi data. Data *triangulation* (triangulasi dalam hal metode pengumpulan data). Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode karena untuk menutup kemungkinan apabila ada kekurangan data dari salah satu sumber atau salah satu metode, maka dapat dilengkapi dengan data dari sumber atau metode lain.

Analisis data dalam penelitian ini berupa data kualitatif dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi, kemudian digunakan pula analisis data kuantitatif dalam mengolah data angket yang disertai dengan pengukuran sikap yang didapatkan. Analisis data kuantitatif dilakukan untuk data yang terkumpul melalui angket dengan menggunakan analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan masing-masing variabel yang telah ditentukan yaitu jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Analisis data kualitatif terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang berpengaruh dalam membentuk karakter kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan tujuan PPKn yang termuat dalam Naskah Akademi Kajian Kurikulum PPKn bahwa pada hakikatnya pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengarahkan pada terbentuknya warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Idealisme pembentukan watak atau peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertanggung jawab secara filosofis, sosio-politis dan psikopedagogis merupakan misi suci (*mission secre*) dari PPKn. Karakter kewarganegaraan terbentuk ketika telah berkembang pada dirinya pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Pendidikan bukan hanya sekedar untuk mentransfer ilmu dan keterampilan, tetapi juga merupakan internalisasi sikap dan nilai dasar seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab.

Adapun ketiga karakter yang menjadi fokus dalam penelitian ini menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum oleh Kementerian Pendidikan Nasional (2010: 40-41) adalah sebagai berikut:

1. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan.

2. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib pada berbagai ketentuan dan peraturan.
3. Tanggung Jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur sejauhmana *civic disposition* (karakter kewarganegaraan) yang meliputi sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab pada siswa kelas digital

(*digital class*) SMA N 6 Surakarta dengan menggunakan indikator. Maka dari itu karakter kewarganegaraan pada siswa kelas digital (*digital class*) SMA N 6 Surakarta dapat diukur dengan angket sebagai pendukung dalam penelitian kualitatif dan ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam.

Hasil pengukuran sikap pada 50 orang siswa kelas digital SMA N 6 Surakarta menunjukkan hasil rentang skor sebagaimana diukur menurut skala Likert, yaitu skor tertinggi 89 dan terendah 58.

Tabel 1.

Kategori Skor dan Rentang Hasil Pengukuran Sikap Siswa

%	Jumlah siswa	Interval skor	Kecenderungan sikap
26	13 orang	80-100	Terpuji
70	35 orang	65-79	Baik
4	2 orang	50-64	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, yang telah dikonversi sesuai interval skor, dapat disimpulkan bahwa siswa SMA N 6 Surakarta memiliki kecenderungan sikap 'baik' dalam pembelajaran PPKn pada kelas digital, yakni dengan rincian 70 % siswa memiliki kecenderungan sikap 'baik', 26 % siswa memiliki kecenderungan sikap 'terpuji', dan sisanya 4% siswa memiliki kecenderungan sikap 'cukup'.

Karakter terbentuk dari internalisasi nilai yang bersifat konsisten, artinya terdapat keselarasan antar elemen nilai. Pengembangan karakter kewarganegaraan menjadi hal penting yang diperhatikan dalam

PPKn, dan sekarang ini ada kurikulum pendidikan budaya dan karakter bangsa yang menjadi kurikulum baru sebagai upaya pembentukan karakter siswa. Pendidikan budaya dan karakter bangsa tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi dalam setiap mata pelajaran terutama PPKn. PPKn sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah bertanggung jawab untuk menciptakan peserta didik yang cerdas dan baik terkait misi nasionalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor *value-based education*. Oleh karena dituntut untuk melakukan pembelajaran berbasis nilai, Pendidikan Kewarganegaraan

dikembangkan pula kompetensi kewarganegaraan siswa terutama watak kewarganegaraannya (*civic disposition*). Watak kewarganegaraan ini mencakup nilai-nilai seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru PPKn, Guru Bimbingan Konseling dan beberapa siswa kelas digital terdapat kendala dalam mengembangkan *civic disposition* (jujur, disiplin, dan tanggung jawab) pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA N 6 Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018.

B. Pembahasan

Pencapaian tujuan pembelajaran PPKn selain dilihat dari hasil belajar siswa juga dilihat dari perilaku siswa sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa guru PPKn sudah mengusahakan untuk mengembangkan karakter kewarganegaraan siswa kelas digital dengan menyisipkan dan memberikan teladan serta motivasi untuk tetap bersikap baik saat pembelajaran berlangsung. Keberhasilan pembelajaran PPKn apabila dilihat dari nilai, mayoritas siswa sudah tuntas mencapai KKM tetapi sikap dan perilaku belum dapat mengimplementasikan karakter kewarganegaraan yang menjadi tujuan pembelajaran.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *blended learning* yang menyatakan bahwa *blended learning* merupakan kombinasi dari berbagai media teknologi,

kegiatan, dan jenis peristiwa untuk menciptakan program pelatihan yang optimal bagi peserta secara spesifik. Program pembelajaran ini menggunakan berbagai bentuk *e-learning* baik dengan instruktur pelatihan maupun format langsung. Dengan demikian *blended learning* merupakan suatu model pembelajaran yang memadukan kekuatan pembelajaran tradisional tatap muka dengan lingkungan pembelajaran elektronik (Bersin, 2004: 15).

Pembelajaran dengan *blended learning* dapat menggeser prinsip pembelajaran dari *teacher center* menuju *student center* secara dinamis. Pembelajaran *blended learning* bersifat saling melengkapi kekurangan pembelajaran *face to face learning* dan *e-learning*. Pembelajaran dengan *face to face learning* ini guru mampu memfungsikan dirinya sebagai pendidik dan memberikan dorongan motivasi secara langsung dan ekspresif kepada siswa (Izzudin, 2012: 11).

Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat bahwa kelas digital di SMA N 6 Surakarta menggunakan pembelajaran *blended learning* dimana pembelajaran yang memadukan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi dengan pembelajaran berbasis kelas atau tatap muka. Dalam hal ini, SMA N 6 Surakarta belum sepenuhnya menerapkan kelas digital karena secara teoritis kelas digital merupakan aktivitas di dalam kelas yang menggunakan seoptimal mungkin peranan internet dan teknologi digital

dalam persiapan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran baik oleh siswa, guru, dan orang tua murid, serta untuk aktivitas pengembangan profesi guru berkelanjutan (Widiastuti, 2016: 53).

Berkaitan dengan teori di atas, kelas digital seharusnya mulai dari persiapan, pelaksanaan serta penilaian menggunakan seoptimal mungkin peranan internet dan teknologi digital namun fakta dilapangan menunjukan hal yang berbeda dimana kelas digital di SMA N 6 Surakarta belum mempersiapkan, dan melaksanakan pembelajaran PPKn dengan memanfaatkan peranan internet dan teknologi dengan seoptimal mungkin namun sudah dilakukan penilaian terhadap sikap siswa selama pembelajaran berlangsung yang meliputi sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan guru atau jurnal selama pembelajaran PPKn di kelas digital.

Blended learning merupakan pembelajaran yang memadukan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi dengan pembelajaran berbasis kelas atau tatap muka. Oleh karena pembelajaran berbasis teknologi dan informasi maka siswa harus pandai mengolah sumber belajar atau informasi yang mereka dapatkan ketika pembelajaran di kelas digital khususnya mata pelajaran PPKn. Tanpa kepandaian mengolah, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak ada artinya. Hanya informasi yang diolah dengan baik yang menghasilkan pengetahuan.

Karena ketika informasi itu tidak diolah dengan baik akan membahayakan dan berujung pada penyalahgunaan. Kemudian hanyalah pengetahuan yang diolah dengan baik yang akan menghasilkan kearifan atau kebijaksanaan karena dengan pengetahuan yang baik maka akan tumbuh kebiasaan-kebiasaan baik pada diri siswa.

Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh (Ribble, 2013) tentang kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) bahwa *"Digital citizenship is a concept which helps teachers, technology leaders and parents to understand what students/ young people/technology users should know to use technology appropriately. Digital Citizenship is more than just a teaching tool; it is a way to prepare students/technology users for a society full of technology"* (<http://www.digitalcitizenship.net/>). Kewarganegaraan digital merupakan sebuah konsep yang membantu guru, tokoh teknologi, dan orang tua untuk memahami tentang murid, masyarakat muda atau pengguna teknologi dalam menggunakan teknologi yang sewajarnya. Kewarganegaraan digital lebih dari alat untuk mengajar, tetapi cara mempersiapkan siswa atau pengguna teknologi memasuki sebuah masyarakat yang penuh dengan teknologi.

Pada dasarnya setiap individu dapat dipastikan tidak akan pernah lepas dari ketergantungan kemajuan teknologi sehingga menjadi hal yang wajar ketika di dalam

pembelajaran PPKn kelas digital muncul berbagai sikap-sikap yang kurang baik. Sikap yang kurang baik tersebut merupakan wujud dari kesadaran dan pengetahuan dari siswa yang kurang dalam menggunakan teknologi yang baik dan benar. Guru sebagai aktor terpenting dalam mengembangkan karakter kewarganegaraan dapat memberikan bekal kepada siswa kelas digital tentang bagaimana memanfaatkan teknologi yang sewajarnya. Guru bukan hanya memberikan aspek kognitifnya saja tetapi juga mampu menginternalisasikan sikap-sikap yang baik ketika pembelajaran berlangsung sehingga siswa tidak memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu, lingkungan berbasis TIK memang telah berperan besar dalam dunia pendidikan. Demikian halnya dalam tataran aplikatif seperti proses belajar mengajar yang melibatkan guru dan siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Setelah mengetahui hasil penelitian terhadap para informan, dapat diketahui bahwa beberapa siswa kelas digital yang belum mengembangkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) disebabkan oleh kendala yang berasal dari dalam dan dari luar.

Kendala dari dalam diri siswa kelas digital (internal) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Siswa belum mampu memanfaatkan teknologi di kelas digital (HP dan laptop) dengan tepat guna

Kendala internal atau dalam diri siswa dalam mengembangkan *civic disposition* pada kelas digital adalah belum mampunya sebagian siswa kelas digital dalam memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Kelas digital memang merupakan aktivitas di dalam kelas yang menggunakan seoptimal mungkin peranan internet dan teknologi digital dalam persiapan, pelaksanaan, penilaian pembelajaran baik oleh siswa, guru, dan orang tua murid, serta untuk aktivitas pengembangan profesi guru berkelanjutan. Namun, dengan keunggulan yang dimiliki oleh kelas digital yaitu diperbolehkan menggunakan teknologi (HP atau laptop) saat pembelajaran berlangsung ternyata masih disalahgunakan oleh sebagian siswa untuk membuka aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Youtube, *game online*, membuka video atau film dan lain sebagainya. Dalam hal ini, siswa belum sepenuhnya mengetahui tentang penggunaan teknologi yang tepat guna saat pembelajaran PPKn berlangsung di kelas digital.

- 2) Kurangnya kesadaran dalam diri siswa kelas digital

Kendala lainnya yaitu kurangnya kesadaran dari siswa akan pentingnya pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagian siswa kelas digital menganggap bahwa pelajaran PPKn tidak begitu penting,

sulit, dan banyak hafalan. Kecenderungan tersebut membuat siswa kurang antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran PPKn di kelas digital sehingga seringkali siswa memanfaatkan teknologi (HP atau laptop) yang mereka miliki untuk hal-hal yang kurang baik.

3) Kurangnya rasa percaya diri siswa kelas digital

Kendala selanjutnya yaitu kurangnya rasa percaya diri siswa kelas digital dalam hal mengemukakan suatu pendapat. Hal tersebut tentu menghambat jalannya proses belajar mengajar karena kelas yang memanfaatkan teknologi seharusnya dapat berperan aktif selama pembelajaran PPKn berlangsung karena siswa kelas digital dapat menggunakan teknologi (HP atau laptop) yang mereka miliki untuk *browsing* terkait isu-isu aktual yang kemudian diskusikan bersama-sama. Akan tetapi, di kelas digital ini sebagian siswa terlihat masih sungkan untuk mengemukakan suatu pendapat di depan banyak orang dengan alasan takut dan tidak percaya diri atas pendapat yang mereka miliki.

4) Pengaruh kebiasaan yang sulit berubah pada siswa kelas digital

Kendala internal atau dalam diri yang terakhir adalah pengaruh kebiasaan yang sulit berubah. Kebiasaan ini memang sudah melekat pada diri siswa sehingga untuk merubahnya perlu proses yang cukup lama. Misalnya siswa seringkali mengakses internet

untuk membuka aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Youtube di HP atau laptop yang mereka miliki. Hal tersebut dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan atau ketergantungan yang melekat pada diri sebagian siswa kelas digital sehingga sulit untuk diubah. Contoh lainnya, siswa bermain *game online* (bola) atau mencari berita-berita diluar pelajaran PPKn karena memang sudah mania atau pencinta bola yang berlebihan dari sebagian siswa kelas digital.

Adapun kendala dari luar (eksternal) diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Penguasaan guru terhadap teknologi masih kurang

Kendala eksternal dalam mengembangkan *civic disposition* pada kelas digital adalah penguasaan guru terhadap teknologi yang masih kurang. Pada dasarnya untuk memaksimalkan implementasi kelas digital di sekolah dibutuhkan guru yang memiliki penguasaan teknologi yang tinggi karena untuk mengimbangi siswa yang sudah melek dengan teknologi. Guru dengan penguasaan teknologi yang baik sangat dibutuhkan dalam kelas digital ini mengingat kemampuan siswa kelas digital terhadap teknologi yang sudah baik harus diselaraskan dengan kemampuan guru yang baik pula. Ketika penguasaan guru terhadap teknologi kurang tentu akan menghambat *civic disposition* siswa misalnya guru sudah difasilitasi dari sekolah

untuk menggunakan teknologi saat pembelajaran berlangsung tetapi justru memilih untuk menjelaskan materi dari LKS atau buku PPKn.

- 2) Kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari sekolah atau instansi terkait tentang bagaimana menjadi siswa yang cerdas dan baik dalam menggunakan teknologi di kelas digital

Kendala eksternal lainnya yaitu kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari sekolah atau instansi terkait tentang bagaimana menjadi siswa yang cerdas dan baik dalam menggunakan teknologi di kelas digital. Sosialisasi atau pelatihan ini sebenarnya sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman awal bagi siswa kelas digital sehingga penyalahgunaan teknologi saat pembelajaran dapat diminimalisir. Siswa perlu tahu apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan saat memanfaatkan teknologi di kelas digital. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan ini membuat siswa kurang memperhatikan apa saja yang seharusnya tidak dilakukan ketika pembelajaran berlangsung dikelas digital.

- 3) Metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran PPKn di kelas digital hampir sama dengan kelas biasa
Kendala eksternal selanjutnya yaitu metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran PPKn di kelas digital hampir sama dengan kelas biasa. Pada

dasarnya tidak ada suatu keharusan atau kewajiban guru harus menggunakan metode yang berbeda antara kelas digital dengan kelas biasa namun dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh sekolah untuk kelas digital haruslah dimanfaatkan seoptimal mungkin. Guru disini bisa menggunakan teknologi di kelas digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran misalnya aktif dengan aplikasi edmodo untuk *sharing* materi, pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Guru seringkali menggunakan metode yang sama dengan kelas-kelas lainnya yaitu ceramah dan menjelaskan materi dengan LKS atau buku paket PPKn.

- 4) Sarana prasarana yang belum mendukung di kelas digital
Kendala eksternal berikutnya yaitu sarana prasarana yang belum mendukung di kelas digital. Sarana prasarana disini seperti akses jaringan yang lambat sehingga siswa harus menggunakan data internet sendiri-sendiri ketika disuruh mengerjakan tugas dari guru dan menyebabkan siswa dalam menyelesaikan tugas membutuhkan waktu yang cukup lama, layar putih untuk LCD belum dipasang sehingga tulisan tidak terlihat dan menyebabkan siswa dibagian belakang tidak melihat apa yang dipresentasikan di depan akhirnya siswa mencari kesibukan yang lain. Dalam hal ini, kelas digital di SMA N 6 Surakarta bukanlah kelas digital seperti lab yang

menggunakan AC, karpet, LCD dengan segala fasilitas menunjang lainnya.

- 5) Pengawasan guru yang kurang ketat sehingga memungkinkan siswa memanfaatkan teknologi (HP atau laptop) untuk hal-hal yang kurang baik

Kendala eksternal yang lainnya yaitu pengawasan guru yang kurang ketat sehingga memungkinkan siswa memanfaatkan teknologi (HP atau laptop) untuk hal-hal yang kurang baik. Pengawasan disini maksudnya yaitu guru kurang menguasai semua siswa kelas digital dimana posisi guru seringkali hanya di depan saja tanpa berputar-putar mengelilingi siswa yang sedang menggunakan teknologi saat pembelajaran berlangsung. Pengawasan yang kurang dari guru membuat siswa bebas untuk melakukan apa saja asalkan tidak ketahuan guru yang bersangkutan.

- 6) Belum adanya tata tertib secara tertulis di kelas digital

Kendala eksternal yang terakhir adalah belum adanya tata tertib secara tertulis di kelas digital. Sebenarnya tata tertib atau aturan disini mempunyai esensi yang sangat penting dalam mengembangkan *civic disposition* siswa kelas digital dimana ketika ada landasan yang kuat dari sebuah bangunan maka akan lebih mudah menyokong keberhasilan sebuah program. Begitu juga dengan kelas digital ini, tata tertib sangat dibutuhkan mengingat di dalam tata tertib tersebut berisikan

apa saja yang harus ditaati oleh siswa sehingga pelanggaran akan dapat diminimalkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa kelas digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA N 6 Surakarta tahun ajaran 2017/2018 masih belum sepenuhnya terbentuk dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil angket yang kemudian ditindaklanjuti dengan wawancara mendalam. Hasil angket menunjukkan bahwa siswa kelas digital SMA N 6 Surakarta sudah memiliki kecenderungan sikap 'baik' dalam pembelajaran PPKn, yakni dengan rincian 70 % siswa memiliki kecenderungan sikap 'baik', 26 % siswa memiliki kecenderungan sikap 'terpuji', dan sisanya 4 % siswa memiliki kecenderungan sikap 'cukup'. Namun, setelah dilakukan wawancara secara mendalam kepada 13 siswa kelas digital ternyata masih banyak yang mengungkapkan sikap kurang baiknya saat pembelajaran PPKn berlangsung di kelas digital seperti sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Adanya perbedaan hasil angket dengan wawancara mendalam adalah siswa ketika menjawab di angket cenderung memilih yang baik namun ketika di wawancarai secara mendalam justru siswa mengatakan keadaan yang sebenarnya.

SMA N 6 Surakarta sudah menerapkan pendidikan budaya

dan karakter bangsa yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran terutama yang peneliti kaji yaitu dalam PPKn tetapi masih ada siswa kelas digital yang melakukan penyalahgunaan penggunaan teknologi di kelas digital. Hal tersebut dikarenakan siswa belum sepenuhnya mengembangkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab saat mengikuti pembelajaran PPKn. Adapun kendala kelas digital dalam mengembangkan *civic disposition* dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu (1) kendala internal yaitu kendala yang berasal dari individu itu sendiri atau kendala dari dalam. Dalam hal ini berkaitan dengan kondisi diri belum mampu memanfaatkan teknologi di kelas digital (HP dan laptop) dengan tepat guna, kurangnya kesadaran dalam diri siswa kelas digital, kurangnya rasa percaya diri serta pengaruh kebiasaan yang sulit berubah pada siswa kelas digital. (2) kendala eksternal atau luar. Hal ini berkaitan dengan hal-hal seperti penguasaan guru terhadap teknologi masih kurang, kurangnya sosialisasi dan pelatihan dari sekolah atau instansi terkait tentang bagaimana menjadi siswa yang cerdas dan baik dalam menggunakan teknologi di kelas digital, metode yang digunakan dalam pembelajaran PPKn di kelas digital hampir sama dengan kelas biasa, sarana prasarana yang belum mendukung di kelas digital, pengawasan guru yang kurang ketat sehingga memungkinkan siswa memanfaatkan teknologi (HP atau laptop) untuk hal-hal yang kurang baik serta belum

adanya tata tertib secara tertulis di kelas digital.

2. Saran

- a. Bagi sekolah, kelas digital di SMA N 6 Surakarta perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya baik dari aturan, sarana prasarana atau infrastruktur, kompetensi guru di bidang IT untuk menunjang implementasi kelas digital di Kota Surakarta. Selain itu, untuk mewujudkan kelas digital yang sesuai dengan teori maka sekolah perlu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian dengan menggunakan seoptimal mungkin peranan internet dan teknologi digital dalam pembelajaran khususnya mata pelajaran PPKn.
- b. Bagi guru PPKn saat mengajar pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas digital sebaiknya menekankan pada aspek afektif karena sikap disini penting untuk ditekankan oleh guru PPKn mengingat kelas digital merupakan kelas yang menggunakan seoptimal mungkin peranan internet dan teknologi dalam pembelajarannya. Selain itu, kelas digital dengan limpahan teknologi yang ada memungkinkan siswa untuk melakukan hal-hal yang kurang baik. Guru PPKn harus menyisipkan sikap-sikap yang baik terkait misi nasionalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui koridor *value-based education*. Selain itu, guru perlu menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) secara terpadu

dan sistematis untuk pembelajaran PPKn di kelas digital karena menyusun RPP merupakan tugas pokok yang harus dilakukan dari seorang guru sebelum melakukan pembelajaran di kelas.

- c. Bagi siswa kelas digital sebaiknya memanfaatkan teknologi (Laptop/HP) sebagai pemicu dalam meningkatkan prestasi belajar. Kemudian tidak hanya itu, karakter dan kepribadian diri harus senantiasa dikembangkan melalui penggunaan TIK secara tepat dan baik. Misalnya dalam mengolah informasi dari internet harus membiasakan diri untuk mencantumkan sumber informasi yang didapat. Hal ini ditujukan agar dapat meningkatkan karakter jujur pada diri siswa, sehingga tidak lantas menjadikan informasi mentah dari internet tanpa dicantumkan sumbernya dan tanpa dianalisis terlebih dahulu. Selain itu, ketika ulangan atau ujian berlangsung usahakan untuk tidak memanfaatkan teknologi untuk menyontek atau bekerja sama dengan teman yang lainnya. Saat pembelajaran berlangsungpun sebaiknya teknologi (HP atau laptop) digunakan untuk hal-hal yang baik seperti *browsing* materi atau mencari isu-isu PPKn aktual yang dapat didiskusikan bersama dikelas.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang dilakukan ini kemungkinan dirasa belum cukup memuaskan bagi peneliti sendiri maupun civitas akademika lainnya. Oleh

karena itu, perlu pengkajian mengingat berbagai kelemahan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan di antaranya adalah belum memasukkan variabel lain yang diperkirakan dapat memengaruhi *civic disposition* pada siswa kelas digital. Variabel lain yang diduga dapat memengaruhi *civic disposition* misalnya kompetensi guru, lingkungan belajar, dan komitmen sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Bersin, Josh. (2004). *The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies, and Lessons Learned*. San Francisco: Pfeiffer.
- Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Pradana Media Group.
- Feriyansyah. (2014). *Warga Negara Digital sebagai Instrumen Menuju Warga Negara Global (Penelitian Grounded Theory tentang Dampak Kemajuan TIK terhadap Praktik Kewarganegaraan*. Tesis Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hastuti, Dwi. (2016). "Lima SMA Ditunjuk Jadi Penggerak Kelas Digital". *Koran Joglo Semar*. Edisi 12 Februari 2016.
- Izzudin Syarif. (2012). *Pengaruh Penerapan Model Blended Learning Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa SMK*. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 2.

- Kementerian Pendidikan Nasional,
Badan Penelitian dan
Pengembangan Pusat
Kurikulum. (2010).
*Pengembangan Pendidikan
Budaya dan Karakter Bangsa*.
Jakarta: Kemendiknas.
- Rahmelia, Silvia. dkk. (2015).
*Lingkungan Berbasis ICT
Sebagai Sumber Belajar Dalam
Mengembangkan Civic
Disposition Siswa: Jurnal
Pendidikan. Kewarganegaraan
UPI*.
- Widiastuti, Sussi. (2016). *Pemodelan
Kelas Digital Sebagai Inovasi
Pendidikan Kimia Pada Era
Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA)*. Surabaya: Prosiding
Seminar Nasional Kimia dan
Pembelajarannya.

**SUPER TIMWORK
SUPERVISI AKADEMIK, OPTIMALISASI MGMPS DAN WORKSHOP
UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI PEDAGOGIK
GURU SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA**

Rahayuningsih
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta
Email: hayyu.ningsih@gmail.com

Abstract. The research aims: (1) describe the implementation of Super Timwork in improving the pedagogical competence of SMA Muhammadiyah 1 Surakarta teachers; (2) describe the magnitude of the increase in pedagogical competence of SMA Muhammadiyah 1 Surakarta teachers in planning learning after the implementation of Super Timwork, and; (3) describe the magnitude of the increase in the pedagogical competence of SMA Muhammadiyah 1 Surakarta teachers in implementing learning after the implementation of Super Timwork. The subjects of the research were 30 junior high school teachers of Muhammadiyah 1 Surakarta with the science and social studies program. Each cycle consisted of 4 stages, namely: (1) planning the action; (2) implementation of actions; (3) observation results, and; (4) reflection. The results of the study: (1) the implementation of Super Timwork succeeded in increasing the pedagogical competence of the teachers of SMA Muhammadiyah 1 Surakarta in 2017/2018; (2) teacher pedagogical competence in planning learning increased from 23.33% pre-cycle; cycle I amounted to 83.33%, and; cycle II at 100%, and; (3) teacher pedagogical competence in implementing learning increased from pre-cycle by 6.67%; cycle I of 80.00%, and; cycle II amounted to 96.67%

Kata Kunci : Super Timwork, pedagogical competence.

PENDAHULUAN

Guru adalah kunci perbaikan mutu pendidikan, kualitas pembelajaran adalah denyut jantungnya. Guru adalah faktor sentral setiap usaha perbaikan kualitas pendidikan karena kualitas pendidikan di sekolah ditentukan oleh kualitas gurunya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu: (1)

kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru (Permendiknas No. 16, 2007).

Guru wajib menghantarkan peserta didik mencapai tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 3, tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk mengantar peserta didik menggapai tujuan pendidikan dibutuhkan guru-guru yang kompeten dan profesional. Namun harapan tidak selalu sesuai kenyataan dan semua butuh proses. Demikian juga yang terjadi dengan guru-guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Berdasarkan hasil analisis supervisi akademik semester gasal tahun pelajaran 2016/2017, beberapa guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta belum kompeten dalam menyusun perencanaan pembelajaran sesuai standar proses maupun dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Hal tersebut berarti guru belum memenuhi kompetensi pedagogik, sehingga harus ada upaya untuk meningkatkan kompetensi akademik guru.

Atas dasar pemikiran tersebut peneliti bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan kompetensi guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, dengan penelitian tindakan sekolah. Sebagai alternatif solusi permasalahan tersebut, peneliti bermaksud menerapkan strategi

SUPER TIMWORK yang merupakan akronim dari **SUPER**visi akademik, op**TIM**alisasi

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka ada 3 permasalahan dalam penelitian ini yang harus digali jawabannya: (1) Bagaimana penerapan SUPER TIMWORK dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta?; (2) Seberapa besar peningkatan kompetensi pedagogik guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam merencanakan pembelajaran setelah penerapan SUPER TIMWORK?, dan; (3) Seberapa besar peningkatan kompetensi pedagogik guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam melaksanakan pembelajaran setelah penerapan SUPER TIMWORK?

Penelitian tindakan sekolah ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis maupun manfaat praktis sebagai berikut. Secara teoretis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam upaya peningkatan kompetensi akademik guru. Sedangkan manfaat praktis penelitian ini adalah: (1) Meningkatkan kompetensi akademik guru yang berdampak pada meningkatnya kualitas; (2) Meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, dan; (3) Menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 8 menyatakan, “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.

Kompetensi Guru

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa

“Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (2) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kemampuan paedagogik disebut juga kemampuan dalam pembelajaran yang memuat pemahaman akan sifat, ciri anak didik dan perkembangannya, mengerti beberapa konsep pendidikan, menguasai beberapa metodologi mengajar, serta menguasai sistem evaluasi (Suparno, 2002: 52).

Pasal 28 ayat (3) butir b pada Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional

Pendidikan. Guru profesional harus memiliki akuntabilitas dalam melaksanakan ketiga kompetensi tersebut, dibutuhkan tekad dan keinginan yang kuat dalam diri setiap guru untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya dengan baik dan sempurna.

Kompetensi Kepala Sekolah

Kompetensi yang harus dimiliki Kepala Sekolah / Madrasah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah terdiri dari 5 kompetensi sebagai berikut.

Kompetensi manajerial.

Kompetensi kepala sekolah yang sangat teknis adalah kompetensi manajerial. Dengan demikian, apabila seseorang sudah menjadi kepala sekolah, khalayak memandang bahwa orang tersebut memiliki kompetensi manajerial secara baik. Mulyasa (2004:25) menyatakan bahwa kompetensi manajerial kepala sekolah semakin penting untuk ditingkatkan sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien.

Kompetensi Kewirausahaan.

Kompetensi Kewirausahaan adalah Kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, dimana dengan menguasai kompetensi tersebut kepala sekolah akan mudah mengembangkan sekolah agar lebih efektif dan efisien. Melalui kompetensi kewirausahaan kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang inovatif dan kreatif untuk mengembangkan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai sekolah yang bermutu.

Kompetensi kepribadian.

Kompetensi kepribadian (*personality competence*) diwujudkan dalam bentuk berfikir, bersikap dan bertindak sebagai pemimpin pendidikan dan manajer sekolah yang berkepribadian. (Permendiknas Nomor. 13 Tahun 2007).

Kompetensi social.

Kompetensi social adalah kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain, bergaul, bekerjasama, dan berjiwa sosial. Komara (2007) mendefinisikan kompetensi sosial sebagai (1) kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat (2) kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap lembaga kemasyarakatan dan (3) kemampuan untuk menjalin kerjasama. Subagyo (2008) mengemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berkomunikasi, membangun relasi, dan kerjasama, menerima perbedaan, memikul tanggung jawab, menghargai hak orang lain, serta kemampuan memberi manfaat bagi orang lain (Sumardi, 2007).

Konsep Supervisi.

Secara etimologi istilah supervisi berasal dari bahasa Inggris *supervision* yang berarti pengawasan (Danim, 2011: 152). Menurut Suryosubroto (2010:175), "Supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik."

Menurut Briggs dalam Imron (2011: 12), supervisi berfungsi untuk mengkoordinasi, menstimulasi, dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru; mengkoordinasikan semua usaha sekolah, melengkapi kepemimpinan sekolah, memperluas pengalaman guru, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif, memberi fasilitas dan penilaiann yang terus menerus, menganalisis situasi belajar mengajar, memberikan pengetahuan dan keterampilan guru serta staf, mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan guru.

Tujuan supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar." (Suryosubroto, 2010:175).

Monitoring Pembelajaran

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program.

Hasil monitoring dapat digunakan untuk memberi masukan bagi perbaikan pelaksanaan

manajemen sekolah. Sedangkan tujuan monitoring adalah sebagai berikut: (1) Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana; (2) Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi; (3) Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan; (4) Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan, dan; (5) Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yakni Ketaatan (*compliance*), Pemeriksaan (*auditing*), Laporan (*accounting*).

MGMP Sekolah

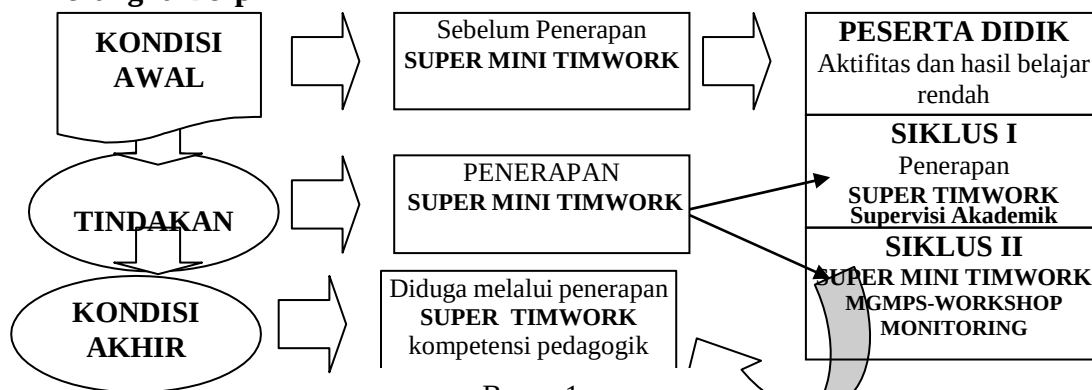
Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk: (i) memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4; (ii) memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) memiliki sertifikat pendidik. Dengan

berlakunya Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pelatihan, penulisan karya ilmiah, dan pertemuan di Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Menurut Soetjipto (2009: 36), MGMP merupakan salah satu jenis organisasi guru-guru sekolah yang diakui pemerintah sampai saat ini selain PGRI, MGMP didirikan atas anjuran pejabat-pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MGMP berfungsi sebagai sarana komunikasi, konsultasi dan tukar pengalaman. MGMP sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan kemampuan, wawasan, pengetahuan serta pemahaman guru terhadap materi yang diajarkan dan pengembangannya (Saondi, 2010: 80). Sa'ud (2009: 107) menyatakan bahwa wadah profesi ini sangat diperlukan dalam memberikan kontribusi pada peningkatan keprofesionalan anggotanya.

Kerangka Berpikir



Bagan 1.
Kerangka Berpikir

Hipotesis Penelitian

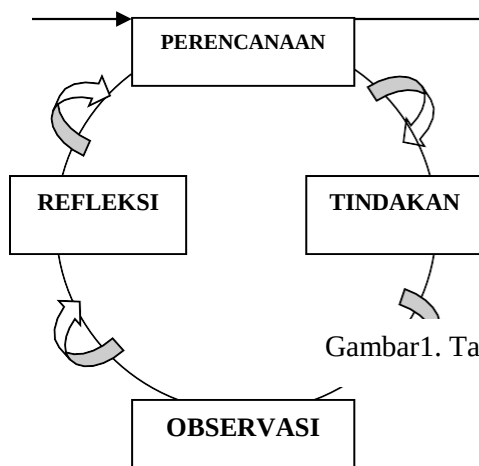
Berdasarkan kerangka berpikir di atas hipotesis penelitian adalah Penerapan SUPER TIMWORK berhasil meningkatkan kompetensi pedagogik guru SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam merancang rencana pembelajaran dan melaksanakan aktivitas

pembelajaran sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat”.

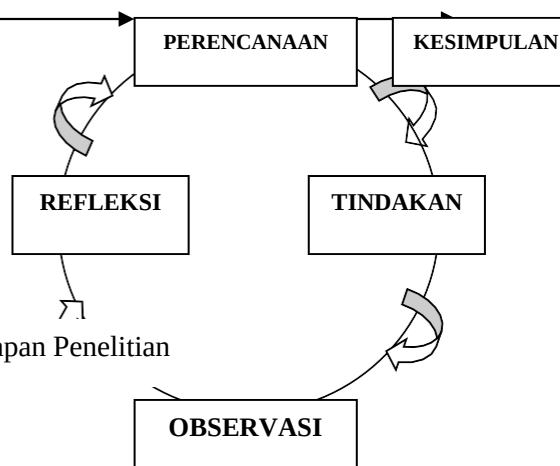
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan desain penelitian tindakan yang dirancang melalui dua siklus yang dapat disajikan pada gambar berikut

SIKLUS I



SIKLUS II



Gambar1. Tahapan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru junior SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang berjumlah 30 guru. Penelitian dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, Jalan Raden Mas Said Nomor 35, Ketelan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah pada semester genap tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini adalah penelitian tindakan (*Action Research*), yang kegiatannya dilakukan secara siklik dan terdiri dari dua siklus. Setiap siklus mengandung refleksi kritis dan upaya untuk perbaikan.

Prosedur Pelaksanaan Siklus I

Siklus pertama dilaksanakan mulai bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018. Adapun

tahapan pada siklus pertama adalah sebagai berikut.

Dalam tahap perencanaan peneliti bersama kolaborator yang terdiri atas wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru senior merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Inventarisasi kebutuhan dan kelemahan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya dan menganalisis hasil supervisi akademik guru pada semester gasal 2017/2018; (2) Berdiskusi dengan kolaborator tentang hal-hal yang dapat mengatasi kelemahan guru dalam melaksanakan tugas pokok guru maupun meningkatkan kompetensi guru; (3) Menyusun rencana tindakan dengan merancang jadwal kegiatan supervisi akademik

maupun supervisor, dan (4) Menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tindakan.

Pada tahap pelaksanaan peneliti mengadakan pertemuan individual *office-conference* dengan guru-guru yang berdasarkan hasil analisis supervisi semester gasal tahun 2017/2018 memang perlu peningkatan untuk mengetahui penyebab/masalah dari guru yang bersangkutan terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan, dan penggunaan metode pembelajaran. Selanjutnya peneliti dan kolaborator melaksanakan supervisi kunjungan kelas.

Pengamatan dilakukan pada setiap tindakan, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan tindakan. Peneliti dibantu kolaborator mengumpulkan data melalui instrument yang sudah disiapkan. Selanjutnya menganalisis data penelitian yang telah terkumpul untuk mengetahui proses peningkatan kompetensi guru junior setelah dilakukan tindakan. Kejadian dan hal-hal yang terjadi direkam dalam bentuk catatan-catatan hasil observasi dan didokumentasikan sebagai data-data penelitian.

Pada akhir siklus I diadakan refleksi berdasarkan data observasi. Dengan refleksi ini dimaksudkan agar peneliti dapat melihat apakah tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat meningkatkan kompetensi akademik guru junior. Refleksi dilakukan dengan cara mengulas secara kritis (*reflective*) tentang perubahan yang terjadi pada guru junior dan suasana kelas. Pada tahap ini peneliti menjawab pertanyaan mengapa (*why*),

bagaimana (*how*), dan sejauh mana (*to what extent*) tindakan telah menghasilkan perubahan secara signifikan. Selain itu refleksi juga untuk mengetahui kendala-kendala apa yang menghambat, faktor apa saja yang menjadi pendorong, dan alternatif apa sebagai solusinya. Hasil observasi pada siklus I direfleksi untuk pengambilan tindakan di siklus II.

Prosedur Pelaksanaan Siklus II

Kegiatan tindakan pada siklus II didasarkan atas temuan-temuan hasil dari siklus I dan dilaksanakan mulai bulan April 2018 sampai bulan Mei 2018. Adapun langkah-langkah tindakan yang dilakukan sama dengan pada siklus I dengan rangkaian tahap perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.

Dalam tahap perencanaan peneliti bersama kolaborator yang terdiri atas wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru senior merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (1) Berdiskusi dengan kolaborator untuk merancang kegiatan pertemuan MGMPS dan monitoring administrasi pembelajarn guru, dan; (2) Menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tindakan.

Pada tahap pelaksanaan tindakan peneliti menerapkan SUPER TIMWORK. Peneliti bersama kolaborator merencanakan memfasilitasi terlaksananya workshop penyusunan RPP, pembelajaran efektif dan pembuatan media pembelajaran. Selanjutnya mengamati jalannya pertemuan MGMPS.

Pengamatan dilakukan pada setiap tindakan, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan tindakan. Peneliti dibantu kolaborator

mengumpulkan data melalui instrument yang sudah disiapkan. Selanjutnya menganalisis data penelitian yang telah terkumpul untuk mengetahui proses peningkatan kompetensi guru yunior setelah dilakukan tindakan.

Pada akhir siklus II diadakan refleksi berdasarkan data observasi. Dengan refleksi ini dimaksudkan agar peneliti dapat melihat apakah tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat meningkatkan kompetensi akademik guru yunior. Refleksi dilakukan dengan cara mengulas secara kritis (*reflective*) tentang perubahan yang terjadi pada guru yunior dan suasana kelas.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik non test digunakan untuk mendapatkan tingkat kompetensi akademik guru, khususnya dalam merancang pembelajaran (RPP), melaksanakan pembelajaran, dan penggunaan metode pembelajaran sesuai materi ajar. Adapun instrument dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Pedoman observasi; (2) Pedoman Wawancara; (3) Format supervisi kunjungan kelas ; (4) format monitoring administrasi pembelajaran guru; (5) Program kerja MGMPs; (6) Notulen kegiatan MGMPs, dan (7) Angket pendapat guru tentang SUPER TIMWORK.

Validasi

Penelitian tindakan bersifat transformative, maka kriteria yang cocok adalah validitas demokratis, validitas hasil, validitas proses, validitas katalitik, dan validitas dialogis yang harus dipenuhi dari awal hingga akhir penelitian, yaitu

refleksi awal saat kesadaran akan kekurangan muncul sampai pelaporan hasil penelitiannya (Burn, 1999: 161-162 dalam Subyantor, 2014: 145). Validasi data dalam penelitian ini juga mengacu pada Borg dan Gall yang meliputi validitas proses dan validitas hasil (Wiriaatmadja, R., 2005 : 164). Validasi dilakukan selama proses penelitian, dari awal hingga berakhirnya penelitian. Untuk meminimalkan subyektifitas dilakukan melalui triangulasi, baik triangulasi waktu, triangulasi ruang, triangulasi penelitian, maupun triangulasi teoritis (Burn, 1999: 164 dalam Subyantor, 2014: 151).

Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, paparan data, dan penyimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna, kemudian dilanjutkan dengan paparan data, yaitu menampilkan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif dan representasi grafis. Langkah terakhir adalah penyimpulan, yaitu mengambil intisari dan sajian data yang telah terorganisasi dalam bentuk pernyataan kalimat dan/atau formula yang singkat dan padat tetapi mengandung pengertian luas.

Indikator Keberhasilan Penelitian

Indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan penelitian ini adalah sebagaimana nampak dalam tabel berikut.

Tabel 2.

Ukuran Keberhasilan Penelitian

NO.	MASALAH	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
1.	Penyusunan rencana pembelajaran	RPP baik dan benar, sesuai standar proses.	Minimal 90% guru yunior dapat menyusun RPP dengan kriteria nilai baik	Non Test Observasi
2.	Pelaksanaan pembelajaran	Pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP yang sudah dibuat	Minimal 90% melaksanakan pembelajaran dengan kriteria nilai baik	Non Test Observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Awal

Kondisi awal dilakukan dengan mengamati dan menganalisis hasil supervisi guru pada semester gasal tahun 2017/2018, yang meliputi perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya peneliti bersama kolaborator memilih subyek tindakan peningkatan kompetensi akademis guru. Subyek yang dipilih adalah guru yunior yang sudah tersertifikasi, baik guru PNS (DPK), Guru Tetap Yayasan (GTY) maupun Guru Tidak Tetap (GTT).

Pada pra siklus, 76,67% guru memperoleh nilai supervisi perencanaan pembelajaran dengan kriteria Cukup, sedangkan 23,33% guru memperoleh nilai dengan kriteria baik. Berikut adalah tabel

dan diagram hasil supervisi guru yunior dalam perencanaan pembelajaran pada pra siklus.

Tabel 3.
Hasil Supervisi Perencanaan Pembelajaran Pra Siklus

Kriteria	Guru	Persentase
Amat Baik	0	0,0%
Baik	7	23,33%
Cukup	23	76,67%
Kurang	0	0,0%

Sedang pada supervisi pelaksanaan pembelajaran 6,67% guru memperoleh nilai baik, sedang 93,33% guru memperoleh nilai dengan kriteria Cukup. Berikut

adalah tabel dan diagram hasil supervisi guru yunior dalam pelaksanaan pembelajaran pada pra siklus.

Tabel 4.
Hasil Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran Pra Siklus

Kriteria	Guru	Persentase
Amat Baik	0	0,0%
Baik	2	6,67%
Cukup	28	93,33%
Kurang	0	0,0%

Berdasarkan tabel 3 dan 4 serta diagram 1 dan 2 dapat didiskripsikan sebagai berikut: (1) Kemampuan guru yunior pada pra siklus dalam menyusun rencana pembelajaran dengan nilai baik 23,33% sedang yang 76,67% memperoleh nilai Cukup, dan; (2) Kemampuan guru yunior pada pra siklus dalam melaksanakan pembelajaran yang mencapai nilai baik 6,67%, sedang yang mencapai nilai cukup 93,33%.

Hal itu menunjukkan bahwa belum seluruh guru yunior menyusun perencanaan pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Demi menunjang keberhasilan dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik, guru harus memiliki 4 kemampuan/ kompetensi yang terintegrasi dalam kinerja guru.

Hasil dan Pembahasan Siklus I

Siklus pertama dilaksanakan mulai bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018. Adapun tahapan pada siklus pertama adalah sebagai berikut.

Perencanaan Tindakan

Dalam tahap ini peneliti bersama kolaborator merancang kegiatan sebagai berikut: (1) Inventarisasi kebutuhan dan kelemahan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya dan menganalisis hasil supervisi akademik guru semester gasal 2017/2018; (2) Berdiskusi dengan kolaborator tentang hal-hal yang dapat mengatasi kelemahan guru; (3) Menyusun rencana tindakan, dan; (4) Menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tindakan.

Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap ini peneliti mengadakan pertemuan individual *office-conference* dengan guru-guru yang berdasarkan hasil analisis supervisi semester gasal memang perlu peningkatan untuk mengetahui penyebab/masalah dari guru yang bersangkutan terkait dengan penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan, dan penggunaan metode pembelajaran .

Observasi

Pengamatan dilakukan pada setiap tindakan. Peneliti dibantu kolabolator mengumpulkan data melalui instrument yang sudah disiapkan. Selanjutnya menganalisis data penelitian yang telah terkumpul. Kejadian dan hal-hal yang terjadi direkam dalam bentuk catatan-catatan hasil observasi dan didokumentasikan sebagai data-data penelitian.

Refleksi

Pada akhir siklus I diadakan refleksi berdasarkan data observasi. Refleksi dilakukan dengan cara mengulas secara kritis (*reflective*) tentang perubahan yang terjadi pada guru yunior dan suasana kelas. Pada tahap ini peneliti menjawab

pertanyaan mengapa (*why*), bagaimana (*how*), dan sejauh mana (*to what extent*) tindakan telah menghasilkan perubahan secara signifikan. Hasil observasi pada siklus I direfleksikan untuk pengambilan tindakan di siklus II.

Berdasarkan hasil observasi dan tindakan pada siklus 1 diperoleh data sebagai berikut. Pada siklus sudah terjadi peningkatan kompetensi akademik guru yunior. Guru yunior yang memperoleh nilai supervisi perencanaan pembelajaran dengan kriteria baik pada pra siklus yaitu 23,33% meningkat menjadi 83,33% guru yunior dengan nilai baik dan sangat baik pada siklus 1 yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.
Hasil Supervisi Perencanaan Pembelajaran Siklus 1

Kriteria	Guru	Persentase
Amat Baik	2	6,67%
Baik	23	76,67%
Cukup	5	16,67%
Kurang	0	0,0%

Nilai supervisi pelaksanaan pembelajaran juga mengalami peningkatan, dari 6,67% guru memperoleh nilai baik pada pra siklus menjadi 73,33% guru yunior memperoleh nilai baik dan sangat

baik pada siklus 1. Berikut tabel dan diagram hasil supervisi guru yunior dalam pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1.

Tabel 6.
Hasil Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 1

Kriteria	Guru	Persentase
Amat Baik	0	0,0%
Baik	24	80,00%
Cukup	6	20,00%
Kurang	0	0,0%

Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat didiskripsikan sebagai berikut: (1) kemampuan guru junior dalam menyusun rencana pembelajaran pada Siklus 1 sudah mengalami peningkatan; (2) Peningkatan itu belum mencapai indikator kinerja; (3) Perlu dilanjutkan ke siklus 2 dengan tindakan yang lebih efektif agar indikator kinerja tercapai, dan; (4) Pada siklus 2 tindakan difokuskan pada kelemahan-kelemahan guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran maupun dalam melaksanakan rencana pembelajaran.

Hasil dan Pembahasan Siklus II

Kegiatan tindakan pada siklus II didasarkan atas temuan-temuan hasil dari siklus I dan dilaksanakan mulai bulan April 2017 sampai bulan Mei 2017. Adapun langkah-langkah tindakan yang dilakukan sama dengan pada siklus I dengan rangkaian tahap perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi.

Perencanaan

Dalam tahap ini peneliti bersama kolaborator yang terdiri atas wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan guru senior merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) Berdiskusi dengan kolaborator untuk merancang kegiatan pertemuan MGMPS dan monitoring administrasi pembelajar

guru., dan (b) Menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tindakan.

Tindakan

Pada siklus 1 peneliti menerapkan teknik supervisi, maka pada siklus 2 ini peneliti menerapkan SUPER TIMWORK, dengan menambah tindakan optimalisasi MGMPS, workshop dan monitoring. Peneliti bersama kolaborator merencanakan memfasilitasi terlaksananya workshop penyusunan RPP, pembelajaran efektif dan pembuatan media pembelajaran. Selanjutnya mengamati jalannya pertemuan MGMPS yang terintegrasi dengan kegiatan workshop.

Sekolah memfasilitasi guru-guru junior untuk mengikuti workshop peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyusunan RPP yang baik dan benar sesuai dengan standar proses maupun dalam pelaksanaannya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sekolah mengundang nara sumber dari pengawas sekolah maupun praktisi pendidikan untuk kegiatan workshop di sekolah. Sedangkan workshop yang diadakan pihak luar sekolah memfasilitasi dengan membantu pembayaran biaya workshop ataupun transport.

Kepala sekolah memyarankan dan membimbing guru-guru junior untuk aktif dalam MGMPS dan

mengoptimalkan perannya. Misalnya dalam pembagian jadwal pelajaran, memilih buku/referensi sebagai materi ajar, mengembangkan silabus, menyusun RPP, dan melaksanakan pembelajaran di kelas, termasuk dalam menyusun soal dan penilaian.

Observasi

Pengamatan dilakukan pada setiap tindakan, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan tindakan. Peneliti dibantu kolabolator mengumpulkan data melalui instrument yang sudah disiapkan. Selanjutnya menganalisis data penelitian yang telah terkumpul untuk mengetahui proses peningkatan kompetensi guru yunior setelah dilakukan tindakan. Kejadian dan hal-hal yang terjadi direkam dalam bentuk catatan-catatan hasil observasi dan didokumentasikan sebagai data-data penelitian.

Refleksi II

Pada akhir siklus II diadakan refleksi berdasarkan data observasi. Dengan refleksi ini dimaksudkan

agar peneliti dapat melihat apakah tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat meningkatkan kompetensi akademik guru yunior. Refleksi dilakukan dengan cara mengulas secara kritis (*reflective*) tentang perubahan yang terjadi pada guru yunior dan suasana kelas. Pada tahap ini peneliti menjawab pertanyaan mengapa (*why*), bagaimana (*how*), dan sejauh mana (*to what extent*) tindakan telah menghasilkan perubahan secara signifikan.

Berdasarkan hasil observasi dan tindakan pada siklus 2 diperoleh data sebagai berikut. Pada siklus 2 sudah terjadi peningkatan kompetensi pedagogik guru yunior dalam perencanaan pembelajaran maupun dalam pelaksanaan pembelajaran secara signifikan. Guru yunior yang memperoleh nilai supervisi perencanaan pembelajaran dengan kriteria baik dan sangat baik pada siklus 1 sebesar 83,33% meningkat menjadi 100% guru yunior pada siklus 2.

Tabel 6.
Hasil Supervisi Perencanaan Pembelajaran Siklus 2

Kriteria	Guru	Persentase
Amat Baik	24	80,00%
Baik	6	20,00%
Cukup	0	0,00%
Kurang	0	0,0%

Nilai supervisi pelaksanaan pembelajaran juga mengalami peningkatan, dari 83,33% guru yunior yang memperoleh nilai baik dan sangat baik menjadi 96,67%. Berikut adalah tabel dan diagram

hasil supervisi guru yunior dalam pelaksanaan pembelajaran pada pra siklus.

Tabel 7.
Hasil Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus 2

Kriteria	Guru	Persentase
Amat Baik	11	36,67%
Baik	18	60,00%
Cukup	1	3,33%
Kurang	0	0,0%

Berdasarkan tabel dan diagram di atas dapat didiskripsikan hal-hal sebagai berikut: (a) kemampuan guru yunior dalam menyusun rencana pembelajaran pada Siklus 2 sudah mengalami peningkatan; (b) Peningkatan itu sudah mencapai indikator kinerja, kompetensi akademik guru yunior baik dalam hal menyusun perencanaan pembelajaran maupun dalam melaksanakan rencana pembelajaran mengalami peningkatan; (c) Sebanyak 100% guru yunior mendapatkan nilai supervisi

perencanaan maupun pelaksanaan pembelajaran dengan kriteria baik dan sangat baik, dan; (d) Penelitian dihentikan, tidak perlu dilanjutkan ke siklus berikutnya.

Hasil dan Pembahasan Antar Siklus.

Peningkatan kompetensi akademik guru dalam merencanakan pembelajaran dan melaksanakan program pembelajaran dari prasiklus hingga siklus 2 terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 8. Peningkatan Perencanaan Pembelajaran

No.	SIKLUS	KETERCAPAIAN TARGET			
		JUMLAH GURU	SANGAT BAIK	BAIK	PROSENTASE
1	Pra Siklus	30	0	7	23,33%
2	Siklus 1	30	2	23	83,33%
3	Siklus 2	30	24	6	100,00%

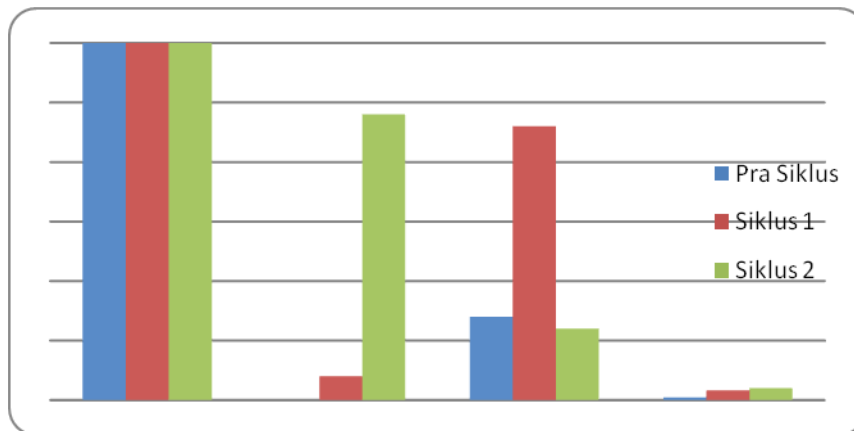


Diagram 1. Peningkatan Perencanaan Pembelajaran

Peningkatan kompetensi akademik guru dalam melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan program pembelajaran dari pra siklus hingga siklus 2 terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 9.

Peningkatan Perencanaan Pembelajaran

No.	SIKLUS	KETERCAPAIAN TARGET		
		JUMLAH GURU	BAIK	PROSENTASE
1	Sebelum Siklus 1	30	0	2
2	Siklus 1	30	0	24
3	Siklus 2	30	11	18

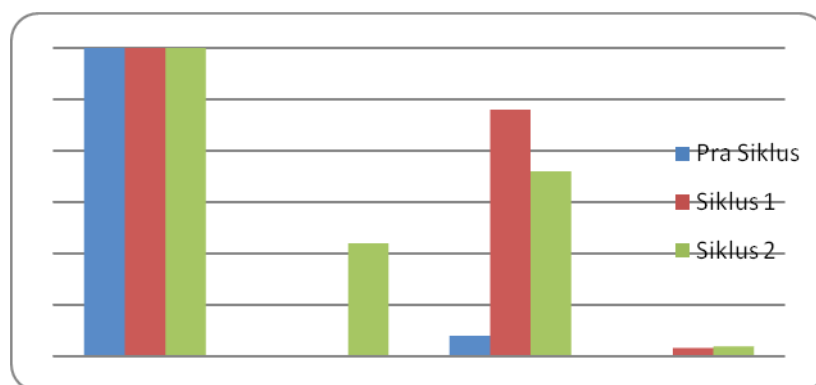


Diagram 8. Peningkatan Perencanaan Pembelajaran

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan data hasil observasi dan pembahasan setiap siklus pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Penerapan SUPER TIMWORK berhasil meningkatkan kompetensi pedagogik guru yunior SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, khususnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat; (2) Besar peningkatan kompetensi pedagogik guru yunior SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam merencanakan pembelajaran mengalami peningkatan dari 23,33% guru yunior yang memperoleh nilai baik pada supervisi perencanaan pembelajaran Pra Siklus, menjadi 83,33% pada siklus 1, dan 100% pada siklus 2, dan; (3) Besar peningkatan kompetensi pedagogik guru yunior SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dalam melaksanakan pembelajaran juga mengalami peningkatan dari 6,67% guru yunior yang memperoleh nilai supervisi baik pada Pra Siklus, meningkat menjadi 80,00% pada siklus 1, dan 96,67% pada siklus 2.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmo Mulyoatmodjo. (1980). *Micro Teaching*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Guru
- Direktorat tenaga kependidikan. (2006). *Naskah Akademik tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan (Kualifikasi dan Kompetensi)*, Jakarta.
- Soekartawi, DR., (1995) *Monitoring dan Evaluasi Proyek Pendidikan*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta;.
- Soetopo Hendyat, & Soemanto Wasty(1993)., Drs.,. *Pembinaan dan pengembangan Kurikulum*, PT Bumi Aksara, Jakarta;
- Mantja, W. (1984). “Efektivitas Supervisi Klinik dalam Pembimbingan Praktek Mengajar Mahasiswa IKIP Malang,”Tesis. FPS IKIP Malang.
- Supervisi Akademik dalam peningkatan profesionalisme guru*. (2006). Kompetensi Supervisi Kepala Sekolah Pendidikan Dasar. Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Depdiknas.
- Suniti.(2012). *Etika Profesi Keguruan*. Cirebon: Nurjati Press.
- Satori,Djam'an,dkk.(2010).*Profesi Keguruan*.Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nurdin,Syafruddin.(2005).*Guru Profesional*.Ciputat: PT Ciputat Press.
- Yamin,Martinis.(2006).*Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia*.Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta.

**PELAKSANAAN PENILAIAN AUTENTIK DALAM MATA PELAJARAN
PPKn KELAS XII TKJ A SMK NEGERI 2 SALATIGA SEMESTER
GANJIL TAHUN AJARAN 2018/2019**

Maretha Ulfa Putriska*, Nani Mediatati
PPKn, FKIP, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
*Email: marethaulfa@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the learning process in the Kurikulum 2013 which requires all subjects to use authentic assessment, including PPKn subject teachers. Placed in SMK Negeri 2 Salatiga with the respondents of the research is PPKn's teacher of class XII TKJ A, the deputy headmaster of the curriculum field, and students of class XII TKJ A. The purpose of the study is to provide an overview of the implementation of authentic assessment in PPKn subjects at SMK Negeri 2 Salatiga and the barriers experienced by teachers and how to overcome them. Typed of qualitative descriptive research. Data collection used passive participation observation techniques, unstructured interviews, and questionnaires. Data analysis used qualitative data analysis. The results of the study indicate that the implementation of authentic assessments at SMK Negeri 2 Salatiga has generally been carried out by the teacher, but has not run optimally. The assessment indicators that have been carried out are daily assessments, final semester assessments, discussions, and presentations, and it planned in the lesson plan (RPP). Some assessment indicators that have not been implemented by the teacher, such as the attitude assessment that should be carried out by observation, self-assessment, evaluation among friends, and journals, but in the implementation only teachers assess student attitudes. The obstacles in the implementation of authentic assessments include: a curriculum that is held continuously revisions and a long time in the assessment process.*

Keywords: *authentic assesment, PPKn*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan dari KTSP 2006 ke Kurikulum 2013 terdiri dari 4 (empat) elemen, yakni perubahan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi, Standar Proses, serta Standar Penilaian (Kemendikbud, 2013 : 4). Perubahan yang terjadi pada Standar Penilaian bahwa dalam KTSP 2006 penilaian lebih menekankan pada aspek pengetahuan, sedangkan dalam penilaian Kurikulum 2013 meliputi

tiga ranah yakni penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan SKL yang hendak dicapai. Nilai dari ketiga ranah tersebut dideskripsikan pada buku rapor peserta didik. Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian dalam Kurikulum 2013 pendekatan utamanya adalah penilaian autentik (Mansur, 2015 : 3)

Penilaian autentik dilakukan pendidik pada awal pembelajaran, antara pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Kemendikbud (2013 :

28) penilaian autentik didefinisikan sebagai pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tiga ranah yang telah disebutkan tersebut didefinisikan sebagai berikut : a) Ranah kognitif (pengetahuan), mencakup kegiatan mental (otak); dengan bentuk penilaian dibedakan menjadi enam tingkatan diantaranya mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi serta menciptakan; b) Ranah afektif (sikap), mencakup lima kategori utama yaitu penerimaan, tanggapan, penilaian, pengorganisasian, dan nilai kompleks, ranah sikap ini bertujuan untuk mengukur aspek afektif yang berhubungan dengan pandangan/pendapat dan sikap/nilai dari siswa terhadap peristiwa atau fenomena tertentu; c). Ranah psikomotorik (keterampilan), misalnya keterampilan atau *skills*, bertujuan untuk mengukur aspek yang berkaitan dengan gerak atau aktivitas fisik. (Mas'ud & Sundari, 2010 : 7).

Dalam melakukan penilaian yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekolah, maka seorang guru harus merancang penilaian yang mengarah pada tujuan yang telah ditentukan dan hendak dicapai. Salah satu mata pelajaran yang menggunakan penilaian autentik yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

SMK Negeri 2 Salatiga merupakan sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013. Berdasarkan wawancara awal terhadap guru PPKn yang mengajar

di kelas XII TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga mengatakan bahwa kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013 dengan strategi pembelajarannya digunakan penilaian dengan pendekatan berbasis autentik, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tentang pelaksanaan penilaian autentik dalam mata pelajaran PPKn di kelas XII TKJ A semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 di SMK Negeri 2 Salatiga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan di dalam penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penilaian autentik dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di kelas XII TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi guru dalam melaksanakan penilaian autentik dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di kelas XII TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan penilaian autentik dan hambatan yang dialami guru dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di kelas XII TKJ

A SMK Negeri 2 Salatiga semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 serta cara mengatasinya.

KAJIAN TEORI

A. PENILAIAN AUTENTIK

1. Pengertian Penilaian Autentik

Menurut Arikunto (2008 : 23) penilaian autentik adalah suatu penilaian belajar yang merujuk pada situasi atau konteks “dunia nyata”, yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dengan kata lain, penilaian autentik memonitor dan mengukur kemampuan siswa dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia nyata.

Fadillah (2014 : 179) menjelaskan penilaian autentik merupakan penilaian secara utuh, meliputi kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas gaya, dan dampak instruksional (instructional effect) dan dampak pengiring (nurturan effect) dari pembelajaran. Dengan kata lain, penilaian autentik ini dapat lebih mudah membantu para guru dalam mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi : sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Kemudian menurut Lampiran Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian, penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai, mulai dari proses hingga

keluaran (output) pembelajaran.

Kurikulum 2013 menganggap bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang tepat untuk menilai hasil belajar siswa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar, penilaian autentik merupakan pendekatan utama dalam penilaian hasil belajar siswa oleh guru.

Dapat disimpulkan bahwa penilaian autentik adalah proses penilaian secara nyata, utuh dan komprehensif yang dimulai dari kesiapan peserta didik, proses, hingga keluaran (output) hasil belajar melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa telah dikuasai, dengan melalui tugas proyek dan portofolio, serta penilaian sikap.

2. Teknik Penilaian Autentik

Penilaian pada Kurikulum 2013 menggunakan penilaian autentik, hal tersebut berdasarkan pada Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses dan Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian. Penilaian autentik pada proses dan hasil mencakup 3 aspek penilaian, yaitu afektif (sikap), kognitif (pengetahuan), dan psikomotorik (keterampilan). Sesuai dengan tujuan pembelajaran, penilaian autentik harus menekankan pada ketiga ranah tersebut. Sunarti & Rahmawati (2014 : 29) menjelaskan teknik yang digunakan pada (a) kompetensi sikap yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal;

(b) kompetensi pengetahuan yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan; dan (c) kompetensi keterampilan yaitu untuk kerja, proyek, portofolio.

Selanjutnya oleh Sunarti & Rahmawati (2014 : 20) teknik-teknik tersebut dibahas sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap peserta didik selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran.
- b. Penilaian diri, yaitu penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri yang menyangkut keunggulan dan kelemahannya.
- c. Penilaian antar teman, merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur.
- d. Jurnal, merupakan catatan pendidik selama pembelajaran berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan pemahaman peserta didik yang berkaitan dengan kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta didik yang dipaparkan secara deskriptif.
- e. Tes tertulis, yaitu tes yang menuntut peserta tes memberi jawaban secara tertulis berupa pilihan ganda dan uraian.
- f. Tes lisan, digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide dan pendapat secara lisan.
- g. Penugasan, merupakan pemberian tugas kepada peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok.
- h. Tes unjuk kerja atau tes perbuatan (praktik), merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu.
- i. Proyek, yaitu tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan hasil kerjanya. Penilaian proyek dilaksanakan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan hasil.
- j. Portofolio, adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui perkembangan dan kemampuan peserta didik, dengan menilai bersama karya atau tugas yang dikerjakannya.

B. PPKn

1. Pengertian PPKn

Dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Samsuri (2011 : 28) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diartikan sebagai penyiapan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang

memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya.

Sedangkan menurut Edmonson (dalam Ubaedillah, 2011: 5) makna civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, serta hak-hak istimewa warga negara.

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran sosial yang memfokuskan dan menyiapkan generasi muda (siswa) pada pembentukan warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai bermasyarakat dalam hal pemerintahan dan kewarganegaraan yaitu terkait dengan kewajiban, hak, serta hak-hak istimewa warga negara. Penilaian autentik tepat untuk mata pelajaran PPKn, karena dalam PPKn juga terdapat penilaian pada ranah afektif, psikomotorik, dan kognitif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mempunyai konsep yang apa adanya, maka dalam penelitian ini digunakan studi kasus (*case study*). Dilaksanakan di SMK Negeri 2 Salatiga pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019.

Teknik pengumpulan data digunakan observasi pasif yaitu peneliti hanya mengamati pelaksanaan penilaian autentik tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut, wawancara pada responden yaitu

guru PPKn kelas XII TKJ A dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, studi dokumentasi berupa dokumentasi yang ditemukan saat penelitian berupa RPP guru, foto-foto, dan penilaian autentik yang dilakukan siswa, dan kuesioner dengan responden siswa kelas XII TKJ A.

Instrumen pengumpulan data digunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman kuesioner. Validitas data digunakan triangulasi data, berupa triangulasi sumber yaitu mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka berikut ini dijabarkan hasil penelitian, diantaranya:

A. Perencanaan Penilaian Autentik dalam Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Salatiga

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang diperoleh, guru telah membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu sebelum menyiapkan penilaian autentik siswa. Guru membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk setiap tingkat kelas siswa yang akan dididik, RPP disusun sebelum awal tahun ajaran untuk satu tahun pelajaran, dan disesuaikan dengan Kurikulum 2013, menggunakan penilaian autentik.

Perencanaan penilaian yang dilakukan guru PPKn tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penilaian Harian

Sebelum guru menilai dengan teknik penilaian harian yang berupa soal-soal pilihan ganda dan esai, guru terlebih dahulu membuat instrumen berupa soal-soal tersebut. Penilaian harian dilakukan setiap akhir Kompetensi Dasar (KD), jika dalam 1 KD terdapat 3 kali pertemuan, maka di pertemuan akhir guru melakukan ulangan harian untuk memperoleh nilai pengetahuan siswa di samping soal penugasan siswa yang kemudian akan diambil rata-rata dari kedua nilai tersebut.

b. Tugas

Disebutkan bahwa di samping nilai penilaian harian, guru juga memberikan tugas kepada masing-masing siswa untuk memperoleh nilai pengetahuan, tugas yang biasa diberikan guru meliputi tugas mandiri maupun tugas kelompok.

- i. Tugas mandiri merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh masing-masing siswa dalam jangka waktu tertentu, tugas yang diberikan kepada siswa berupa tugas rumah.
- ii. Tugas kelompok merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh siswa dalam satu kelompok dalam waktu tertentu, tugas tersebut biasanya diberikan dalam

waktu pembelajaran, dapat berupa penyelidikan kelompok.

b. Daftar Cek Skala Sikap

Khusus beberapa mata pelajaran tidak hanya mengukur nilai pengetahuan dan keterampilan siswa, maka dalam PPKn sikap merupakan kompetensi yang disertakan untuk dinilai. Untuk menilai kompetensi sikap, menurut hasil observasi dan wawancara yang telah diperoleh, guru telah merencanakan penilaian kompetensi ini menggunakan Panduan Internalisasi Sikap.

B. Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Salatiga

Setelah memahami konsep dasar penilaian autentik, kemudian menyusun rencana penilaiannya, maka guru selanjutnya melakukan pelaksanaan penilaian kepada peserta didik.

Guru menyatakan bahwa sudah berusaha melakukan penilaian autentik sesuai dengan pelatihan yang telah diikuti guru, penilaian ini mudah dilaksanakan dengan bantuan teknologi menjadikan guru lebih terbantu dalam menilai dan menerapkan kurikulum 2013. Penilaian yang dilakukan guru menyesuaikan pada materi yang akan diberikan pada siswa. Selama menjalankan penilaian autentik di tahun sebelumnya, guru sudah bisa melaksanakan dengan baik dan berharap kedepannya dapat melaksanakan penilaian autentik dengan lebih baik lagi.

Dalam pelaksanaannya, guru menggunakan teknik dan instrumen seperti berikut:

1. Kompetensi Sikap

Pada kompetensi ini, sebelumnya guru telah membuat RPP berisikan teknik dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai kompetensi sikap. Dalam menilai sikap, guru menuturkan:

“Harus sabar dalam menilai masing-masing karakter siswa karena setiap siswa itu berbeda dan membutuhkan waktu yang lama, dan tidak boleh asal-asalan dalam menilai mereka, karena ini mempengaruhi masa depan mereka dalam melanjutkan jenjang karirnya, contoh yang akan bekerja maka nilai sikap harus baik, kuliah pun seperti

itu, karena dasar manusia yang baik tercermin dari sikapnya, maka dari itu keistimewaan guru PPKn yang tidak dimiliki guru lain yaitu menilai dan mengajarkan kompetensi sikap pada siswa.”

Kompetensi sikap sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu Penilaian Sikap Spiritual dan Penilaian Sikap Sosial yang tercantum dalam Kompetensi Inti 1 dan Kompetensi Inti 2 dalam RPP. Instrumen penilaian sikap spiritual dalam RPP guru dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1
Instrumen penilaian kompetensi sikap spiritual dalam RPP guru

INSTRUMEN PENILAIAN						
A. Aspek Sikap						
1. Sikap spiritual						
Sikap spiritual diukur dengan penilaian diri						
No	Nama	Perilaku yang Diamati				
		Ketaatan Beribadah	Perilaku Bersyukur	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan	Toleransi dalam Beribadah	Skala Akhir/ Predikat
1						
2						
3						
4						
5						

Setiap aspek diisi oleh siswa sendiri dengan jawaban : selalu (skor=4), sering (skor=3), kadang-kadang (skor=2), tidak pernah (skor=1) kemudian dirata-rata untuk menentukan predikat.

Guru telah membuat RPP yang berisikan teknik dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai kompetensi sikap spiritual siswa, yaitu dengan menggunakan teknik penilaian diri. Berdasarkan Lampiran Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian, teknik penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan oleh peserta didik

secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan dalam penilaian sikap spiritual siswa, secara keseluruhan yang berperan dalam menilai kompetensi ini bukanlah siswa melainkan guru. Hal ini diperkuat

dengan hasil olah data kuesioner siswa tentang teknik penilaian

kompetensi sikap, peneliti memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2
Kuesioner Siswa Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sikap Spiritual

Pertanyaan	Ya	Tidak	Ragu	Total
Apakah guru PPKn Anda pernah melakukan penilaian sikap dengan teknik Penilaian diri?	5 (15%)	19 (58%)	9 (27%)	33 (100%)

Sebanyak 15% siswa menyatakan bahwa guru pernah menggunakan teknik penilaian diri, 58% siswa menyatakan guru tidak pernah menilai dengan teknik penilaian diri, sedangkan 27% siswa ragu guru pernah menggunakan

teknik penilaian diri.

Selain itu pada penilaian kompetensi sikap sosial siswa, guru telah menyusun RPP berisikan instrumen penilaian kompetensi sikap sosial sebagai berikut:

Tabel 3
Instrumen untuk menilai kompetensi sikap sosial yang terdapat dalam RPP guru

2. Sikap sosial									
Sikap sosial pada pertemuan 1 ini diukur dengan instrumen penilaian antar teman									
No	Nama	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Santun	Peduli	Percaya diri	Skala Predikat	Akhir/
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									

Setiap aspek diisi oleh teman dari siswa dengan rubrik di bawah ini kemudian dirata-rata untuk menentukan predikat

Dalam penilaian kompetensi sikap sosial, guru terlebih dahulu membuat skala penilaian yang tertuang dalam rubrik penilaian sikap sosial. Skala tersebut merupakan panduan untuk menilai kompetensi

sikap sosial siswa. Rubrik yang digunakan guru adalah sebagai berikut:

Rubrik Penilaian Sikap Sosial

RUBRIK PENILAIAN SIKAP SOSIAL				
Kriteria	Baik sekali 4	Baik 3	Cukup 2	Kurang 1
Jujur	Tindakan selalu sesuai dengan ucapan	Tindakan kadang-kadang sesuai dengan ucapan	Tindakan kurang sesuai dengan ucapan	Tindakan tidak sesuai dengan ucapan
Disiplin	Mampu menjalankan aturan dengan kesadaran sendiri	Mampu menjalankan aturan dengan pengarahan guru	Kurang mampu menjalankan aturan	Belum mampu menjalankan aturan
Tanggung Jawab	Tertib mengikuti instruksi dan selesai tepat waktu	Tertib mengikuti instruksi, selesai tidak tepat waktu	Kurang tertib mengikuti instruksi, selesai tidak tepat waktu	Tidak tertib dan tidak menyelesaikan tugas
Santun	Berbahasa positif dan bersikap sopan	Berbahasa positif tapi bersikap kurang sopan	Berbahasa negative dan bersikap kurang sopan	Berbahasa negative dan tidak sopan
Peduli	Selalu care/empati dengan lingkungan sekitar dan temannya	Sering care/empati dengan lingkungan sekitar dan temannya	Kadang-kadang care/empati dengan lingkungan dan temannya	Belum / tidak care/empati dengan lingkungan dan temannya
Percaya diri	Tidak terlihat ragu-ragu	Terlihat ragu-ragu	Memerlukan bantuan guru	Belum menunjukkan kepercayaan diri

Di dalam RPP disebutkan bahwa penilaian kompetensi sosial siswa digunakan teknik penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur (Sunarti & Rahmawati, 2014 : 20). Sama halnya dengan penilaian kompetensi

spiritual, dalam observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa dalam menilai kompetensi sikap sosial, guru tidak benar-benar menggunakan teknik penilaian antar teman, namun gurulah yang berperan untuk menilai kompetensi tersebut. Hal ini diperkuat dengan hasil olah data kuesioner siswa mengenai teknik penilaian antar teman, sebagai berikut:

Tabel 5
Kuesioner Siswa Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sikap Sosial

Pertanyaan	Ya	Tidak	Ragu	Total
Apakah guru PPKn Anda pernah melakukan penilaian sikap dengan teknik Penilaian antar teman?	5 (15%)	18 (55%)	10 (30%)	33 (100%)

Sebanyak 15% siswa menyatakan guru pernah melakukan penilaian dengan teknik penilaian antar teman, 55% siswa menyatakan guru tidak pernah menggunakan penilaian antar teman dan 30% siswa

menyatakan ragu guru pernah melakukan penilaian dengan menggunakan penilaian antar teman.

2. Kompetensi Pengetahuan
Kompetensi pengetahuan merupakan kompetensi yang mudah diukur dalam penilaiannya, penilaian

ini sudah ada sejak dahulu. Teknik yang digunakan pun sebagian besar masih sama, yaitu dengan menggunakan ulangan harian, ulangan lisan, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester, yang dalam Kurikulum 2013 revisi 2018 ini kata ulangan diubah menjadi penilaian seperti

penilaian harian, penilaian lisan, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Penilaian tersebut sama saja, hanya penggunaan kata ulangan diganti dengan kata penilaian.

Dalam olah data kuesioner yang diberikan pada siswa, peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6
Kuesioner Siswa Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Pertanyaan	Ya	Tidak	Ragu	Total
Apakah guru PPKn Anda pernah melakukan penilaian dengan teknik Penilaian Harian dan Penilaian Akhir Semester?	32 (97%)	1 (3%)	0 (0%)	33 (100%)
Apakah guru PPKn Anda pernah melakukan penilaian dengan teknik Penilaian lisan?	30 (91%)	0 (0%)	3 (9%)	33 (100%)
Apakah guru PPKn Anda pernah melakukan penilaian dengan teknik Penugasan?	32 (97%)	1 (3%)	0 (0%)	33 (100%)

Sebanyak 97% siswa menyatakan bahwa guru PPKn menggunakan teknik penilaian berupa penilaian harian dan Penilaian Akhir Semester, 3% lainnya menyatakan bahwa guru tidak melaksanakan penilaian dengan teknik tersebut. Sebanyak 91% siswa menyatakan selain dengan penilaian harian dan penilaian akhir semester, guru juga menggunakan penilaian tes lisan untuk penilaian pengetahuan, 9% lainnya menyatakan ragu-ragu terhadap penilaian lisan yang dilakukan guru, kemudian sebanyak 97% siswa menyatakan bahwa guru juga menilai kompetensi pengetahuan dengan teknik penugasan, sementara 3% siswa

menyatakan bahwa guru tidak melakukan penilaian dengan teknik penugasan.

Dalam observasi yang telah dilakukan peneliti, untuk menilai pengetahuan siswa, guru menggunakan 4 teknik yaitu:

a. Penilaian harian

Penilaian harian yang dilakukan siswa diadakan setiap akhir kompetensi dasar, hal ini juga telah berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh guru. Penilaian ini diadakan dengan batasan waktu tertentu. Sebelum diadakan penilaian harian, guru memastikan bahwa materi sudah tersampaikan, siswa diberitahu

untuk belajar dan minggu depan akan diadakan penilaian harian. Jadi penilaian harian tidak dilaksanakan secara mendadak agar siswa lebih siap dan mempelajari kompetensi yang akan dinilai. Apabila terdapat siswa yang tidak dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah diberitahukan guru pada awal tahun ajaran, maka akan diadakan program remedial. Program remedial yang diadakan guru biasanya dapat berupa: (i) Siswa mengerjakan kembali soal yang diujikan pada penilaian harian dan/atau; (ii) Siswa diberikan tugas yang berkaitan dengan materi dapat berupa mengerjakan soal di buku paket, dll. Sementara siswa yang dapat mencapai KKM yaitu ≥ 75 , maka akan diadakan program pengayaan yang dapat berupa pemberian tugas terkait materi.

b. Penilaian lisan

Penilaian lisan yang diadakan guru sering kali diadakan secara tiba-tiba, hal ini terjadi untuk melatih kesiapan siswa saat berlangsungnya pembelajaran agar siswa tetap fokus dan antusias terhadap materi yang dipelajari. Soal yang diberikan tidaklah disusun secara terstruktur, namun bersifat situasional sesuai dengan materi yang sedang dipelajari dan siswa tidak diperkenankan mencari jawaban dari sumber mana pun.

c. Penilaian akhir semester

Penilaian Akhir Semester (PAS) yang sebelumnya disebut Ulangan Akhir Semester (UAS), diadakan pada akhir semester dan dilaksanakan serentak secara umum dalam waktu yang sama di dalam satu sekolah. Dalam penilaian ini guru sebelumnya sudah memastikan siswanya telah selesai mempelajari materi yang akan diujikan. Guru memberikan kisi-kisi kepada siswa dan diadakan ulasan kisi-kisi untuk memfokuskan belajar siswa.

d. Penugasan

Teknik ini dilakukan guru dalam beberapa variasi, dapat berupa pemberian tugas proyek kepada siswa secara berkelompok, maupun tugas rumah yang berupa mencari materi untuk pertemuan selanjutnya. Penugasan ini diberikan guru dalam jangka waktu tertentu. Hal ini juga untuk menilai sikap sosial siswa yaitu sikap disiplin pada siswa dalam hal disiplin mengerjakan tugas tepat waktu.

Pada dasarnya kompetensi pengetahuan dapat diperoleh dari pemberian soal atau pertanyaan kepada siswa kemudian guru menilai kemampuan siswa menggunakan skala yang sebelumnya telah guru buat di dalam RPP sebagai berikut:

Tabel 7
Kriteria penskoran kompetensi pengetahuan dalam RPP guru

Penskoran Kriteria Penilaian untuk masing-masing indikator:	
Sangat sesuai	4
Sesuai	3
Cukup	2
Kurang	1
$\text{Nilai} = \frac{\sum \text{Skor perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$	

Penskoran ini dapat berubah tergantung pada masing-masing soal yang diberikan guru dengan menggunakan rumus skor yang diperoleh siswa dibagi dengan skor

maksimal dan dikalikan 100. Selain penilaian berupa angka, guru juga menilai siswa dengan kriteria pedoman penskoran sebagai berikut :

Tabel 8
Kriteria Pedoman Penilaian

Pedoman penskoran :	
-	Setiap jawaban diberi skor maksimal = 4
Rumus Nilai Akhir Tes Tertulis = $\frac{\text{Skordiperoleh}}{\text{Skormaksimal}} \times 4$	
Kriteria :	
<i>Sangat Baik</i>	: apabila memperoleh skor A – dan A
<i>Baik</i>	: apabila memperoleh skor B -, B, dan B +
<i>Cukup</i>	: apabila memperoleh skor C -, C, dan C +
<i>Kurang</i>	: apabila memperoleh skor D dan D +

Dari seluruh teknik yang digunakan tersebut, diperoleh rata-rata nilai siswa yang akan

dicantumkan di dalam rapor dengan rumus seperti berikut:

Tabel 9
Rumus penilaian yang digunakan guru kompetensi pengetahuan

Rata-rata PH , PL, PAS, Tgs	
Nilai	$= \frac{\quad}{4} \times 100$

3. Kompetensi Keterampilan

Dari hasil olah data kuesioner siswa yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa seluruh siswa dalam kelas menyatakan guru PPKn melakukan penilaian dengan teknik presentasi, selain presentasi sebanyak 91% siswa menyatakan guru PPKn menilai dengan teknik diskusi, 9% lainnya ragu guru PPKn pernah melakukan penilaian dengan teknik diskusi. Selain presentasi dan

diskusi, 85% siswa menyatakan guru menggunakan teknik keaktifan siswa di dalam kelas untuk menilai kompetensi keterampilan siswa, sedangkan 3% lainnya menyatakan guru tidak pernah menilai dengan teknik keaktifan dan 12% lainnya menyatakan ragu pernah dilakukannya penilaian dengan keaktifan siswa dalam kelas yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 10
Kuesioner Siswa tentang Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Keterampilan

Pertanyaan	Ya	Tidak	Ragu	Total
Apakah guru PPKn Anda pernah melakukan penilaian dengan teknik presentasi?	33 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	33 (100%)
Apakah guru PPKn Anda pernah melakukan penilaian dengan teknik diskusi?	30 (91%)	0 (0%)	3 (9%)	33 (100%)
Apakah guru PPKn Anda pernah melakukan penilaian dengan keaktifan siswa dalam kelas?	28 (85%)	1 (3%)	4 (12%)	33 (100%)

Sedangkan dari observasi yang dilakukan peneliti, secara garis besar guru menggunakan 2 teknik yaitu:

i. Diskusi dan presentasi

Diskusi seringkali diadakan guru ditiap-tiap materinya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan beberapa anggota yang seimbang dan heterogen. Dalam hal ini guru sudah menggunakan metode

pembelajaran yang inovatif dan modern untuk membantu siswa memahami konsep materi yang diajarkan. Dari kegiatan diskusi kelompok, siswa tidak serta merta hanya berdiskusi tanpa dilakukan penilaian, secara implisit guru melakukan pengamatan atau observasi pada siswanya hal ini juga tersusun di RPP guru sebagai berikut:

Tabel 11
Lembar Pengamatan Kegiatan Diskusi

Lembar Pengamatan									
Rubrik kegiatan Diskusi									
No.	Nama Siswa	Aspek Pengamatan					Jumlah Skor	Nilai	Ket
		Kerjasama	Mengkomunikasikan pendapat	Toleransi	Keaktifan	Menghargai pendapat teman			
1									
2									
3									
4									

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4 = Baik Sekali
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang

Nilai = $\frac{\sum \text{Skor perolehan}}{\text{Skor Maksimal (20)}} \times 100$

Kriteria Nilai
A = 80 – 100 : Baik Sekali
B = 70 – 79 : Baik
C = 60 – 69 : Cukup
D = < 60 : Kurang

Penilaian diskusi ini berkesinambungan dengan diadakannya penilaian presentasi. Setelah siswa mempelajari materi ataupun mengerjakan tugas yang diberikan guru, siswa dipersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sama seperti halnya diskusi, dalam presentasi siswa juga

diadakan pengamatan oleh guru, penilaian ini telah tercantum dalam RPP guru sebagai berikut:

Tabel 12
Lembar penilaian presentasi siswa

Rubrik Penilaian Presentasi									
No.	Nama Siswa	Aspek Penilaian					Jumlah Skor	Nilai	Ket
		Komunikasi	Sistematika penyampaian	Wawancara	Keberanian	Antusias			

Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria
4 = Baik Sekali
3 = Baik
2 = Cukup
1 = Kurang

Nilai = $\frac{\sum \text{Skor perolehan}}{\text{Skor Maksimal (20)}} \times 100$

Kriteria Nilai
A = 80 – 100 : Baik Sekali
B = 70 – 79 : Baik
C = 60 – 69 : Cukup
D = < 60 : Kurang

ii. Penilaian keaktifan siswa di dalam pembelajaran

Teknik ini dilakukan beriringan dengan penilaian yang lain, misalnya saat dibuka sesi tanya jawab yang dilakukan guru saat melakukan penilaian presentasi. Guru menilai siswa dari keaktifannya bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru, namun pertanyaan serta jawaban yang diutarakan siswa tetap terfokus pada materi.

Setelah guru mendapatkan nilai dari masing-masing siswa, maka guru akan menilai rata-rata nilai dari masing-masing kompetensi siswa dan memasukkan nilai dalam SIKADU (Sistem Akademik Terpadu).

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Salatiga dan Cara Mengatasi

a. Kurikulum yang diadakan revisi terus menerus

Kurikulum 2013 tidak serta merta diterapkan tanpa adanya penyesuaian guna meningkatkan profesionalisme guru. Maka dari itu, setiap satu tahun sekali diadakan revisi kurikulum. Revisi kurikulum tentu saja membutuhkan penyesuaian dari guru mata pelajaran, namun dalam penyesuaian itu nampak tidak selalu lancar dan mudah, sebelum guru terbiasa dalam kurikulum revisi sebelumnya, pada tahun berjalan sudah diadakan revisi yang berbeda lagi. Hal ini terkadang membuat guru tidak maksimal dalam melakukan penilaian. Contohnya saat kalender akademik dibagikan saat pembelajaran siswa sudah dimulai, padahal sebelum pembelajaran dimulai idealnya seorang guru telah mempunyai RPP, sedangkan

penyusunan RPP juga menyesuaikan dengan minggu efektif dalam kalender akademik. Maka dari itu, guru mengatasi dengan cara bekerja sama dengan rekan sejawat. Guru menuturkan bahwa guru PPKn mempunyai MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) SMK Negeri 2 Salatiga, MGMP tersebut berkerjasama dalam seluruh proses pembelajaran, mulai administrasi guru hingga evaluasi pembelajaran bersama.

b. Membutuhkan waktu yang lama dalam penilaian

Dalam penilaian autentik, sebelumnya guru menyatakan bahwa dalam menyusun penilaian ini meliputi seluruh proses dari awal hingga akhir penilaian. Penilaian autentik adalah penilaian yang kompleks dan tidak hanya pada aspek pengetahuan saja seperti pada kurikulum yang sebelum-sebelumnya, jika seperti pada kurikulum sebelumnya guru sangat mudah dalam menilai siswa, yaitu dengan hanya menggunakan ulangan harian, tes semester, maka dapat tersusun dengan mudah dan cepat nilai siswa, namun pada penilaian autentik semua kompetensi dasar siswa harus dinilai. Hal ini juga membuat penyusunannya memakan waktu yang tidak sebentar, untuk benar-benar menilai siswa secara adil maka membutuhkan kesabaran.

Pada kompetensi sikap siswa setiap guru harus melakukan penilaian yang menuntut ketelitian, saat ini guru PPKn setiap minggunya rata-rata mengajar 14 kelas dengan 2 tingkatan yang berbeda. Padahal sikap siswa tidak hanya dapat dinilai dalam 90 menit pembelajaran PPKn, namun di luar pembelajaran pun kompetensi sikap siswa seharusnya dinilai. Hal itu juga menghambat guru untuk menghafal

sikap dari masing-masing siswa. Hal ini dapat diatasi guru dengan menarik sampel siswa perkelas, guru menuturkan bahwa perkelasnya pasti terdapat siswa yang sikapnya tidak baik, kurang baik, baik, hingga sangat baik. Maka dari itu guru akan lebih mudah menghafal siswa dengan kriteria tersebut.

Pada kompetensi pengetahuan, siswa yang tergolong kemampuannya rendah seringkali menghambat pembelajaran dalam kelas. Misalnya saat guru melakukan penilaian harian, siswa tidak dapat mencapai KKM, maka guru harus mengadakan program remedial yang memakan waktu pembelajaran, dan juga membuat pekerjaan guru bertambah untuk mengoreksi kembali jawaban siswa yang remidi. Cara mengatasi guru untuk hal tersebut biasanya guru mengadakan remidi dengan memberi tugas yang dapat dikerjakan siswa di rumah.

Sedangkan pada kompetensi keterampilan, guru merasa membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar secara ideal melakukan penilaian ini. Guru harus memantau siswa saat berdiskusi dan presentasi dan juga menilai siswa saat itu juga. Guru mengatasi hal ini dengan sampel siswa perkelas, yaitu dengan mencatat nomor absen siswa yang aktif selama diskusi dan presentasi dan mencatat nomor absen siswa yang pasif selama berdiskusi dan presentasi.

Selain beberapa hal tersebut, guru menuturkan bahwa penilaian autentik terkendala pada waktu terlebih lagi saat materi yang akan disampaikan pada siswa lebih banyak dibandingkan minggu efektif yang ada di dalam kalender akademik. Terkadang hal ini yang membuat guru menjadi tidak maksimal dalam melakukan penilaian.

Hal ini diatasi guru dengan menyesuaikan materi dengan kalender akademik agar materi inti tersampaikan dengan baik, tanpa perlu terburu-buru diakhir semester karena materi belum tersampaikan sedangkan penilaian akhir semester akan segera dilaksanakan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat kesimpulannya adalah pelaksanaan penilaian autentik dalam mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 2 Salatiga belum berjalan dengan maksimal, namun guru sudah melakukan perencanaan penilaian autentik dengan baik pada umumnya. Perencanaan penilaian autentik yang dilakukan oleh guru meliputi: mempersiapkan jenis tes yang akan diberikan kepada siswa, mempersiapkan skala penilaian, mempersiapkan lembar panduan pengamatan penilaian siswa, dan mempersiapkan instrumen penilaian siswa.

Pelaksanaan penilaian autentik di SMK Negeri 2 Salatiga sudah terlaksana, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan oleh guru, seperti penilaian sikap yang seharusnya dapat dilakukan dengan 3 teknik yaitu teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman, sedangkan guru hanya melaksanakan satu teknik saja yaitu teknik observasi. Jika dilihat dari RPP guru, sebenarnya guru telah menyantumkan teknik penilaian observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman, namun dalam pelaksanaannya hanya satu teknik yang digunakan. Nampak pula beberapa teknik lain dalam penilaian autentik seperti teknik jurnal, proyek, dan portofolio oleh guru belum terlaksana.

Beberapa hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam melaksanakan penilaian autentik antara lain: kurikulum yang diadakan revisi terus menerus, dan waktu yang lama dalam penilaian. Namun sebagai guru yang dituntut untuk profesional, guru telah mampu mengatasi hambatan tersebut dengan baik.

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian maka ada beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam Pelaksanaan Penilaian Autentik dalam Mata Pelajaran PPKn Kelas XII TKJ A SMK Negeri 2 Salatiga Semester Ganjil Tahun Ajaran 2018/2019, antara lain:

- a. Guru diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya mengenai penilaian autentik yang ideal melalui membaca buku mengenai pedoman penilaian autentik, pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas pendidikan, internet, maupun sumber-sumber lain.
- b. Pihak sekolah melakukan pemantauan kepada guru dalam pelaksanaan pembelajaran dan penilaian autentik di dalam kelas. Pemberian angket kepada siswa mengenai penilaian yang telah dilaksanakan oleh guru. Agar penilaian yang ideal yang sesuai dengan pedoman dapat terlaksana dengan baik secara keseluruhan.
- c. Dalam implementasi penilaian autentik diharapkan guru bersifat terbuka terhadap kritik dan saran agar tercapainya penilaian yang autentik, sehingga siswa merasa benar-benar telah mengetahui kemampuannya.

Suatu Pendekatan Praktek.
Jakarta: Rineka Cipta.

- Fadillah, M. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 Dalam Pembelajaran SD/MI, SD/MTS, dan SMA/MA*. Yogyakarta : Ar-Ruzz
- Mas'ud. A & Sundari. (2010). *Modul Mata Kuliah Evaluasi dan Proses Belajar Biologi*. Ternate: Universitas Khairun Ternate.
- Samsuri. (2011). *Pendidikan Karakter Warga Negara*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Sunarti & Rahmawati. (2014). *Penilaian dalam Kurikulum 2013 (Membantu Guru dan Calon Guru Mengetahui Langkah-langkah Penilaian Pembelajaran)*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ubaedillah, A. (2011). *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Edisi Ketiga. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Lampiran Permendikbud No. 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik.
- Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian*

PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN PPKn DI KELAS X (SEPULUH) KGSP-B SMK NEGERI 2 SALATIGA

Regi Kristiawan*, Nani Mediatati

Prodi PPKn FKIP Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

*Email: Kristiawanregi666@gmail.com

Abstract. *This study aims to describe the implementation of character education in PPKn learning in class X KGSP B of SMK Negeri 2 Salatiga. Type of research: qualitative descriptive, research subject of PPKn teachers and students. Data collection: unstructured interview techniques, passive observation, documentation, and questionnaires. Data analysis using qualitative analysis. Research results: The implementation of character education in PPKn learning has been carried out starting from the planning, implementation and evaluation stages, the characters that grow: are religious, responsible, honest, disciplined, nationalism, and work together. Obstacles: some students lack character during learning. Solution: do a small reprimand and a friendly approach. PPKn learning is effective in carrying out character education.*

Keywords: *Character education, Civics Learning*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Karakter merupakan suatu sifat atau watak yang ada dalam diri individu yang telah ada ketika dilahirkan ke dunia. Karakter juga merupakan sifat batin dari individu atau manusia dalam mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya, dan karakter dapat terlihat atau ditemukan pada diri individu atau manusia dengan melihat sikap-sikap individu atau seseorang terhadap dirinya sendiri, kepada orang lain, dan lingkungan dimana individu atau manusia tersebut bertempat tinggal. Karakter juga menjadi sebuah ciri khas yang dimiliki individu atau manusia yang asli dan mengakar pada kehidupan individu atau manusia tersebut (Kartajaya dalam Heri Gunawan 2012:2).

Pendidikan memegang

peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter dari manusia Indonesia, hal ini terlihat pada salah satu tujuan atau fungsi dari pendidikan nasional adalah meningkatkan kualitas setiap manusia Indonesia, yaitu sebagai manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berbakti bagi bangsa dan negara Indonesia (Pasal 3 UU No.20 Tahun 2003).

Pembelajaran PPKn memiliki peranan penting dalam pendidikan karakter seperti yang dinyatakan oleh Kemendiknas dalam Winarno (2013:11) salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk melaksanakan Pendidikan karakter adalah mata pelajaran PPKn dimana mata pelajaran ini bukan hanya mengajarkan tentang teori melainkan juga mengajarkan

tentang karakter-karakter dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Serta tujuan pembelajaran PPKn untuk membentuk karakter siswa untuk mengamalkan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia (Daryono dalam Markum Susatim dan Kusuma Aryani 2010:24).

SMK Negeri 2 Salatiga merupakan salah satu sekolah kejuruan di kota Salatiga yang memiliki visi dan misi menciptakan lulusan yang berkarakter untuk bersaing dalam era global, terlihat jelas bahwa salah satu fokus dari pendidikan di sekolah tersebut adalah melakukan pendidikan karakter untuk membentuk karakter yang baik bagi lulusannya. Akan tetapi masih terdapat siswa yang berkarakter kurang baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin 5 Maret 2018 masih terlihat sebagian siswa SMK Negeri 2 Salatiga yang tidak menaati peraturan di sekolah seperti tidak menggunakan sepatu hitam, rambut tidak dipotong brosur bagi siswa pria, dan tidak menggunakan atribut sekolah dengan baik, bahkan berlaku tidak sopan kepada guru dengan cara mengumpat atau menghina guru dengan kata-kata negatif melalui media sosial. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara terhadap wakil kepala sekolah bagian kesiswaan pada hari Rabu 14 Maret 2018 yang menyatakan bahwa belum seluruh siswa-siswa di SMK Negeri 2 Salatiga

memiliki karakter baik terlebih kelas X (Sepuluh) yang baru saja resmi menjadi siswa di SMK Negeri 2 Salatiga. Hal ini menjadi tantangan dan permasalahan yang harus ditanggulangi oleh pihak sekolah dan guru mata pelajaran PPKn sebagai salah satu sarana pendidikan karakter di sekolah untuk mengoptimalkan pembelajaran PPKn di kelas agar dapat membentuk dan mengembangkan karakter yang baik dari siswa SMK Negeri 2 Salatiga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn ? (Rencana Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran) di kelas X (sepuluh) KGSP-B SMK Negeri 2 Salatiga
- b. Hambatan apa saja yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn di kelas X (sepuluh) KGSP-B SMK Negeri 2 Salatiga dan bagaimana cara mengatasinya ?
- c. Apakah pembelajaran PPKn efektif dalam mengembangkan karakter yang baik dari siswa kelas X (sepuluh) KGSP-B di SMK Negeri 2 Salatiga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn (Rencana Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran) dikelas X (sepuluh) KGSP-B SMK Negeri 2 Salatiga.
- b. Mendeskripsikan hambatan-hambatan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pendidikan karakter melalui pembelajaran PPKn dikelas X (sepuluh) KGSP-B SMK Negeri 2 Salatiga dan cara mengatasinya.
- c. Mendeskripsikan keefektifan pembelajaran PPKn dalam mengembangkan karakter yang baik dari siswa kelas X (sepuluh) KGSP-B SMK Negeri 2 Salatiga.

KAJIAN TEORI

a. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mendidik, melatih, dan mengevaluasi karakter yang dimiliki oleh siswa selama berproses belajar dan bersosial di sekolah. Thomas Lickona dalam Gunawan (2012 : 23) mendefinisikan pendidikan karakter adalah usaha dari pendidikan membentuk kepribadian siswa melalui pendidikan budi pekerti, dan hasilnya dapat dilihat dari tindak nyata atau tingkah laku yang baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak, kerja keras, dan lain sebagainya. Sedangkan Frye dkk dalam Yaumi (2014:8) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang

dilakukan dengan sengaja untuk membantu siswa mengerti, peduli akan, dan bertindak atas dasar nilai-nilai etis. Selanjutnya pendidikan karakter didefinisikan oleh Fakry Gaffar (2010:1) sebagai proses transformasi nilai-nilai kehidupan bertujuan untuk ditumbuh kembangkan dalam kepribadian siswa sehingga menjadi satu dalam berperilaku. Berdasarkan 3 pendapat pakar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dapat diartikan sebagai usaha atau upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk membentuk kepribadian siswa agar mengerti dan bertindak laku yang baik sesuai dengan nilai-nilai etis dalam kehidupan.

b. Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter dibentuk juga memiliki tujuan dalam prosesnya. Seperti pendapat dari Megawangi dalam Gunawan (2012:30) yang menyatakan pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, yang dapat berkompetitif, berakhlak mulia, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Pancasila. Selanjutnya Samani dan Harriyanto (2011:25) berpendapat bahwa tujuan pendidikan karakter adalah untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang baik kepada siswa untuk dapat dipahami dan dilakukan dalam kehidupan nyata. Sedangkan Parwez (2012:1-2) menyatakan tujuan dari

pendidikan karakter tidak lain adalah untuk membina karakter untuk kebenaran, kebaikan, dan kekuatan sikap yang ditujukan kepada lingkungan. Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya atau dibentuknya pendidikan karakter di sekolah adalah membentuk siswa yang berkarakter baik bagi bangsa dan negara dengan cara menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata yang berdampak baik bagi lingkungan sekitar.

c. Strategi Membentuk Karakter di Sekolah

Strategi diperlukan dalam pendidikan karakter siswa di sekolah, agar para siswa lebih mudah dalam mengerti dan mengimplementasikan karakter yang telah mereka pelajari di sekolah. Kemendiknas dalam Gunawan (2012:24) menyatakan strategi pelaksanaan dari pendidikan karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, pelaksanaan, kebiasaan yang dilakukan selama proses pembelajaran. Selaras dengan Kemendiknas, Majid (2011:37) berpendapat strategi yang harus dilakukan adalah dengan membiasakan bercerita tentang tokoh-tokoh dengan teladan yang baik, membiasakan bersikap baik, dan berempati kepada sesama saat dalam proses pembelajaran. Sedangkan Yaumi dan Syahid (2013:131) menyatakan strategi yang harus dilakukan dalam menumbuhkan

karater dikalangan siswa adalah dengan merumuskan nilai-nilai karakter pada silabus dan RPP sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Berdasarkan berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan strategi yang perlu dilakukan dalam pendidikan karakter disekolah adalah dengan merumuskan nilai-nilai karakter pada silabus dan RPP dan diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran dengan cara memberikan pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan yang menjadi teladan baik bagi siswa dalam bertingkah laku.

d. Pengertian Pembelajaran PPKn

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang sering disebut dengan *civic education* merupakan salah satu mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan karakter peserta didik, yaitu peserta didik memiliki karakter yang mencerminkan dan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia serta mempunyai karakter yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Edmonson dalam A. Ubaedillah (2011: 5) mendefinisikan *Civic Education* adalah studi yang berfokus pada pembelajaran tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak, dan hak-hak istimewa warga negara. Sedangkan John J. Cogan dalam Winarno (2013:4) berpendapat bahwa *Civic Education* atau

pembelajaran PPKn adalah suatu pembelajaran atau mata pelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan karakter warga negara muda, agar dimasa depan sebagai warga dewasa dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Samsuri (2011:28) menyatakan bahwa pembelajaran PPKn adalah suatu upaya dalam menyiapkan generasi muda (siswa) untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, kecakapan dalam bertindak, dan karakter-karakter yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma untuk berpartisipasi aktif dalam berkehidupan bermasyarakat. Berdasarkan tiga pendapat diatas mengenai pembelajaran PPKn, maka dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran PPKn atau Civic Education adalah suatu proses studi yang berfokus pada menyiapkan generasi muda untuk menjadi warganegara yang memiliki pengetahuan dan karakter yang baik agar kelak dapat berperan aktif dalam berkehidupan bermasyarakat, melalui pembelajaran mengenai pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait Hak dan Kewajiban sebagai warga negara.

e. Tujuan Pembelajaran PPKn

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada umumnya memiliki tujuan sebagai sarana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang kewarganegaraan dan membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan kehidupan berbangsa

dan bernegara di Indonesia. A. Ubaedillah (2011: 9) berpendapat tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah membangun karakter (character building) yang kritis, cerdas, terampil, dan berkarakter yang dapat mengamalkan Pancasila sebagai Ideologi atau dasar negara Indonesia. Selaras dengan pendapat diatas Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dalam Winarno (2013:18) menyatakan tujuan dari Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut Fenton dalam Aryani dan Susatim (2010:46) tujuan dari Pendidikan kewarganegaraan antara lain : 1) menyiapkan para siswa untuk menjadi warga negara yang baik, 2) membimbing peserta didik untuk belajar cara berfikir, 3) mempelajari kembali warisan budaya bangsa. Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan tujuan dari Pendidikan kewarganegaraan atau pembelajaran PPKn adalah untuk membentuk peserta didik atau siswa dalam berfikir dan bertindak secara kritis, terampil, dan berkarakter agar kelak dimasa depan menjadi warga negara yang baik dan dapat mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam berkehidupan bermasyarakat.

f. Hubungan Pembelajaran PPKn dengan Pendidikan Karakter Siswa di Sekolah

Pembelajaran PPKn pada umumnya adalah salah satu pembelajaran yang berkaitan erat dengan Pendidikan karakter siswa disekolah dimana materi-materi yang terdapat pada pembelajaran sesuai dengan norma atau nilai luhur bangsa Indonesia. Suparno (2015:119) menyatakan bahwa pembelajaran PPKn mengajarkan kepada siswa mengenai isi sila-sila yang sangat berkaitan dengan karakter atau Pendidikan karakter siswa, sedangkan Manullang dan Prayitno (2011:23) berpendapat bahwa Pembelajaran PPKn berkaitan dengan pendidikan karakter karena mampu meningkatkan kompetensi dalam bentuk pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa. Depdiknas dalam Aryani dan Susatim (2010:39) menyatakan bahwa pembelajaran PPKn merupakan pembelajaran yang memfokuskan materi kepada pembentukan diri atau karakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan 3 teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran PPKn sangat berkaitan dengan Pendidikan karakter siswa karena materi pembelajaran memfokuskan kepada pembentukan karakter dan meningkatkan kompetensi dalam bentuk pemahaman, keterampilan, dan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sugiono (2013:1) mengartikan penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, dengan analisa data bersifat deduktif, dan hasil dari penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi. Subjek penelitian adalah Guru Mata Pelajaran PPKn berjumlah 1 (Satu) orang dan Siswa-siswi kelas X (Sepuluh) KGSP-B sejumlah 30 (Tiga Puluh) orang. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi, metode dokumentasi, dan angket atau kusioner. Metode analisis data menggunakan metode reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan Metode keabsahan data menggunakan metode triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pembelajaran

Dari keterangan hasil wawancara Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D selaku guru pengampu mata pelajaran PPKn serta observasi pada pembelajaran PPKn di Kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga sudah menyusun RPP yang bermuatan pendidikan karakter didalamnya, dimana beliau menyatakan bahwa dalam pembuatan RPPnya sudah

menuliskan konten-konten pendidikan karakter didalam RPP. Dalam pembuatan RPP juga harus diperhatikan tentang kesesuaian antara KD, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, dan pengembangan materi pembelajaran nilai-nilai karakter yang ingin dicapai selama proses pembelajaran. Kemudian peneliti melakukan pengecekan data (*crosscheck data*) data wawancara dan observasi terhadap dokumentasi RPP yang diberikan kepada peneliti, dimana data wawancara dan observasi telah sesuai dengan RPP yang telah disusun. Pada dasarnya RPP yang telah dibuat oleh guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga telah memperlihatkan dan memuat Pendidikan karakter serta terdapat evaluasi atau penilaian terhadap Pendidikan karakter yang dilakukan selama proses pembelajaran menggunakan pedoman penilaian sikap didalamnya.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

2.1 Metode Pembelajaran

Bedasarkan pernyataan Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D dalam wawancara bahwa metode yang digunakan adalah metode pembelajaran PBL (*Problem Based Learning*) sebagai sarana penyampaian materi dan implementasi pendidikan karakter. Seperti yang telah dinyatakan diatas metode pembelajaran ini memang sangat efektif dalam mengimplementasikan Pendidikan

karakter dalam materi yang disampaikan dimana PBL (*Problem Based Learning*) ini memiliki tahap-tahap metode pembelajaran yang membuat peserta didik berfokus pada pengembangan karakter dengan kelompok dalam mengerjakan salah satu tugas yang diberikan oleh guru. Metode ini juga banyak mengeksplorasi siswa dalam pengembangan karakter seperti bekerjasama, jujur, dan disiplin dalam mengerjakan tugas serta sifat tidak membeda-bedakan antar sesama kelompok dan dapat bekerjasama dengan baik. Selanjutnya peneliti melakukan observasi guna melihat serta melakukan pengecekan data (*crosscheck data*) metode pembelajaran sudah diterapkan seperti yang telah dinyatakan pada proses wawancara, berikut adalah hasil observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga : Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D menggunakan metode pembelajaran Problem Based Learning sebagai perwujudan implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn, dimana metode ini berfokus pada pengembangan karakter siswa. Pertama ibu menyampaikan materi pokok dari pembelajaran dan melakukan sesi tanya jawab agar siswa dapat berani berpendapat atau berbicara di dalam pembelajaran, setelah itu peserta didik dibagi dalam kelompok dan memberikan contoh kasus beserta soal yang harus diidentifikasi oleh

kelompok siswa. Dalam pembelajaran kelompok ini banyak karakter yang ditumbuhkan atau dibentuk pada siswa, seperti karakter bertanggungjawab, disiplin, dan jujur dalam mencari sumber belajar untuk membantu mengidentifikasi contoh kasus beserta soal yang diberikan. Melalui metode pembelajaran ini peserta didik juga ditumbuhkan karakter nasionalisme dimana contoh kasus yang diberikan mengajarkan kepada peserta didik untuk mencintai negara serta peraturan yang diberlakukan di Indonesia. Setelah tugas selesai dikerjakan, setiap kelompok dipersilahkan untuk presentasi. Dalam tahap presentasi ini juga banyak dikembangkan karakter pada peserta didik, dimana sebelum memulai presentasi siswa memanjatkan syukur kepada Tuhan YME atas anugerah yang diberikan, serta karakter tanggung jawab, disiplin, dan jujur dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok yang telah dilakukan, dan menumbuhkan rasa saling bekerjasama yang baik antar sesama peserta didik dalam mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dari pengecekan data (*crosscheck data*) yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran PPKn yang dilakukan oleh guru pada kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga menggunakan metode pembelajaran PBL (*Problem Based Learning*) sebagai sarana penyampaian materi dan implementasi pendidikan karakter selama proses pembelajaran

dilakukan, serta karakter yang tumbuh pada diri peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan sarana metode pembelajaran PBL (*Problem Based Learning*) ini yaitu : Religius, Jujur, Disiplin, Bertanggung Jawab, Nasionalisme, dan Kerjasama. Kemudian peneliti melakukan olah data kusioner atau angket sebagai penguat data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Berikut penjelasan olah data kusioner yang telah dilakukan yaitu ada 2 (dua) pernyataan mengenai metode pembelajaran yang dilakukan atau dilaksanakan pada pembelajaran PPKn di Kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga oleh guru yaitu pernyataan positif (*Vavorable*) dan pernyataan Negatif (*Unvavorable*) dimana masing-masing dari pernyataan tersebut memiliki skor masing-masing. Olah data kusioner atau angket yang telah dilakukan menunjukan bahwa 32 (tiga puluh dua) peserta didik kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga menyatakan bahwa pernyataan positif (*Vavorable*) tentang metode pembelajaran PPKn yang telah memuat pendidikan karakter didalamnya dengan skor tinggi yaitu 3,3 (tiga koma tiga) dari 32 (tiga puluh dua) responden yang ada. Sesuai dengan keterangan predikat/kategori skor yang ada, terlihat pernyataan positif (*Vavorable*) mendapatkan predikat (sangat tinggi) yang menjawab atau menyatakan sangat sesuai atau sangat setuju bahwa metode yang digunakan

oleh guru telah memuat Pendidikan karakter didalamnya. Sedangkan pernyataan negatif (Unvavorable) berbanding terbalik dengan pernyataan positif (Vavorable) dimana dari 32 (tiga puluh dua) responden yang ada menyatakan bahwa tidak sesuai atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada dibuktikan dengan pernyataan negatif (Unvavorable) ini memperoleh skor berpredikat (sangat tinggi) yang menyatakan bahwa dimana metode pembelajaran PPKn yang digunakan guru tidak memuat pendidikan karakter didalamnya.

Dari ketiga olah data diatas dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D pada proses pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga telah memuat atau mengimplementasikan Pendidikan karakter didalamnya.

2.2 Media Pembelajaran PPKn

Menurut pemaparan wawancara, dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas guru menggunakan dengan media pembelajaran berupa video yang diunduh pada youtube yaitu video mengenai contoh kasus pelanggaran kewajiban warganegara dalam menaati peraturan lalu lintas yang diberlakukan di Indonesia. Dijelaskan juga bahwa media pembelajaran ini juga bentuk dari implementasi pendidikan karakter pada pembelajaran PPKn, karena melalui media pembelajaran berupa kasus pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas ini

peserta didik khususnya kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga memperoleh Pendidikan karakter seperti karakter bersyukur, bertanggung jawab, dan disiplin dalam menaati peraturan lalu lintas yang ada atau diberlakukan di negara Indonesia. Dari proses pemutaran video ini peserta didik harus bisa memaparkan identifikasi yang berkaitan dengan kasus tersebut dan dapat memberikan solusi yang baik terutama perilaku atau karakter yang baik saat berkendara dan tidak mengingkari kewajiban sebagai warganegara dengan selalu menaati peraturan lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap media pembelajaran yang telah digunakan selama proses pembelajaran dan sebagai pengecekan data (crosscheck data), berikut adalah hasil observasi yang telah dilakukan : Media pembelajaran yang digunakan Ibu Yovita dalam kelas adalah contoh-contoh kasus dalam bentuk video yang dipresentasikan melalui teknologi proyektor, dimana contoh-contoh kasus ini sesuai dan terjadi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti video tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pelajar. Melalui media ini berbagai karakter siswa ditumbuhkan seperti karakter bersyukur kepada Tuhan YME karena anugerahnya kita masih dilindungi dari pelanggaran hukum yang bisa saja kita perbuat, selanjutnya karakter tanggung jawab dalam menerima sanksi yang diberikan kepada

pelanggar lalu lintas, disiplin menaati peraturan lalu lintas yang berlaku, jujur dalam bertindak apabila melanggar harus dapat menerima sanksi yang ada. pengecekan data (crosscheck data) terlihat kesesuaian antara data wawancara dan data observasi yang didapatkan, yaitu dimana media pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran PPKn di Kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga sudah memuat serta mengimplementasikan Pendidikan karakter didalamnya. Melalui media pembelajaran berupa video kasus pelanggaran lalu lintas ini selain materi tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warganegara tersampaikan juga karakter yang timbul lebih kuat setelah melalui media ini memperlihatkan kasus nyata terhadap pelanggaran lalu lintas yang bisa saja nanti terjadi pada diri peserta didik, dan memperlihatkan bahwa menjadi warganegara yang baik adalah menaati peraturan lalu lintas. Peserta didik juga memperoleh Pendidikan karakter seperti bertanggung jawab apabila melanggar, disiplin dalam peraturan lalu lintas, dan bersyukur kepada Tuhan YME bahwa peserta didik tidak dalam kondisi tersebut seperti video yang digunakan sebagai media pembelajaran. Peserta didik juga sangat tertarik dan menghayati pemutaran video tersebut dan benar-benar merenungi bahwa kasus tersebut adalah contoh dimana karakter tidak bertumbuh dengan baik. Meskipun dari

peserta didik masih ada yang tidak mengamati pemutaran video dengan baik tetapi sebagian besar peserta didik telah mengamati video dan mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Setelah melalui pengambilan data menggunakan wawancara dan observasi, peneliti juga menambahkan pengutan data berupa olah data kusioner terhadap 32 (tiga puluh dua) orang responden yaitu peserta didik kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga dengan tujuan sebagai penguatan data wawancara dan data observasi yang telah dilakukan. Berikut adalah hasil dari olah data kusioner : terlihat bahwa pernyataan positif (vavorable) dari peserta didik mendapatkan skor “sangat tinggi” sejumlah “3,6 (tiga koma enam)” yaitu menjawab “sesuai” bahwa pernyataan media pembelajaran yang digunakan oleh guru sudah memuat pendidikan karakter didalamnya dan digunakan pada saat pembelajaran PPKn di kelas, serta untuk pernyataan negatif peserta didik kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga terhadap penggunaan media pembelajaran oleh Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D dalam proses pembelajaran memperoleh skor tinggi sejumlah “3,7 (tiga koma tujuh)” yang menyatakan “tidak sesuai” bahwa media pembelajaran yang digunakan belum memuat Pendidikan karakter didalamnya.

Bedasarkan 3 (tiga) sumber data diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media

pembelajaran oleh Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D pada proses pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga telah memuat dan mengimplementasikan Pendidikan karakter didalamnya.

3. Evaluasi Pembelajaran

Berdasarkan data wawancara yang dilakukan terhadap guru ditemukan hasil sebagai berikut: guru telah melakukan evaluasi pembelajaran mengenai karakter peserta didik. Penilaian sikap atau karakter peserta didik telah dimuat pada RPP yang telah disusun, format penilaian sikap atau karakter sebagai lampiran dalam RPP untuk mengukur atau mengevaluasi karakter yang tumbuh dalam diri peserta didik. Terlebih di SMK Negeri 2 Salatiga dan terkhusus untuk kelas satu, penilaian sikap atau karakter ini sebagai salah satu syarat kenaikan kelas bagi peserta didik kelas atau tingkat X (sepuluh) . Selain dalam RPP evaluasi terhadap Pendidikan karakter selama proses pembelajaran PPKn di kelas, juga dilakukan dengan menanyakan langsung kepada peserta didik mengenai karakter apa saja yang tumbuh dalam diri masing-masing peserta didik, proses ini juga dinilai sebagai tolak ukur pelaksanaan Pendidikan karakter yang beliau lakukan selama proses pembelajaran PPKn di kelas. Selanjutnya dilakukan observasi guna melihat evaluasi pembelajaran yang dilakukan, berikut hasil data observasi yang telah dilakukan : evaluasi

pembelajaran pendidikan karakter yang di lakukan Ibu Yovita yaitu penilaian sikap yang terdapat pada RPP, serta Ibu Yovita juga melakukan evaluasi saat pembelajaran berakhir yaitu menanyakan kepada para siswa karakter apa saja yang tumbuh dalam diri siswa setelah melalui pembelajaran PPKn hari ini. Setelah memperoleh data dari wawancara dan observasi mengenai evaluasi Pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn, peneliti melakukan pengecekan data (crosscheck data) data wawancara dan observasi terhadap data dokumentasi. Dalam RPP memang sudah mencantumkan dan memuat evaluasi terhadap Pendidikan karakter yaitu berupa bentuk penilaian sikap atau karakter peserta didik pada 1 (satu) kali sub bab atau materi yang telah dilaksanakan. Penilaian sikap atau karakter ini masuk dalam lampiran RPP.

4. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn

Berdasarkan data wawancara, hambatan yang terjadi pada proses Pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga adalah masa transisi atau perpindahan karakter peserta didik dari SMP menuju ke SMK, dimana peserta didik yang sebelumnya berbeda-beda SMP dan memiliki karakter yang berbeda-beda harus menyesuaikan dan menjadi 1 (satu) karakter

yang baik ketika masuk ke SMK Negeri 2 Salatiga. Bentuk dari masa transisi atau perpindahan karakter ini terlihat dari peserta didik masih ada yang kurang memperhatikan apabila ada seseorang yang berbicara di depan kelas, saat penjelasan materi masih ada yang berbicara sendiri, telat masuk kelas pembelajaran, dan tidur saat proses pembelajaran berlangsung. Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D juga menyatakan bahwa peserta didik masih ada yang membawa karakter kurang baik ke sekolah dari rumah mereka masing-masing. Selanjutnya dilakukan observasi guna melihat hambatan-hambatan yang terjadi serta sebagai pengecekan data (crosscheck data), berikut adalah data observasi : Siswa kelas X KGSP B yang baru saja resmi menjadi siswa SMK Negeri 2 Salatiga, terkadang masih menunjukkan karakter yang kurang baik saat dalam pembelajaran, dimana contohnya masih ada siswa yang tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung, bercanda sendiri dengan teman, serta tidur di dalam kelas ketika Ibu Yovita sedang menjelaskan materi pembelajaran, dan karakter-karakter kurang baik yang dibawa dari rumah, hal-hal ini menjadi penghambat implementasi Pendidikan karakter dalam pembelajar PPKn, dimana masa transisi siswa kelas satu dari SMP yang berbeda-beda dan karakter yang kurang baik dibawa dari rumah. Berdasarkan pengecekan data (crosscheck data) yang dilakukan, ditemukan bahwa

ada kesesuaian pernyataan wawancara dan observasi, dimana peserta didik kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga masih menjalani masa transisi atau perpindahan karakter dari SMP menuju ke SMK dan baru saja resmi sebagai anggota peserta didik di SMK Negeri 2 Salatiga dan peserta didik masih ada yang membawa karakter kurang baik dari rumah ke sekolah, yang merupakan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Masih ada peserta didik yang tidak memperhatikan guru saat menjelaskan materi di depan kelas, berbicara sendiri saat pembelajaran berlangsung, dan tidur saat pembelajaran berlangsung.

5. Solusi terhadap hambatan-hambatan yang terjadi

Berdasarkan pemaparan data wawancara diatas terlihat solusi yang dilakukan oleh Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D adalah melakukan pendekatan kepada peserta didik dengan melakukan teguran-teguran kecil dengan tidak melakukan teguran keras, dan terus mengingatkan kepada peserta didik bahwa nilai sikap pada pembelajaran PPKn sangat menentukan kenaikan kelas dari peserta didik, serta mengingatkan bahwa tata tertib di SMK Negeri 2 Salatiga memiliki masing-masing poin ketika peserta didik melanggar atau berkarakter tidak baik di sekolah, kemudian apabila hambatan itu sudah dirasa sangat tidak berkenan atau menjadi semakin besar Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D melakukan

pendekatan terhadap orang tua atau wali dari masing-masing peserta didik. Selanjutnya dilakukan observasi terhadap solusi yang dilaksanakan, berikut adalah hasil observasi : solusi yang dilakukan Ibu Yovita sama seperti yang beliau katakan di wawancara, Ibu menciptakan diri sebagai teladan bagi siswa ketika masuk ke kelas dan memulai pembelajaran, beliau selalu memperingatkan kepada siswa bahwa nilai sikap dari pembelajaran PPKn sangat menentukan kenaikan kelas siswa kelas X. Di SMK Negeri 2 Salatiga nilai sikap yang mempengaruhi kenaikan kelas ada dua pembelajaran yaitu pembelajaran Agama dan PPKn. Ibu Yovita juga selalu melakukan pendekatan serta teguran kecil kepada siswa yang karakternya kurang baik saat dalam pembelajaran, seperti pada hari ini ada siswa yang dari awal pembelajaran berbicara dengan teman satu bangku dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan guru hari ini, Ibu Yovita langsung mendatangi tempat duduk siswa tersebut dan memberikan teguran kecil serta pendekatan kepada siswa agar siswa tidak berperilaku/berkarakter yang lebih buruk dari yang dia lakukan pada saat itu. Selanjutnya dilakukan pengecekan data (crosscheck data) wawancara dengan observasi dan ditemukan kesimpulan sebagai berikut : bahwa ada kesesuaian dari data wawancara dan data observasi, dimana Ibu Dra. Yovita Violleta ratna D telah melakukan

pendekatan dengan teguran kecil, dan mengingatkan kepada peserta didik tentang penilaian sikap yang memengaruhi kenaikan kelas, dan mengingatkan akan poin-poin tata tertib yang berlaku di sekolah sebagai solusi dalam menghadapi hambatan yang terjadi serta Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D menjadikan dirinya sebagai contoh teladan karakter yang baik yang harus dilakukan saat proses pembelajaran maupun keseharian peserta didik di sekolah.

6. Efektifitas Pembelajaran PPKn dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter

Bedasarkan data wawancara dan observasi serta pengecekan data (crosscheck data) yang telah dilakukan, bahwa Efektifitas pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan pendidikan karakter dan menumbuhkan karakter yang baik bagi peserta didik, dimulai dari RPP, Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga telah memuat pendidikan karakter didalamnya. Mata pelajaran PPKn sangat efektif menumbuhkan karakter karena materi-materi yang disampaikan sangat kental dengan norma-norma, hukum, hak dan kewajiban, serta dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dan menuntun peserta didik untuk berkarakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Efektifitas pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan pendidikan karakter dibuktikan dengan karakter-

karakter yang tumbuh dalam diri peserta didik seperti karakter bertanggung jawab, religius, disiplin, jujur, nasionalisme, dan berkerjasama yang merupakan hasil dari pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga. Penguatan data dengan melakukan olah data kusioner atau angket terhadap 32 (tiga puluh dua) responden yaitu peserta didik kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga. Berikut adalah hasil olah data kusioner : bahwa pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga yang diampu oleh Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D telah mampu mengimplementasikan Pendidikan karakter dan menumbuhkan karakter pada peserta didiknya, dilihat dari skor yang didapatkan pernyataan positif (vavorabel) yaitu pernyataan mengenai Pembelajaran PPKn dapat menumbuhkan karakter bertanggung jawab dengan skor 3,5 (tiga koma lima), karakter religius 3,5 (tiga koma lima), karakter disiplin 3,0 (tiga koma nol), karakter jujur 3,3 (tiga koma tiga), karakter nasionalisme 3,5 (tiga koma lima), dan karakter berkerjasama 4,0 (empat koma nol), mendapatkan predikat “sangat tinggi” dari 32 (tiga puluh dua) responden yang menjawab “sangat sesuai” pernyataan positif (vavorabel). Sedangkan pernyataan negative (unvavorabel) juga memiliki predikat skor yang “sangat tinggi” dimana 32 (tiga puluh dua) responden menjawab “sangat

tidak sesuai” pernyataan yang menyatakan bahwa pembelajaran PPKn tidak dapat menumbuhkan karakter bertanggung jawab dengan skor 3,6 (tiga koma enam), karakter religius 3,7 (tiga koma tujuh), karakter disiplin 3,5 (tiga koma lima), karakter jujur 3,6 (tiga koma enam), karakter nasionalisme 3,6 (tiga koma enam), dan karakter berkerjasama 3,6 (tiga koma enam).

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga telah dilaksanakan dengan baik oleh guru mata pelajaran PPKn, dimana dimulai RPP yang disusun oleh Ibu Dra. Yovita Violleta Ratna D selaku guru mata pelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga telah memuat pendidikan karakter didalamnya. Pelaksanaan pembelajaran telah menggunakan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter pada peserta didik kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga yaitu metode pembelajaran *cooperative learning* tipe PBL (*Problem Based Learning*), dimana metode ini memfokuskan kepada peserta didik untuk menunjukkan karakter yang baik selama proses pembelajaran di kelas, serta sudah menggunakan media pembelajaran yang menunjang atau memberikan contoh karakter yang baik dan tidak baik dengan bentuk media video tentang kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh peserta didik di Indonesia. Evaluasi pembelajaran bukan hanya dilakukan terhadap materi atau hasil belajar kognitif tetapi juga melakukan evaluasi terhadap

Pendidikan karakter yang telah dilaksanakan saat proses pembelajaran yaitu berupa penilaian sikap dan menanyakan langsung kepada peserta didik karakter apa saja yang diperoleh selama proses pembelajaran PPKn berlangsung sebelum jam pembelajaran berakhir. Hambatan-hambatan yang terjadi saat proses pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga berupa masa transisi atau perpindahan karakter peserta didik dari SMP ke SMK dan karakter kurang baik yang dibawa peserta didik dari rumah ke sekolah. Bentuk-bentuk dari hambatan tersebut adalah peserta didik masing-masing sering kurang memperhatikan guru ketika pembelajaran dimulai, berbicara sendiri dengan teman ketika proses pembelajaran berlangsung, serta tidur saat proses pembelajaran berlangsung. Solusi yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan menjadikan dirinya sebagai contoh teladan bagi peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran dan keseharian di sekolah, kemudian melakukan pendekatan disertai teguran kecil terhadap peserta didik yang menunjukkan karakter kurang baik saat pembelajaran PPKn berlangsung, dan mengingatkan kepada peserta didik harus berkarakter dengan baik agar tidak melanggar tata tertib yang diberlakukan di sekolah agar terhindar dari sanksi berupa poin-poin yang diterapkan di SMK negeri 2 Salatiga, serta apabila peserta didik sudah melakukan karakter yang sangat tidak baik dilakukan pendekatan kepada orang tua atau wali murid peserta didik. Efektifitas pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan pendidikan karakter dan menumbuhkan karakter yang baik bagi

peserta didik, dimulai dari RPP, Metode Pembelajaran, Media Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga telah memuat pendidikan karakter didalamnya. Mata pelajaran PPKn sangat efektif menumbuhkan karakter karena materi-materi yang disampaikan sangat kental dengan norma-norma, hukum, hak dan kewajiban, serta dasar negara yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dan menuntun peserta didik untuk berkarakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Efektifitas pembelajaran PPKn dalam pelaksanaan pendidikan karakter dibuktikan dengan karakter-karakter yang tumbuh dalam diri peserta didik seperti karakter bertanggung jawab, religius, disiplin, jujur, nasionalisme, dan berkerjasama yang merupakan hasil dari pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendidikan karakter dalam pembelajaran PPKn di kelas X KGSP B SMK Negeri 2 Salatiga sudah terlaksana dengan baik dimulai dari perencanaan (pembuatan RPP), pelaksanaan (penggunaan metode dan media pembelajaran, dan evaluasi (penilaian sikap) yang dilakukan oleh guru telah memuat pendidikan karakter didalamnya, meskipun masih terjadi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya guru sudah menyiapkan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Serta pembelajaran PPKn efektif dalam menumbuhkan karakter atau melaksanakan pendidikan

karakter dalam proses pembelajaran.

Implementasi. Jakarta : Prenadamedia Group.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani Kusuma, Susatim Markum. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor : Ghalia Indonesia
- A.Ubaedillah. (2015) . *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gunawan Heri. (2012). *Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasi*. Bandung : Alfabeta, cv
- Kesuma Dharma, dkk. (2011). *Pendidikan Karakter : Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung : PT Rosdakarya Offset.
- Manullang Belferik, Prayitno. (2011). *Pendidikan Karakter dalam Pembangunan Bangsa*. Jakarta : PT Grasindo
- Suparno Paul. (2015). *Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta : PT. Kanisius
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta, cv
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta : Bumi Aksara
- Yaumi Muhamad. (2014). *Pendidikan Karakter : Landasan, Pilar, dan*



Jurnal PPKn

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (AP3Knl) - JAWATENGAH